

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

TAHUN ANGGARAN 2023



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang, Jawa Tengah 50136, Indonesia
T. (024) 8316315, 8314312 F. (024)8414811 HP. 082134525006
e. bbspjppi.kemenperin@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri telah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK), sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa kinerja, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja BBSPJPPI.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program kegiatan kedepannya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas capaian kinerja BBSPJPPI.

Semarang, Januari 2024

Kepala BBSPJPPI,

Sidik Herman

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar di bawah koordinasi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang memiliki kompetensi di bidang penanganan pencemaran industri. Dengan dukungan sarana prasarana berikut kompetensi SDM yang dimiliki, BBSPJPPI berkontribusi dalam pemberian layanan jasa teknis di bidang standardisasi dan penanganan permasalahan industri di bidang lingkungan. Untuk mendukung sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010 BBSPJPPI telah ditetapkan menjadi satker yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam mendukung capaian kinerja Kementerian Perindustrian dan BSKJI, BBSPJPPI memiliki 8 (Delapan) Sasaran Strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) BBSPJPPI Tahun 2023. Berdasarkan capaian kinerja BBSPJPPI tahun 2023, target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja seluruhnya dapat tercapai.

Berkaitan dengan dukungan anggaran, pada 2023 BBSPJPPI memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp. 32.177.573.000,- yang dalam pelaksanaannya mengalami 16 (enam belas) kali proses revisi anggaran. Berdasarkan pengesahan DIPA revisi terakhir, anggaran BBSPJPPI mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 32.411.625.000,- yang terdiri dari anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 17.511.625.000 dan PNPB tahun berjalan sebesar Rp. 14.900.000.000,-. Adapun capaian realisasi anggaran sampai akhir tahun 2023 tercapai sebesar Rp. 31.593.377.867 atau sebesar 97,48% dengan komposisi penyerapan sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 17.444.857.552,- (99,62%) dan sumber anggaran PNPB tahun berjalan sebesar Rp. 14.148.520.315,- (94,96%). Capaian realisasi anggaran sebesar 97,48% tersebut di bawah target yang ditetapkan BSKJI yang sebesar 98,04%. Meskipun demikian, secara umum capaian fisik kegiatan tahun 2023

telah tercapai 100% yang ditandai dengan tercapainya seluruh target Rincian Output yang ditetapkan dalam DIPA BBSPJPPI TA 2023.

Capaian target kinerja jasa layanan satker BBSPJPPI sampai dengan akhir 2023 tercapai dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 16.283.712.001,- atau 109,28% dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp. 14.900.000.000,-. Realisasi tersebut berdasarkan pelaksanaan pemberian jasa layanan teknis kepada 791 pelanggan sektor industri dan 212 pelanggan non industri. Komposisi penerimaan PNBP utamanya masih ditopang dari layanan jasa pengujian yang berkontribusi sebesar 79,43% dan layanan sertifikasi 13,30% dari total penerimaan.

Kedepannya untuk mengoptimalkan peranan BBSPJPPI dalam mendukung kebijakan Pemerintah utamanya terkait penerapan standardisasi industri sekaligus mendorong upaya peningkatan penerimaan PNBP, BBSPJPPI telah melakukan upaya inovasi pengembangan layanan meliputi layanan sertifikasi halal, penyelenggara uji profisiensi dan pelaksanaan uji RATA (Relative Accuracy Test Audit) serta pengembangan Lembaga Verifikasi Independen (LVI). Pada 2023, BBSPJPPI juga telah mengajukan usulan untuk penyesuaian tarif layanan BLU yang saat ini diberlakukan. Dengan adanya penyesuaian tarif layanan sebagaimana diatur dalam PMK tarif terbaru, diharapkan juga dapat berkontribusi atas peningkatan capaian realisasi penerimaan PNBP kedepannya.

Sementara itu, untuk mendukung optimalisasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, perlu dilakukan penyusunan rencana kinerja berikut rencana penyerapan anggaran. Disamping mengoptimalkan fungsi pengawasan atas pemanfaatan anggaran, pada periode akhir tahun anggaran dapat dilakukan identifikasi atas potensi sisa anggaran yang tidak terealisasi pada setiap kegiatan dan untuk berikutnya dapat dilakukan realokasi anggaran dalam rangka mendukung optimasi kinerja penyerapan anggaran.

Untuk selanjutnya, hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2023 akan digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan pada pelaksanaan program kegiatan BBSPJPI tahun berikutnya.

Semarang, Januari 2024

Kepala BBSPJPI,



Sidik Herman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi	1
1.2. Peran Strategis Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi	4
Bab II. PERENCANAAN STRATEGI DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis Organisasi	8
2.2. Rencana Kinerja	15
2.3. Rencana Anggaran	18
2.4. Dokumen Penetapan Kinerja	27
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1. Analisis Capaian Kinerja	47
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2022	62
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra (2021 – 2024	113
3.1.3. Capaian Program prioritas Nasional TA 2023.....	117
3.2. Akuntabilitas Keuangan	119
3.2.1. Realisasi Anggaran Keuangan (RM)	119
3.2.2. Realisasi Anggaran Keuangan PNB/BLU	133
3.3. Analisis Sumber Efisiensi Sumber Daya Secara Umum	142
3.4. Penghargaan yang diperoleh Satker.....	148
Bab IV. Penutup	150
4.1. Kesimpulan	150
4.2. Permasalahan dan Kendala.....	151
4.3. Saran dan Rekomendasi	152

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023 (termasuk realisasi dan pagu per indikator kinerja)
3. Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA. 2023
4. Realisasi Renstra Satker/ Unit Kerja (2021-2024)
5. Realisasi Program Prioritas Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), sesuai penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPI akan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri.
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri.
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri.
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri.
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri.
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga dan.

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.2. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong kemajuan industri nasional sebagai pilar perekonomian nasional sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 diantaranya dengan mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta industri hijau. Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan pembangunan industri untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam tiga tahapan dimana pada tahap kedua (2020-2024) pengembangan sektor industri diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Dengan adanya transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai perubahan reorganisasi Kemenperin berdasarkan Perpres 107 Tahun 2020 serta mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar di bawah koordinasi BSKJI, BBSPJPPI memiliki peranan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat Kementerian Perindustrian maupun BSKJI selaku pembina teknis dapat berjalan dan terlaksana dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan industri. Peranan yang dijalankan BBSPJPPI diantaranya melalui optimasi pemanfaatan dan penerapan teknologi sekaligus pemberian layanan jasa teknis kepada masyarakat khususnya industri utamanya terkait dengan penerapan standardisasi industri serta layanan di bidang pengendalian, penanganan dan pemantauan kualitas lingkungan industri yang mendukung pada pembangunan industri hijau.

Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan

industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Berbekal kompetensi inti di bidang pengendalian pencemaran industri, BBSPJPPI memberikan pelayanan jasa teknis yang meliputi:

- i. Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
 - Penanganan Pencemaran;
 - Pengujian Bahan dan Barang;
 - Standardisasi Pengujian Mutu Produk
- ii. Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
 - Kalibrasi Peralatan dan Mesin
- iii. Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
 - Sertifikasi Produk
 - Sertifikasi Sistem Mutu
 - Sertifikasi Industri Hijau
 - Sertifikasi Halal
- iv. Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis
- v. Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri;
 - Konsultasi Keteknikan
 - Rancang Bangun dan Rekayasa
- vi. Jasa Pelayanan Inspeksi dan Verifikasi Industri

Untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010, BBSPJPPI telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mendukung kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala setingkat Eselon II , Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha setingkat Eselon III dan kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab langsung kepada kepala balai.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sementara Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi BBSPJPI

Dalam pelaksanaannya, pembagian fungsi koordinasi dalam kelompok jabatan fungsional disusun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis BBSPJPI yang disesuaikan dan telah mengakomodir seluruh tugas dan fungsi BBSPJPI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022. Untuk mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan dari masing-masing fungsi koordinasi tersebut dibentuk kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor 990 Tahun 2023 tanggal 2 Juli 2023.

Pembagian tugas kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) meliputi :

- 1) Tim Kerja Standardisasi, Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri;
- 2) Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi;
- 3) Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi;
- 4) Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri.

Data Jabatan ASN BBSPJPI Tahun 2023 :

Berdasarkan data kepegawaian terakhir sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah pegawai PNS & PPPK di lingkungan satker BBSPJPI sebanyak 107 personil.

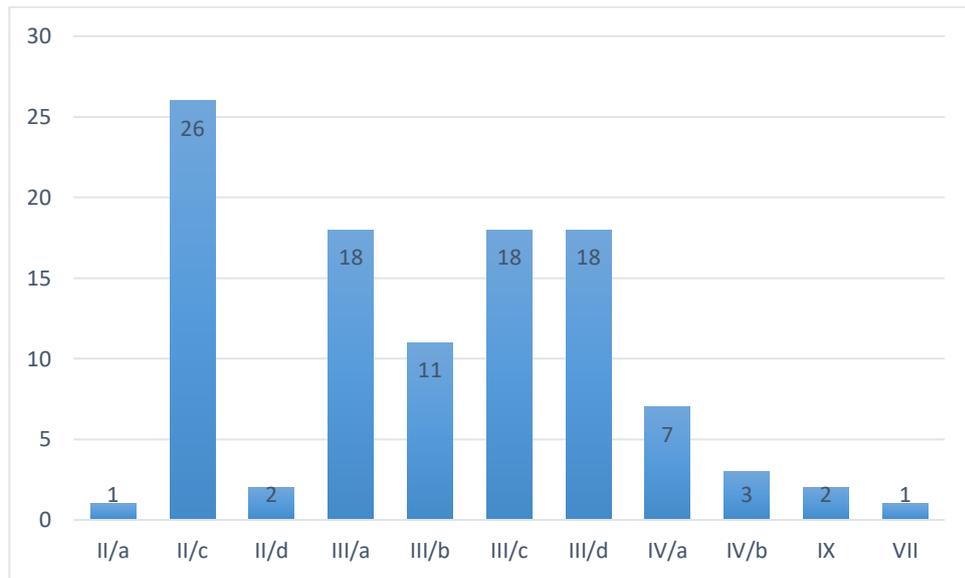
A. Komposisi personil ASN BBSPJPPI jika dirinci menurut jabatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jabatan struktural : 2 personil
- 2) Fungsional Pembina Industri : 16 personil
- 3) Fungsional Perekayasa : 7 personil
- 4) Fungsional Litkayasa : 11 personil
- 5) Fungsional Pustakawan : 2 personil
- 6) Fungsional AMMI : 7 personil
- 7) Fungsional Pengujian Mutu Barang : 28 personil
- 8) Fungsional Arsiparis : 4 personil
- 9) Fungsional Pranata Humas : 2 personil
- 10) Fungsional Analisis Anggaran : 1 personil
- 11) Fungsional Analisis Kepegawaian : 3 personil
- 12) Fungsional Pranata Kepegawaian : 1 personil
- 13) Fungsional PBJ : 1 personil
- 14) Fungsional Pranata Komputer : 1 personil
- 15) Fungsional Pranata keuangan : 2 personil
- 16) Fungsional Umum : 19 personil

B. Adapaun komposisi ASN BBSPJPPI berdasarkan golongan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan

Data Golongan dan Ruang ASN	Jumlah
II/a	1
II/c	26
II/d	2
III/a	18
III/b	11
III/c	18
III/d	18
IV/a	7
IV/b	3
IX	2
VII	1

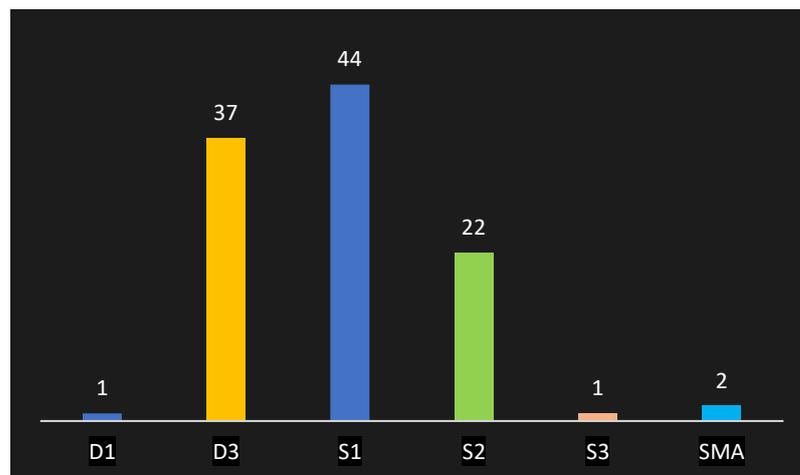


Gambar 2. Komposisi Pegawai ASN BBSPJPPI Berdasarkan Golongan

C. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. Komposisi Pegawai ASN BBSPJPPI Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai
D1	1
D3	37
S1	44
S2	22
S3	1
SMA	2



Gambar 3. Komposisi Pegawai ASN BBSPJPPI Berdasarkan Tingkat Pendidikan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam melaksanakan tupoksi maupun dalam menjalankan proses bisnis jasa layanan selalu berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran pengembangan institusi serta peningkatan kompetensi di masa mendatang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BBSPJPPI 2021-2024, **Visi** BBSPJPPI adalah ***"Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing"***. Penetapan visi tersebut ditetapkan secara selaras dengan visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi BSKJI sesuai fungsi BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI. Kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri berkelanjutan.

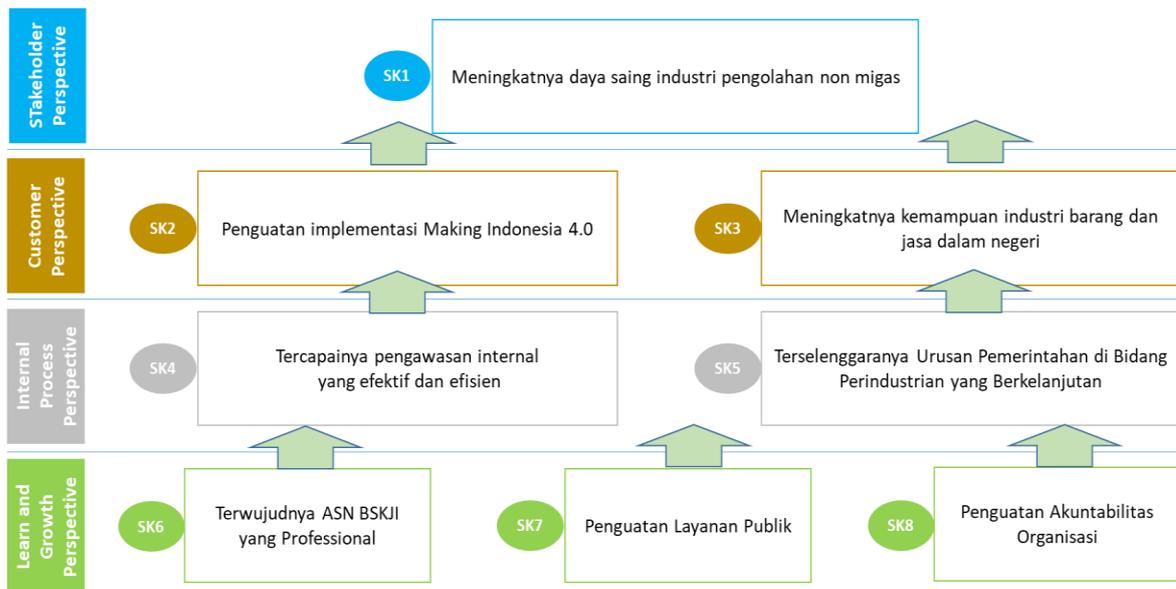
Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BBSPJPPI melaksanakan **Misi** ***"Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau"***. Berkenaan dengan misi BBSPJPPI di atas, kedepannya BBSPJPPI akan berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi industri yang mendukung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Misi yang diemban BBSPJPPI dijalankan dalam mendukung pencapaian tujuan BBSPJPPI kedepannya yang juga selaras dengan pencapaian tujuan BSKJI, diantaranya 1) Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri, 2) Meningkatkan kualitas pelayanan standardisasi dan jasa industri yang berperan pada pertumbuhan industri, 3) Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri dan 4) Meningkatkan good governance.

Dalam mewujudkan tujuan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang ingin dicapai oleh BBSPJPPI dalam rentang waktu periode 2021-2024 kedepan. Sasaran strategis ini menggambarkan cara bagaimana BBSPJPPI mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, BBSPJPPI menggunakan metode cascading dengan pendekatan Balanced Score Card (BSC) berdasarkan peta strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian maupun Unit Eselon I (BSKJI).

Sasaran strategis BBSPJPPI pada Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Perspective), Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) dan Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective), telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I (BSKJI). Hal ini dilakukan karena BBSPJPPI bukan merupakan *Strategic Business Unit* yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJPPI adalah turunan dari tingkat kementerian dan Unit Eselon I (BSKJI) sesuai dengan metode cascading pada BSC ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI.



Gambar 4. Peta strategis BBSPJPI 2021-2024

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

A. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Perspective)

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-1 (SK1):** Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Produktivitas / efisiensi Perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi.

B. Perspektif Pelanggan (Customers Perspective)

Sasaran strategis pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-2 (SK2):** Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0

- 2) Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri

2. **Sasaran Strategis ke-3 (SK3):** Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi.
- 2) Meningkatnya PNBP layanan jasa industri.
- 3) Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan
- 4) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis BBSPJPPI diharapkan dapat mendukung dan mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan BSKJI. Sehubungan dengan hal tersebut, **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan** tersebut ditetapkan sebagai **Indikator Kinerja Utama (IKU)** BBSPJPPI.

C. Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Process Perspective)

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJPPI yang menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektif stakeholders, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-4 (SK4):** Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.
2. **Sasaran Strategis ke-5 (SK5):** Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.

D. Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective)

Sasaran strategis pada perspektif pembelajaran organisasi merupakan sasaran yang ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJPPI. Capaian pada perspektif ini merupakan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BBSPJPPI. Sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-6 (SK6):** Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN.
2. **Sasaran Strategis ke-7 (SK7):** Penguatan Layanan Publik, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai minimal indeks layanan publik.
3. **Sasaran Strategis ke-8 (SK8):** Penguatan Akuntabilitas Organisasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai minimal akuntabilitas kinerja.
 - 2) Nilai minimal laporan keuangan.

Keberhasilan pencapaian tujuan strategis BBSPJPPI secara kuantitatif dapat ditunjukkan dengan tercapainya sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan visi, misi dan tujuan strategis BBSPJPPI, maka sasaran strategis yang akan dicapai BBSPJPPI dalam kurun waktu 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Target Kinerja BBSPJPPI 2021-2024

SASARAN STRATEGIS						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan daya saing industri pengolahan non migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	NA	NA	2	3
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	NA	NA	1	1
	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	3	4	5	5
3. Meningkatkan kemampuan industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	10	10	11
	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2	2	3	4
	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	NA	NA	2	3

SASARAN STRATEGIS						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024
	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	55	58	62	65
4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditundaklanjuti oleh satker	Persen	91.5	92	92.5	93
5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap jasa layanan industri	Indeks	3.60	3.62	3.63	3.65
6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	80
7. Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	4,20	4,30	4,35	4,40
8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,5	81	77	80
	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	91	92	93

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja BBSPJPPI 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BBSPJPPI yang merupakan perencanaan jangka menengah. Di dalam Renkin ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Oleh karenanya, kegiatan yang akan dilaksanakan di BBSPJPPI pada Tahun Anggaran 2023 mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra BBSPJPPI 2021-2024. Pelaksanaan kinerja pada setiap tahun anggaran akan berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga pada akhirnya tujuan utama Renstra dan visi organisasi dapat diraih.

Rencana program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 disebut sebagai Rencana Kinerja (Renkin BBSPJPPI) Tahun 2023. Dalam rangka penguatan akuntabilitas untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian maka rencana kinerja BBSPJPPI 2023 telah disesuaikan dengan rencana kinerja Pemerintah, Kementerian Perindustrian dan BSKJI dengan indikator kinerja berorientasi pada hasil/capaian outcome.

Secara rinci, Renkin/RKT BBSPJPPI tahun 2023 disajikan dalam bentuk matriks yang menguraikan sasaran, indikator, rencana tingkat capaian, program, uraian kegiatan, indikator (masukan, keluaran dan hasil), satuan, serta rencana tingkat capaian kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Target Kinerja BBSPJPI TA 2023

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2	Persen	IKU
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1	Perusahaan	IKU
		Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	5	Perusahaan	IKU
3.	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1. Produktivitas /efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10	Persen	IKU
		2. Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	3	Persen	IKU
		3. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	2	Persen	IKU

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
		4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62	Persen	IKU
4.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5	Persen	Non IKU
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,63	Indeks	Non IKU
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	Indeks	Non IKU
7.	Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal indeks layanan publik	4,35	Indeks	Non IKU
8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77	Nilai	Non IKU
		2. Nilai minimal laporan keuangan	92	Nilai	Non IKU

2.3 RENCANA ANGGARAN

Pada tahun 2023 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

Diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

2. Program Dukungan Manajemen

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal.

Terkait dengan pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, BBSPJPPI pada 2023 memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 32.177.573.000,-. Dalam perjalanannya, seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan maupun perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran telah dilakukan beberapa kali proses revisi anggaran sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 pada 26 Desember 2022, revisi dalam rangka Pemenuhan Automatic Adjusment Belanja BBSPJPPI Tahun Anggaran 2023. Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala BSKJI Nomor 684/BSKJI/PR/XIII/2023 tanggal 21 Desember 2023 telah dilakukan pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) pada sumber anggaran Rupiah Murni dalam DIPA TA 2023 sebagaimana ditetapkan melalui Nota Dinas Kepala BSKJI sebesar Rp. 1.448.702.000,-

Revisi dalam rangka pemenuhan nilai *Automatic Adjustment* dilakukan dengan mencantumkan beberapa pos anggaran sumber dana Rupiah Murni (RM) dalam catatan halaman IV DIPA (blokir) diantaranya dari RO 6042.EBA.994 Layanan

Perkantoran pada pos anggaran belanja gaji dan tunjangan (gaji dan tunjangan ke-14 serta tunjangan bulan Desember) dengan total nilai sebesar Rp. 1.448.702.000,- tanpa merubah pagu anggaran.

- b. Revisi ke-2 pada 27 Januari 2023, revisi pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tanpa merubah pagu.
- c. Revisi ke-3 pada 21 Februari 2023, dengan pertimbangan revisi adalah revisi realokasi anggaran kegiatan DAPATI 2023. Pagu anggaran BBSPJPPI TA 2023 mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 192.513.000,- yang berasal dari realokasi anggaran kegiatan DAPATI TA 2023 dari DIPA Pusat OPTIKJI ke dalam DIPA BBSPJPPI, sehingga pagu anggaran BBSPJPPI mengalami penyesuaian berupa penambahan pagu anggaran dari semula Rp. 32.177.573.000,- menjadi Rp. 32.370.086.000,-
- d. Revisi ke-4 pada 18 April 2023, revisi administrasi terkait perubahan rencana penarikan dana halaman IIII DIPA tanpa merubah pagu anggaran.
- e. Revisi ke-5 pada 28 April 2023 terkait pencantuman saldo awal kas BLU tanpa merubah pagu anggaran.
- f. Revisi ke-6 pada 17 Mei 2023 terkait realokasi anggaran tanpa merubah pagu anggaran. Pada usulan revisi realokasi dilakukan pergeseran antar KRO dan antar jenis belanja untuk mendukung kegiatan dan operasional layanan.
- g. Revisi ke-7 pada 6 Juli 2023 terkait pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan tanpa merubah pagu kegiatan.
- h. Revisi ke-8 pada 7 Juli 2023, revisi administrasi terkait perubahan rencana penarikan dana halaman IIII DIPA tanpa merubah pagu anggaran.
- i. Revisi ke -9 pada 25 Juli 2023 , revisi terkait realokasi anggaran Blokir Automatic Adjustment sehingga pagu anggaran BBSPJPPI mengalami penyesuaian berupa pengurangan pagu anggaran dari semula Rp. 32.370.086.000,- menjadi Rp. 30.921.384.000,-
- j. Revisi ke-10 pada 4 September 2023 , revisi terkait pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tanpa merubah pagu anggaran.

- k. Revisi ke-11 pada 7 September 2023 , terkait realokasi anggaran tanpa merubah pagu anggaran. Pada usulan revisi realokasi dilakukan pergeseran antar KRO dan antar jenis belanja untuk mendukung kegiatan dan operasional layanan.
- l. Revisi ke-12 pada 8 November 2023, revisi DJA terkait realokasi anggaran antar program dengan merubah pagu anggaran. Dimana pagu anggaran dari semula Rp. 30.921.384.000,- menjadi Rp. 30.975.384.000,-.
- m. Revisi ke-13 pada 21 November 2023 , revisi realokasi anggaran antar KRO dalam 1 program tanpa merubah pagu anggaran.
- n. Revisi ke-14 pada 30 November 2023 , revisi terkait pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tanpa merubah pagu anggaran.
- o. Revisi ke-15 pada 11 Desember 2023 , revisi terkait pemenuhan kekurangan belanja pegawai pada satker BBSPJPPI yang dipenuhi melalui alokasi oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) melalui mekanisme SP-SABA. Dimana pagu anggaran dari semula Rp. 30.975.384.000,- menjadi Rp. 32.411.625.000,-.
- p. Revisi ke-16 pada 22 Desember 2023 , revisi terkait pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tanpa merubah pagu anggaran. Dimana anggaran di akhir tahun 2023 sebesar Rp. 32.411.625.000,-

Tabel 5.Pagu Anggaran Program BBSPJPPI TA 2023

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan I	Pagu Anggaran Triwulan II	Pagu Anggaran Triwulan III	Pagu Anggaran Triwulan IV
Anggaran BBSPJPPI	32.370.086.000	32.370.086.000	30.921.384.000	32.411.625.000
Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri	11.135.483.000	11.135.483.000	11.135.483.000	9.770.125.000
Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	11.135.483.000	11.135.483.000	11.135.483.000	9.770.125.000
KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi	255.070.000	255.070.000	405.070.000	405.070.000

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan I	Pagu Anggaran Triwulan II	Pagu Anggaran Triwulan III	Pagu Anggaran Triwulan IV
KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri	7.333.900.000	7.287.100.000	7.590.015.000	7.713.637.000
KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.354.000.000	3.400.800.000	2.947.885.000	1.458.905.000
KRO 4 : Fasilitasi dan Pembinaan Industri	192.513.000	192.513.000	192.513.000	192.513.000
Program Dukungan Manajemen	21.234.603.000	21.234.603.000	19.785.901.000	22.641.500.000
Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	21.234.603.000	21.234.603.000	19.785.901.000	22.641.500.000
KRO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.270.143.000	20.270.143.000	18.821.441.000	20.235.432.000
KRO 2 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal	170.165.000	170.165.000	170.165.000	1.111.773.000
KRO 3 : Layanan Manajemen SDM Internal	583.510.000	583.510.000	583.510.000	1.083.510.000
KRO 4 : Layanan Manajemen Kinerja Internal	210.785.000	210.785.000	210.785.000	210.785.000

Berdasarkan persetujuan dan pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 tersebut, maka Program/Kegiatan berikut besaran pagu anggaran BBSPJPPI Tahun Anggaran 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel. 6 berikut :

Tabel 6. Program/Kegiatan BBSPJPPI TA 2023

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan III	Pagu Anggaran Triwulan IV		
	Total	Total	Blokir	Efektif
Anggaran BBSPJPPI	30.921.384.000	32.411.625.000	-	32.411.625.000
Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri	11.135.483.000	9.770.125.000	-	9.770.125.000
1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	11.135.483.000	9.770.125.000	-	9.770.125.000
KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi	405.070.000	405.070.000	-	405.070.000
KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri	7.590.015.000	7.713.637.000	-	7.713.637.000
KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	2.947.885.000	1.458.905.000	-	1.458.905.000
KRO 4 : Fasilitasi dan Pembinaan Industri	192.513.000	192.513.000	-	192.513.000
Program Dukungan Manajemen	19.785.901.000	22.641.500.000	-	22.641.500.000
2.Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi	19.785.901.000	22.641.500.000	-	22.641.500.000

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan III	Pagu Anggaran Triwulan IV		
		Total	Blokir	Efektif
dan Pelayanan Jasa Industri				
Kegiatan 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal	18.821.441.000	20.235.432.000	-	20.235.432.000
Kegiatan 2 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal	170.165.000	1.111.773.000	-	1.111.773.000
Kegiatan 3 : Layanan Manajemen SDM Internal	583.510.000	1.083.510.000	-	1.083.510.000
Kegiatan 4 : Layanan Manajemen Kinerja Internal	210.785.000	210.785.000	-	210.785.000

Secara rinci rencana anggaran BBSPJPI Tahun 2023 sesuai DIPA revisi ke-16 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rencana Anggaran Tahun 2023

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SD/CP
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	9.770.125.000		
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	405.070.000		
013	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	405.070.000		
051	Pemasaran, Promosi, Publikasi dan Pembinaan Hubungan Pelanggan Layanan Teknis		405.070.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SD/CP
6077.BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri	7.713.637.000		
002	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	6.431.397.000		
051	<i>Jasa Pelayanan Teknis Pengujian</i>		<i>6.431.397.000</i>	
A	Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian		2.193.218.000	BLU
B	Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran		3.259.757.000	BLU
C	Layanan Pengujian Aneka Komoditi		978.422.000	BLU
022	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	16.920.000		
051	<i>Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi</i>		<i>16.920.000</i>	BLU
034	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	746.190.000		
051	<i>Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi</i>		<i>746.190.000</i>	
A	Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Lembaga Sertifikasi		163.630.000	BLU
B	Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu		37.600.000	BLU
C	Layanan Sertifikasi Produk		464.760.000	BLU
D	Layanan Sertifikasi Industri Hijau		37.000.000	BLU
E	Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan		28.400.000	BLU
F	Layanan Sertifikasi Halal		14.800.000	BLU
055	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Pencegahan Pencemaran Industri	129.280.000		
051	<i>Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>		<i>129.280.000</i>	BLU
056	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	1.750.000		
051	<i>Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri</i>		<i>1.750.000</i>	
A	Layanan Audit Energi/ Audit Air/ Audit Lingkungan		1.750.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SD/CP
057	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pencegahan Pencemaran Industri	388.100.000		
051	<i>Layanan Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri</i>		388.100.000	BLU
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1.458.905.000		
013	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	1.458.905.000		
051	<i>Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan</i>		1.458.905.000	BLU
6077.QDI	Fasilitas dan Pembinaan Industri	192.513.000		
053	Jasa Konsultasi Program Dapati		192.513.000	
A	Jasa Konsultasi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol		100.470.000	RM
B	Konsultasi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium dan Garam Aneka Industri		92.043.000	RM
WA	Program Dukungan Manajemen			
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri	22.641.500.000		
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.235.432.000		
958	Layanan Hubungan Masyarakat	430.270.000		
051	<i>Pengelolaan Data dan Informasi</i>		381.880.000	BLU
052	<i>Pengelolaan Majalah/jurnal ilmiah dan Publikasi</i>		48.390.000	BLU
962	Layanan Umum	65.160.000		
051	<i>Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga</i>		65.160.000	BLU
994	Layanan Perkantoran	19.740.002.000		
001	<i>Gaji dan Tunjangan</i>		13.869.502.000	RM
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		13.741.569.000	
B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK		127.933.000	

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SD/CP
002	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>		<i>5.870.500.000</i>	
A	Operasional Perkantoran dan Pimpinan		3.134.709.000	BLU & RM
B	Langganan Daya Dan Jasa		698.904.000	RM
C	Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor		909.427.000	BLU & RM
D	Pemeliharaan Kendaraan Operasional		249.400.000	RM
E	Pemeliharaan Alat Laboratorium		490.000,000	BLU & RM
F	Pemeliharaan Sarana Kantor		126.010.000	BLU & RM
G	Pengadaan Bahan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh		199.800.000	BLU
H	Penyelenggaraan Poliklinik		62.250.000	BLU
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	1.111.773.000		
951	Layanan Sarana Internal	485.385.000		
052	<i>Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi</i>		<i>43.600.000</i>	BLU
053	<i>Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran</i>		<i>441.785.000</i>	RM
971	Layanan Prasarana Internal	626.388.000		
051	<i>Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan</i>		<i>626.388.000</i>	BLU
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.083.510.000		
954	Layanan Manajemen SDM	136.980.000		
051	Pengelolaan/Manajemen SDM		<i>136.980.000</i>	BLU & RM
996	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan	946.530.000		
051	<i>Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi SDM</i>		<i>946.530.000</i>	

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SD/CP
B	Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional		36.680.000	BLU
C	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis		909.850.000	BLU & RM
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	210.785.000		
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	46.000.000		
051	<i>Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran</i>		<i>46.000.000</i>	BLU & RM
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.545.000		
051	<i>Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi</i>		<i>26.545.000</i>	BLU & RM
955	Layanan Manajemen Keuangan	103.800.000		
051	<i>Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan</i>		<i>103.800.000</i>	BLU & RM
961	Layanan Reformasi Kinerja	34.440.000		
051	<i>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP</i>		<i>34.440.000</i>	BLU

2.4 DOKUMEN PENJANJIAN KINERJA

Bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, telah dilakukan penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2023 berpedoman pada Renstra BBSPJPPI 2021-2024 dengan target kinerja ditetapkan sesuai target kinerja tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja utama pada Perkin ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Renstra pada perspektif pemangku kepentingan dan perspektif

pelanggan sesuai Keputusan Kepala BBSPJPPI Nomor 6/BSKJI/BBSPJPPI/SK/I/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2021-2024.

Pada 2023, menindaklanjuti pelaksanaan review atas indikator kinerja UPT di lingkungan BSKJI telah dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan indikator dan target kinerja Perkin tahun 2023 sebagaimana berikut:

Perjanjian Kinerja BBSPJPPI sesuai hal tersebut terdiri atas 8 sasaran strategis dan 13 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan TA 2023

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2	Persen
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1	Perusahaan
		2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	5	Perusahaan
3.	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1.	Produktivitas /efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10	Persen
		2.	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	3	Persen
		3.	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	2	Persen

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
		4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62	Persen
4.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5	Persen
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industry	3,63	Indeks
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1.	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	Indeks
7.	Penguatan Layanan Publik	1.	Nilai minimal indeks layanan public	4,35	Indeks
8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77	Nilai
		2.	Nilai minimal laporan keuangan	92	Nilai

Tabel 9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBSPJPI TA 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	1. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2 Persen	20%	1] Penyusunan rencana kolaborasi dengan industri dan Perguruan Tinggi 2] Pembentukan Tim kerjasama kolaborasi 3] Penyusunan proposal rencana kolaborasi dan koordinasi peninjauan kerjasama kolaborasi	40%	1] Penyusunan MOU kerjasama kolaborasi 2] Koordinasi awal pelaksanaan kerjasama kolaborasi 3] Supervisi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama kolaborasi 4] Monev progres pelaksanaan kerjasama kolaborasi	70%	1] Supervisi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama kolaborasi 2] Monev progres pelaksanaan kerjasama kolaborasi	100%	1] Supervisi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama kolaborasi 2] Monev progres pelaksanaan kerjasama kolaborasi 3] Pengukuran dan evaluasi capaian produktivitas/ efisiensi kegiatan kerjasama kolaborasi 4] Penyusunan pelaporan capaian	Ketua Tim Kerja Optimalisasi Teknologi (Any Kurnia), Ketua Kelompok Kerja Optimasi Teknologi Industri dan Industri 4.0 (Januar F)	Desember 2023

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 TAHUN ANGGARAN 2023
 BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											kerjasama kolaborasi		

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan	25%	1. Penyusunan program kegiatan fasilitasi 4.0 kerjasama dengan PT AKA (Autektik Karya Analitika). 2. Pembentukan tim kerja kegiatan fasilitasi 4.0.	50%	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi berupa pendampingan dalam promosi alat pengujian udara ambien kepada calon pelanggan	75%	1. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi berupa pendampingan dalam promosi alat pengujian udara ambien kepada calon pelanggan. 2. Pelaksanaan fasilitasi industri 4.0 berupa pengadaan bahan baku komponen alat uji udara ambien	100%	1. Pelaksanaan pelatihan industri 4.0. 2. Pendampingan dalam proses perakitan alat uji udara ambien serta kalibrasi alat	Ketua Kelompok Kerja Optimasi Teknologi Industri dan Industri 4.0 (Januar AF)	Desember 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	5 Perusahaan	25%	Implementasi Standart Industri (standart mutu, standart produk, standart proses, standart berkelanjutan) 1] Promosi dan penyampaian penawaran layanan pelatihan/pendampingan penerapan standar industri 2] Penyusunan silabus dan penunjukan instruktur 3] Pelaksanaan pelatihan/ pendampingan penerapan standar industri	50%	1] Promosi dan penyampaian penawaran layanan pelatihan/pendampingan penerapan standar industri 2] Penyusunan silabus dan penunjukan instruktur 3] Pelaksanaan pelatihan/ pendampingan penerapan standar industri	75%	1] Promosi dan penyampaian penawaran layanan pelatihan/pendampingan penerapan standar industri 2] Penyusunan silabus dan penunjukan instruktur 3] Pelaksanaan pelatihan/ pendampingan penerapan standar industri	100%	1] Promosi dan penyampaian penawaran pelatihan/pendampingan penerapan standar industri 2] Penyusunan silabus dan penunjukan instruktur 3] Pelaksanaan pelatihan/ pendampingan penerapan SI	Ketua Kelompok Kerja Konsultansi dan Bimbingan Teknis (Novarina IH), Ketua Kelompok Kerja Kerjasama (Rini Rarasati)	Desember 2023

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Meningkatnya Kemampuan Industri barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10 Persen	25%	1] Identifikasi lapangan dalam rangka koordinasi awal Tim DAPATI dengan IKM terpilih 2] Penyusunan rencana kerja pelaksanaan DAPATI 3] Persiapan dan pengadaan bahan/peralatan pendukung 4] Persiapan penyusunan laporan pendahuluan	50%	1] Pelaksanaan supervisi lapangan ke lokasi IKM terpilih 2] Pelaksanaan uji coba dan penentuan design operasi 3] Koordinasi internal Tim DAPATI 4] Penyusunan dan penyampaian laporan pendahuluan DAPATI 5] Penyiapan materi monev kegiatan DAPATI Pusat OPTIKJI BSKJI	75%	1] Pelaksanaan supervisi lapangan ke lokasi IKM terpilih 2] Pelaksanaan uji coba dan pencarian kondisi optimum 3] Koordinasi internal Tim DAPATI 4] Penyusunan dan penyampaian laporan kemajuan DAPATI 5] Penyiapan materi monev kegiatan DAPATI Pusat OPTIKJI BSKJI	100%	1] Pelaksanaan supervisi lapangan ke lokasi IKM terpilih 2] Pelaksanaan uji coba dan pencarian kondisi optimum 3] Koordinasi internal Tim DAPATI 4] Pengukuran dan evaluasi capaian produktivitas/efisiensi kegiatan DAPATI 5] Penyusunan dan penyampaian laporan akhir DAPATI 6] Penyiapan materi	Ketua Tim DAPATI 2023 a) Jasa Konsultasi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol (Januar Arif); b) Konsultasi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium	Desember 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											monev kegiatan DAPATI Pusat OPTIKJI BSKJI	dan Garam Aneka Industri (Nasuka)	
		2.Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	3 Persen	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan	75%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan	100%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan	Ketua Kelompok Kerja Pemasaran (Dyah AF)	Desember 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					pelanggan kepada BBSPJPPI		kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Partisipasi pada kegiatan pameran		kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Partisipasi pada kegiatan pameran		kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Partisipasi pada kegiatan pameran		
	3.Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	2 Persen	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin	75%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin	100%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin	Ketua Kelompok Kerja Pemasaran (Dyah AF)	Desember 2023	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline	
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI		komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Partisipasi pada kegiatan pameran		komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Partisipasi pada kegiatan pameran		komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Partisipasi pada kegiatan pameran			
		4.Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62 Persen	30%	1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2] Pengisian aplikasi P3DN 3] Pengajuan persetujuan tertulis	50%	1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan	75%	1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan	100 %	1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan	Kabag TU , Kelompok Kerja Umum (Sanyoto) .	Desember 2023	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					<p>kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%</p> <p>4] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan</p> <p>5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada</p>	<p>2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN</p> <p>3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN</p>	<p>2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN</p> <p>3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN</p>	<p>2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN</p> <p>3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN</p>					

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					aplikasi e-Mon APBN 6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN								
4	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5 Persen	15%	1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	40%	1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	85%	1] Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja 2] Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen 3] Penyusunan dan penyampaian	100%	1] Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)	Desember 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan 4] Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan 5] Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan				
5	Terselenggaranya Urusannya Pemerintahan	Indeks kepuasan Masyarakat	3,63 Indeks	25%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu	50%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu	75%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu	100%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu	Ketua Kelompok Kerja	Desember 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan				2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK)	2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) 6] Pelaksanaan Temu Pelanggan untuk memperoleh umpan balik pelanggan	2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK)	2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK)		2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) 6] Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan	Kerjasama (Rini R)		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78 Indeks	25%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM	50%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan	75%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan	100%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan	Ketua Kelompok Kerja Kepegawaian (Agung B)	Desember 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							peningkatan kompetensi SDM		peningkatan kompetensi SDM		peningkatan kompetensi SDM		
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal indeks layanan publik	4,35	30%	1] Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDIII, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik) 2] Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDIII. 3] Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala. 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara	50%	1] Pengembangan/pemutakhiran SINDIII. 2] Update website secara berkala 3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5] Penyediaan informasi layanan	75%	1] Pengembangan/pemutakhiran SINDIII. 2] Update website secara berkala 3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5] Penyediaan informasi layanan	100%	1] Update website secara berkala 2] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 3] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 4] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF) Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Surya)	Desember 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan 5] Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6] Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin 7] Peningkatan kompetensi SDM pengampu layanan publik (bimtek/study banding)		publik yang tersaji pada desk layanan publik 6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS		publik yang tersaji pada desk layanan publik 6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS		5] Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan		

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77	30%	1] Penyusunan dokumen Tapkin 2] Penyusunan dokumen Renkin 3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021	60%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) 2] Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itjen 3] Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	80%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III) 2] Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	100%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh Aryo W)	Desember 2023
		2.Nilai minimal laporan keuangan	92	35%	1] Penyusunan laporan keuangan unaudited untuk pelaporan	60%	1] Pelaksanaan penilaian laporan keuangan audited	80%	1] Penyusunan laporan keuangan	100%	1] Penyusunan laporan keuangan Semester II periode	Ketua Kelompok Kerja	Desember 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					keuangan periode tahun sebelumnya 2] Koordinasi penyusunan laporan keuangan unaudited dengan bagian keuangan Ses BSKJI 3] Review laporan keuangan oleh Itjen 4] Pelaksanaan audit laporan keuangan unaudited oleh KAP		periode tahun sebelumnya oleh Biro Keuangan 2] Penyusunan laporan keuangan Semester I periode tahun berjalan 3] Koordinasi penyusunan laporan keuangan Semester I periode tahun berjalan dengan bagian keuangan Ses BSKJI 4] Review laporan keuangan oleh Itjen		Triwulan III periode tahun berjalan		tahun berjalan 2] Koordinasi penyusunan laporan keuangan Semester II periode tahun berjalan dengan bagian keuangan Ses BSKJI 3] Review laporan keuangan oleh Itjen 4] Pelaksanaan audit PIPK dalam rangka pelaporan keuangan tahun berjalan	Keuangan (Krus H)	

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu rencana kinerja yang telah ditetapkan. Pada bab ini, menjelaskan target dan realisasi dari Perjanjian Kinerja TA. 2023 dan capaian dari kegiatan lainnya yang dianggap penting untuk menginformasikan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selain itu, juga memaparkan Capaian Kinerja Satker Berdasarkan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024. Uraian di bawah merupakan realisasi kinerja BBSPJPPI pada tahun 2023 yang disajikan berdasarkan sumber dana dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam mencapai visi dan misinya, BBSPJPPI melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BSKJI dan Renstra BBSPJPPI dengan target kinerja pada setiap awal tahun anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023, BBSPJPPI melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri dan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri guna mendukung perwujudan 8 (delapan) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan BSKJI yang meliputi :

- 1 Sasaran Strategis I : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
- 2 Sasaran Strategis II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
- 3 Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
- 4 Sasaran Strategis IV :Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
- 5 Sasaran Strategis V :Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

- 6 Sasaran Strategis VI : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional
- 7 Sasaran Strategis VII : Penguatan Layanan Publik
- 8 Sasaran Strategis VIII : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Sasaran strategis BBSPJPPI telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I (BSKJI) dimana seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJPPI adalah turunan dari tingkat kementerian dan Unit Eselon I (BSKJI). Hal ini dapat terlihat sesuai pemetaan sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan pemetaan/matriks alur sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 10. Matriks Alur IKU Kemenperin, BSKJI Sampai Perjanjian Kinerja Balai
TA.2023**

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
SS 1.	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SP 1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SK 1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas /efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
SS 2.1	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) >3.0	SP 2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Persentase jumlah perusahaan yang Produktivitas /efisiensinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0	SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0
								Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI**

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
								fasilitasi industri 4.0
								Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri
								Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri
SS 3.1	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri	Jumlah SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	SP 3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	SK 3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas /efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
					Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi			Meningkatnya PNBP layanan jasa industri
		Produktivitas /efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi			Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas /efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi			Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker
	-	NON IKU			NON IKU	-		NON IKU
SS 7	Tersedianya regulasi pembangunan Industri yang efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	SP 4.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektifitas regulasi standardisasi industri			
SS 8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdayasaing dan Berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SP 5.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SK 5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri			
SS 9	Tercapainya pengawasan internal yang	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SP 6.	Tercapainya Pengawasan Internal yang	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah	SK 4	Tercapainya Pengawasan Internal yang	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI**

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	efektif dan efisien			Efektif dan Efisien	ditindaklanjuti oleh satker		Efektif dan Efisien	
		Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian			Indeks Penerapan Manajemen Risiko BSKJI			
SS 10	Terwujudnya ASN yang Profesional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	SP 7.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	SK 6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
SS 11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan	SP 8.	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang terpadu dan terintegrasi	SK 7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik
					Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B			
					Indeks manfaat kerja sama			
SS 12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	SP 9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai laporan keuangan BSKJI	SK 8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal laporan keuangan

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Layanan Prima							
SS 13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	SP 9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	SK 8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Seperti yang telah diungkapkan dalam Bab II, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui laporan triwulan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi fisik dari capaian atas Rencana Aksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA. 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2 Persen						

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
		Jasa Konsultasi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol		80 %	4000 %	100	100	Finalisasi dan operasional kontrol ruang pengeringan, serta penyusunan laporan akhir kegiatan.	B10 : Finalisasi konstruksi ruang pengeringan dan penyusunan draft laporan akhir. B11 : Uji operasional ruang pengeringan terkontrol dan presentasi laporan akhir. B12 : Operasional dan evaluasi ruang pengeringan terkontrol.
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan	1 Perusahaan	100%	100	100	Pelaksanaan pelatihan untuk industri terkait fasilitas industri 4.0	B10 : Perencanaan pelatihan B11 : Pelaksanaan pelatihan produksi AiMS B12 : SPJ dan laporan akhir.
		2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	5 Perusahaan	6 Perusahaan	120%	100	100		
		1. Kerjasama penyusunan dokumen persetujuan teknis dengan PT Desa Wisata Indonesia			100%	100	100	Telah dilaksanakan serah terima pekerjaan kerjasama penyusunan dokumen persetujuan teknis yang telah selesai sesuai BAST nomor 111/BSKJI/BBSPJPPI/KU/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.	
		2. Kerjasama Penyusunan Dokumen Persetujuan Teknis dengan PT Citra Warna Abadi			100%	100	100	Kerjasama Penyusunan Dokumen Persetujuan Teknis sesuai SPK Nomor 496/BSKJI/BBSPJPPI/HK-SPK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
		3. Kerjasama konsultasi penyusunan dokumen lingkungan dengan PT Ramai Santoso Sejahtera			100%	100	100	Sudah dilaksanakan Kerjasama konsultasi penyusunan dokumen lingkungan sesuai SPK Nomor B/440/BSKJI/BBSPJPI/SPK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.	
		4. Pelatihan penyusunan dokumen industri hijau dengan PT. Anugerah Pupuk Makmur.			100 %	100	100	Sudah dilaksanakan pelatihan penyusunan dokumen industri hijau sesuai penawaran B/1070/BSKJI/BBSPJPI/MS/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023. Pelaksanaan pada 16-19 Oktober 2023,	
		5. Pelatihan penerapan dokumen ISO/IEC 17025:2017 dan audit internal dengan BP Batam			100 %	100	100	Sudah dilaksanakan pelatihan dan pemahaman ISO 17025:2017 sesuai penawaran B/1162/BSKJI/BBSPJPI/MS/IX/2023 tertanggal 11 September 2023. Dimana pelaksanaannya 2-6 Oktober 2023.	
		6. Pelatihan penyusunan dokumen industri hijau dengan PT Anugerah Pupuk Lestari.			100 %	100	100	Sudah dilaksanakan pelatihan penyusunan dokumen industri hijau sesuai penawaran B/1649/BSKJI/BBSPJPI/MS/XI/2023 tertanggal 3 November 2023. Dimana pelaksanaannya 19-21 Desember 2023.	
3	Meningkatnya Kemampuan Industri barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10 Persen	51,1 %	511 %				
		A. Jasa Konsultasi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol		80 %	-	100	100	Finalisasi dan operasional kontrol ruang pengeringan,	B10 : Finalisasi konstruksi ruang pengeringan dan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								serta penyusunan laporan akhir kegiatan.	penyusunan draft laporan akhir. B11 : Uji operasional ruang pengeringan terkontrol dan presentasi laporan akhir. B12 : Operasional dan evaluasi ruang pengeringan terkontrol
		B. Konsultansi Optimalisasi proses produksi garam konsumsi beryodium dan garam aneka industri		22,2 %	-	100	100	1. Uji coba teknologi proses 2. Operasional dan pengamatan proses. 3. Uji laboratorium hasil oprasional 4. Pemasangan media isolator. 5. Operasional media isolator dan uji keputihan 6. Pengambilan video. 7. Penyusunan laporan dan presentasi.	B10 : Uji coba dan pemasangan media isolator. B11 : Menetapkan kondisi optimal dan uji derajat keputihan. B12 : Presentasi dan pembuatan video kegiatan.
		2.Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	3 Persen	9,96 Persen	332	100	100	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan	B10 : • Penerimaan PNBP BBSPJPPI Januari-Oktober 2023 : Rp 14.554.332.048,-

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Partisipasi pada kegiatan pameran	(97,68%) dari target Rp 14.900.000.000, B11 : • Penerimaan PNBP BBSPJPPI Januari- November sebesar Rp. 15.557.194.328,- (104,4 %) dari target Rp. 14.900.000.000, B12 : • Penerimaan PNBP BBSPJPPI Januari- Desember sebesar Rp. 16.283.712.001 (109,3 %) dari target Rp. 14.900.000.000
		3.Meningkatnya jumlah layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	2 Persen	2,34	117 %	100	100	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi	B10 - B12 : Jumlah layanan jasa industri Januari – Desember adalah 7991 layanan.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 TAHUN ANGGARAN 2023
 BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
 INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPPPI	
		4.Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62 Persen	94,49	152,4 %	100%	100%	1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN	Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi e-Mon B10 - B12 : proses pengadaan barang , nilai capaian 94.49 %

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								dalam aplikasi e-Mon APBN	
4	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5 Persen	100 Persen	108,1 %	100	100	1] Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan.	B10 – B11 : menyiapkan kelengkapan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan. B12 : Terbit surat Itjen terkait hasil audit BBSPJPI.
5	Terselenggaranya Urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan	Indeks kepuasan Masyarakat	3,63	3,66	100,8 %	100%	100%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK).	B10 - B12 : 1. Penyebaran kuesioner kepada pelanggan. 2. IKM sampai Desember 3,66 dengan kuesioner masuk 280 buah. 3. Indeks korupsi : 3,87.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								6] Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan	
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78 Indeks	81,70	104,7	100%	100%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar /webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM	B10 - B12 : 1. Monitoring Kesesuaian Usulan rencana Pelatihan 2023. 2. Evaluasi capaian IP-ASN per bulan 2023 3. Fasilitasi Workshop/Sosialisasi/Bimtek/Seminar/Workshop
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal indeks layanan publik	4,35	4,84	111,3	100	100	1] Update website secara berkala 2] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 3] Pemutakhiran sistem informasi	B10 : Maintenance Kabel Fiber Optik untuk Main Link Jaringan Balai. B11 : Pengembangan Platform

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 4) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 5) Self assesmen standart pelayanan public untuk mengukur capaian nilai standart layanan public yang telah dilaksanakan.	udaraku.kemenperin.go.id B12 : Maintenance Kabel dan Access Point Laboratorium Air.
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77	77,10	100,1 %	100	100	1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	Pengisian progres capaian kinerja bulanan pada aplikasi Monev kinerja (ALKI, Monev Perkin, Smart DJA, eMonev Bappenas) setiap bulan B10 : <ul style="list-style-type: none"> Pelaporan Laporan PP 39 Triwulan III. B11 - B12 : <ul style="list-style-type: none"> Pengisian progress

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
									capaian kinerja bulanan.
		2.Nilai minimal laporan keuangan	92	98	106,5 %	100%	100%	1) Penyusunan laporan keuangan Semester II periode tahun berjalan. 2) Koordinasi penyusunan laporan keuangan Semester II periode tahun berjalan dengan bagian keuangan Ses BSKJI. 3) Review laporan keuangan oleh Itjen. 4) Pelaksanaan audit PIPK dalam rangka pelaporan keuangan tahun berjalan.	Nilai Laporan Keuangan BBSPJPI Tahun 2022 adalah 98,00. B10 - B12 : <ul style="list-style-type: none"> • Pendetailan transaksi persediaan dan BMN. • Input jurnal penyesuaian transaksi • Tutup buku modul persediaan, BMN dan GLP • Rekonsiliasi SPAN dan terbit BAR Rekonsiliasi

Dari tabel di atas, semua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan per Triwulan.

Penjelasan yang lebih lengkap akan diuraikan pada capaian per indikator. Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Adapun penjelasan hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing Sasaran Strategis tersebut sebagai berikut :

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023

I. Tujuan

Misi yang diemban BBSPJPPI dijalankan dalam mendukung pencapaian tujuan BBSPJPPI kedepannya yang juga selaras dengan pencapaian tujuan BSKJI, diantaranya :

1. Meningkatnya kemampuan infrastruktur (hard and soft) penunjang pertumbuhan industri.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan standardisasi dan jasa industri yang berperan pada pertumbuhan industri.
3. Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri.
4. Meningkatkan good governance.

a. Indikator Tujuan 1 : Meningkatnya kemampuan infrastruktur (hard and soft) penunjang pertumbuhan industri.

1) Hasil yang telah dicapai

Dalam mencapai tujuan diatas , didukung oleh 2 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja. Untuk capaian setiap indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 12 : Capaian Tujuan Meningkatnya kemampuan infrastruktur
 (hard and soft) penunjang pertumbuhan industri.**

Tujuan 1	Target Tujuan 1 di Renstra		Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023		
Meningkatnya kemampuan infrastruktur (hard and soft) penunjang pertumbuhan industri	8,5 %	S	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri	-	1 Perusahaan	1 Perusahaan		
				4.0					
		K	2	Making Indonesia 4.0	2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	5 Perusahaan	5 Perusahaan	6 Perusahaan	
		S	K	3	Meningkatnya Kemampuan Industri barang dan jasa dalam negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi	18,38	10%	51,10%
						2.Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	41,37	3%	9,96%
						3.Meningkatnya jumlah layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	-	2%	2,34%
						4.Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	88,11%	62%	94,49%

Dari tabel 12, nilai rata-rata capaian indikator indikator sasaran strategis kegiatan (SK) yang termasuk pada tujuan 1 (T1) adalah 18,68% (9,96 % + 2,34 % + 6,38 %) . Dimana memenuhi target dalam Renstra 8,5 %.

2) Analisis hasil yang telah dicapai

Analisis penyebab keberhasilan :

Keberhasilan dari tujuan meningkatnya kemampuan infrastruktur (hard and soft) penunjang pertumbuhan industri , tidak lepas dari dukungan Kementerian Perindustrian terkait kebijakan pengadaan barang jasa dan anggaran terkait jasa konsultansi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri) serta dukungan terkait industry 4.0 dan juga komitmen seluruh elemen BBSPJPI dalam mencapai target.

3) Kendala

Tidak ada kendala

4) Tindak Lanjut

Perbaikan kinerja strategis yang dilakukan pada TA 2024 agar tercapai tujuan pada periode akhir Renstra TA 2024 adalah komitmen tim kerja dalam memenuhi indikator kinerja yang menjadi target serta monitoring capaian dari puncak manajemen sehingga progress sesuai target pada rencana aksi.

b. Indikator Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan standardisasi dan jasa industri yang berperan pada pertumbuhan industry

1. Hasil yang telah dicapai

Dalam mencapai tujuan meningkatnya kualitas pelayanan standardisasi dan jasa industri yang berperan pada pertumbuhan industri didukung 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja. Untuk capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 13 Capaian Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan
 standardisasi dan jasa industri yang berperan pada
 pertumbuhan industri**

Tujuan 2	Target Tujuan 2 dalam Renstra		Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian dari skala maksimal	Nilai rata-rata % Capaian dari skala maksimal
Meningkatnya kualitas pelayanan standardisasi dan jasa industri yang berperan pada pertumbuhan industri	88,87 %	SK 5	Terselenggara	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,63	3,66	91,5 % (3,66 / 4)	94,15
			Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal indeks layanan publik	4,35	4,84	96,8 % (4,84 / 5)	

Capaian tujuan meningkatnya kualitas pelayanan standardisasi dan jasa industri yang berperan pada pertumbuhan industri dihitung berdasarkan rata-rata % capaian indikator kinerja dari skala maksimal. Realisasinya 94,15 % memenuhi target Renstra 88,87%.

2. Analisis hasil yang telah dicapai

Analisis penyebab keberhasilan :

Komitmen dari BBSPJPPI untuk selalu mengedepankan pelayanan prima kepada pelanggan. Disamping itu masukan ataupun umpan balik yang diperoleh dari pengisian kuesioner kepuasan pelanggan telah dimanfaatkan sebagai masukan/saran untuk perbaikan layanan BBSPJPPI kedepannya.

Peningkatan kualitas BBSPJPI baik dari sisi sarana prasarana, pelayanan maupun layanan dari aspek administrasi yang lebih memudahkan pelanggan.

3. Kendala

Salah satu upaya dalam meningkatkan layanan adalah meningkatkan sistem informasi melalui SINDIi, tetapi dalam pengaplikasiannya masih bergantung pada pihak ketiga.

4. Tindak Lanjut

Perbaikan kinerja strategis yang dilakukan pada TA 2024 agar tercapai tujuan pada periode akhir Renstra TA 2024 adalah selalu meningkatkan layanan kepada pelanggan. Mengoptimalkan fungsi SINDIi sebagai jembatan informasi satu pintu ke pelanggan.

c. Indikator Tujuan 3 : Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri.

1. Hasil yang telah dicapai.

Dalam mencapai tujuan meningkatnya kolaborasi penunjang pertumbuhan industri didukung 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja. Untuk capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 14 Capaian Tujuan Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri.

Tujuan 3	Target Tujuan 3		Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri.	2 %	SK 1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2%	80%

Perhitungan capaian tujuan 3 meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri diukur berdasarkan persentase pelaksanaan aktivitas standardisasi dan pelayanan jasa industri (terutama pada kegiatan jasa konsultasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri) yang dilakukan secara kolaborasi. Realisasi dari perhitungan adalah 80 %, dimana telah memenuhi target.

2. Analisis hasil yang telah dicapai

Analisis penyebab keberhasilan :

Inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI berupa AiMS (*Adaptive Monitoring System*) yang digunakan pada proses sistem pengeringan terkontrol di PT Retota Sakti merupakan solusi tepat dalam memecahkan masalah dalam menghasilkan tenun serat alam dengan kualitas baik, dimana salah satu faktor yang berpengaruh dalam menghasilkan tenun yang berkualitas terdapat pada sistem pengeringannya.

Didukung SDM yang professional dan teknologi yang inovatif sehingga membuat industri percaya akan berkolaborasi dengan BBSPJPPI.

3. Kendala

Tidak ada kendala.

4. Tindak Lanjut

Perbaikan kinerja strategis yang dilakukan pada TA 2024 agar tercapai tujuan pada periode akhir Renstra TA 2024 adalah peningkatan jejaring (*networking*) dengan lembaga/institusi lain sehingga dapat turut mendorong proses transfer informasi dan pengetahuan di bidang pengendalian dan penanganan pencemaran lingkungan. Dengan adanya jejaring juga akan membuka peluang terjadinya kolaborasi/sinergi kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi serumpun maupun dalam

rangka saling melengkapi kompetensi masing-masing sehingga akan mendukung pencapaian kinerja kedua belah pihak serta kendala keterbatasan (dana, peralatan, kompetensi SDM) dapat teratasi.

d. Indikator Tujuan 4: Meningkatkan good governance.

1. Hasil yang telah dicapai

Dalam mencapai tujuan meningkatnya good governance didukung 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja. Untuk capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 15. Capaian Tujuan Meningkatkan good governance

Tujuan 1	Target Tujuan 4		Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Rata-Rata % Realisasi	
Meningkatnya kualitas pelayanan standardisasi dan jasa industri yang berperan pada pertumbuhan industri	84,8	SK 4	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,50%	100%	89,2	
			SK 6	Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78		81,7
			SK 8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.Nilai minimal akuntablitas kinerja	77		77,1
					2.Nilai minimal laporan keuangan	92		98

Dari tabel 15 , untuk tujuan meningkatkan good governance rata-rata indikator kinerja memenuhi target tujuan 4.

2. Analisis hasil yang telah dicapai

Analisis capaian keberhasilan

Dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimulai dari intern instansi terlebih dahulu. Dimana komitmen manajemen puncak yang baik dan semua tim kerja sudah melakukan SOP disertai dokumentasi dan pengarsipan dengan baik.

3. Kendala

Tidak ada kendala.

4. Tindak Lanjut

Perbaiki kinerja strategis yang dilakukan pada TA 2024 agar tercapai tujuan pada periode akhir Renstra TA 2024 adalah Komitmen pimpinan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk mendukung peningkatan kinerja satker.

II. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas

a) Indikator Kinerja : Produktivitas / efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi.

Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih dimana salah satu pihaknya adalah UPT balai dimana kegiatan kolaborasi yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industri, dimana kegiatan dapat berbentuk problem solving industri, bimbingan/pendampingan teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur outcomenya berupa peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum kegiatan

kolaborasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah kegiatan kolaborasi (B).

$$Produktivitas = \frac{B-A}{A} \times 100\% ; \text{ atau}$$

$$Efisiensi = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

a. Hasil yang telah dicapai

Pada 2023, telah dilakukan kegiatan kolaborasi pengembangan industri berupa kegiatan Jasa Konsultansi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol pada PT. Retota Sakti dimana pada pelaksanaannya melibatkan 3 (tiga) pihak yakni BBSPJPPI , PT. Retota Sakti dari pihak industri dan ITB dari pihak Akademisi. Dalam hal ini teknologi yang digunakan berasal dari BBSPJPPI (AIMS) dengan menggandeng industri sebagai partner penerapan aplikasi alat tersebut serta pihak dari ITB terkait pendampingan untuk proses produksi serat alam yang baik dan berkualitas

Kerjasama BBSPJPPI dengan PT retota Sakti terkait Jasa Konsultasi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol pada IKM Tenun Serat Alam tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 75/BSKJI/BBSPJPPI/HK-SPK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023.



Gambar 5. Kegiatan Kolaborasi di PT. Retota Sakti

b. Analisis hasil yang telah dicapai

Dari indikator kinerja produktifitas / efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi, target dari indikator ini 2%, dimana realisasi 80%.

Tabel 16. Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Produktivitas / efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2 %	80 %	4.000

Perhitungan capaian produktivitas/efisiensi perusahaan didasarkan pada peningkatan efisiensi biaya energi dan bahan bakar untuk proses pengeringan bahan serat alam (sebelumnya Rp. 400rb menjadi Rp. 80rb)

Tabel 17. Perbandingan Performasi Sebelum dan Sesudah Konsultasi

No	Nama Perusahaan	Jasa Konsultasi yang diberikan	Performansi sebelum	Performansi sesudah	Perbandingan
1	PT. Retota Sakti	Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol	Biaya Energi dan bahan bakar Rp. 400.000,-	Biaya Energi dan bahan bakar Rp. 80.000,-	80 Persen

Analisis Penyebab Keberhasilan :

Indikator kinerja produktivitas / efisiensi Perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi berhasil dilaksanakan dikarenakan inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPi berupa AiMS (*Adaptive Monitoring System*) yang digunakan pada proses sistem pengeringan terkontrol di PT Retota Sakti merupakan solusi tepat dalam memecahkan masalah dalam menghasilkan tenun serat alam dengan kualitas baik, dimana salah satu faktor yang berpengaruh dalam menghasilkan tenun yang berkualitas terdapat pada sistem pengeringannya.

Proses pengeringan merupakan proses yang penting untuk menentukan kualitas serat alam yang dihasilkan. Sehingga perlu untuk dipantau dan dijaga dalam kondisi optimum untuk menghasilkan serat kualitas terbaik (dalam hal ini terkait suhu dan kelembapan di ruangan pengeringan). Instalasi sistem monitoring dan kontrol online pada sistem pengeringan terkontrol merupakan solusi IKM dalam mempercepat proses pengeringan dan meningkatkan produktivitas dengan kualitas yang terjaga. Inovasi AiMS (Adaptive Monitoring System) terintegrasi dalam Sistem Informasi Digital sebagai teknologi Monitoring Lingkungan berbasis Daring " yang dikembangkan BBSPJPPI sendiri pada tahun 2021 terpilih sebagai salah satu dari 112 Karya Inovasi Indonesia Paling Prospektif-2020 dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Produktivitas / Efisiensi Perusahaan industri Hasil Kegiatan Kolaborasi dalam Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		2023	
			T	R	T	R	T	R
Meningkatnya daya saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas / efisiensi Perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	-	-	-	-	2%	80%

Indikator dan target kinerja terkait Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi baru ditetapkan mulai periode kinerja tahun 2023 menyesuaikan dengan perubahan

Renstra BSKJI. Pada Tahun 2023, target dari indikator ini 2% dengan capaian 80%.

c. Kendala

Tidak ada kendala pada pencapaian target.

d. Tindak Lanjut

Perlu dilakukan monitoring pasca pelaksanaan kegiatan agar apabila terdapat kendala tetap dapat dilakukan supervisi sehingga manfaat pelaksanaan kegiatan kolaborasi tetap dapat berdampak pada peningkatan efisiensi perusahaan.

III. Sasaran Strategis II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 .

Sasaran strategis II mempunyai 2 Indikator Kinerja yaitu :

a) Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0

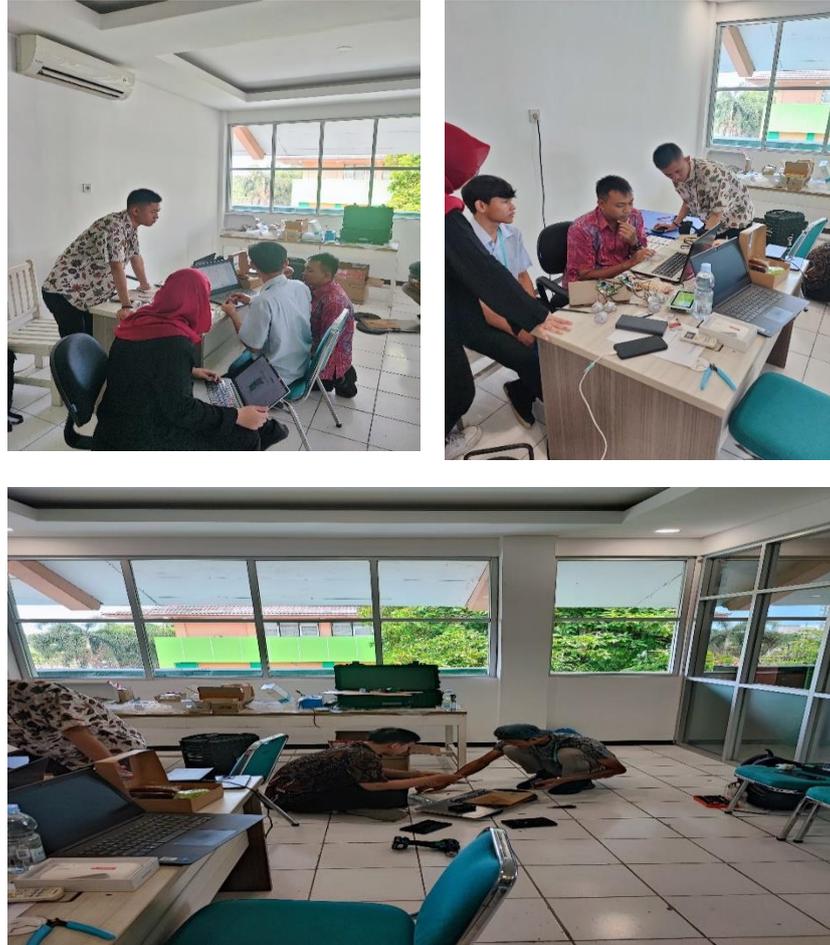
Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini, Perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai-balai sebagai penyedia layanan jasa industri.

Kegiatan fasilitasi industri 4.0 dapat berupa asesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, awareness industri 4.0, dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0.

a. Hasil yang telah dicapai

Realisasi dari Indikator Kinerja " Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 " adalah 1 (satu) Perusahaan dari target 1 (satu) Perusahaan dengan capaian 100%. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0

adalah PT. Autentik Karya Analitika melalui pelaksanaan kegiatan Pelatihan Produksi AiMS Ambien.



Gambar 6. Kegiatan Pelatihan Produksi AiMS Ambien

b. Analisis hasil yang telah dicapai

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perusahaan yang Terasilitasi Industri 4.0 dalam Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		2023	
			T	R	T	R	T	R
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	-	-	-	-	1	1

Indikator dan target kinerja terkait Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 baru ditetapkan mulai periode kinerja tahun 2023 menyesuaikan dengan perubahan Renstra BSKJI.

Pada tahun 2023, dari target yang ditetapkan 1 (satu) perusahaan terealisasi 1 (satu) perusahaan dengan capaian 100%.

Analisis Penyebab Keberhasilan

BBSPJPI sejak 2019 telah mengembangkan AiMS dimana AiMS dapat disebut brand inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPI. AiMS sendiri telah mengaplikasikan teknologi berbasis industri 4.0 sebagai instrument pemantau lingkungan yang dapat dipantau secara online dan terus menerus sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Penerapan AiMS diharapkan dapat menjadi solusi pendorong kepatuhan regulasi serta mengurangi ketergantungan produk impor untuk instrument pemantauan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2021, AiMS terpilih sebagai salah satu dari 112 Karya Inovasi Indonesia Paling Prospektif-2020 dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dengan judul Inovasi AiMS (Adaptive Monitoring System) terintegrasi dalam Sistem Informasi Digital sebagai teknologi Monitoring Lingkungan berbasis Daring ”.

Prestasi AiMS yang sudah diakui tersebut membuat beberapa pihak industri percaya untuk menggunakan/bekerjasama untuk proses komersialisasi produk AiMS khususnya AiMS Ambient Air Quality.

c. Kendala

Tidak ada kendala.

d. Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah dengan melakukan pengembangan dan komersialisasi AiMS kepada pelanggan secara luas.

Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi industri 4.0 kedepannya perlu dilakukan penambahan SDM internal yang berkompeten melalui pelaksanaan pelatihan manager transformasi 4.0.

b) Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri

Dalam dokumen Making Indonesia 4.0, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi standar berkelanjutan. Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standardisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, standardisasi industri sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan Making Indonesia 4.0.

Kegiatan fasilitasi standardisasi industri yang dijalankan dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan).

a. Hasil yang telah dicapai

Realisasi terkait dengan indikator kinerja "Perusahaan yang terfasilitasi di Bidang Standardisasi" adalah 6 (enam) Perusahaan dari target 5 (lima) perusahaan.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi standardisasi industri berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri terkait:

I. Standart Mutu :

a) BP Batam (BLU Jasa Kawasan)

Pelatihan penerapan dokumen ISO/IEC 17025:2017 dan audit internal sesuai Sesuai penawaran Nomor B/1162/BSKJI/BBSPJPPI/MS/IX/2023 tanggal 11 September 2023.

II. Standar Berkelanjutan

a) PT. Desa Wisata Indonesia (Perusahaan penyedia jasa rekreasi keluarga)

Kerjasama penyusunan dokumen persetujuan teknis sesuai SPK Nomor T/1/BSKJI/SPK/01/2023 tanggal 2 Januari 2023.

b) PT. Ramai Santoso Sejahtera (Industri retail).

Kerjasama konsultasi penyusunan dokumen lingkungan sesuai SPK B/440/BSKJI/BBSPJPPI/SPK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.

c) PT. Citra Warna Abadi (Industri Cat).

Kerjasama penyusunan dokumen persetujuan teknis sesuai SPK Nomor 496/BSKJI/BBSPJPPI/HK-SPK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

d) PT. Anugerah Pupuk Makmur (Industri Pupuk)

Pelatihan penyusunan dokumen industri hijau sesuai penawaran Nomor B/1070/BSKJI/BBSPJPPI/MS/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

e) PT. Anugerah Pupuk Lestari (Industri Pupuk)

Pelatihan penyusunan dokumen industri hijau sesuai penawaran Nomor B/1649/BSKJI / BBSPJPI / MS / IX / 2023 tanggal 3 November 2023.

b. Analisis Hasil yang telah dicapai :

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perusahaan yang Terfasilitasi di Bidang Standardisasi Industri dalam Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		2023	
			T	R	T	R	T	R
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	3	7	4	5	5	6

Target realisasi pada indikator kinerja Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri selama periode tahun 2021-2023 selalu tercapai. Untuk capaian tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022, namun realisasi tertinggi capaian ada di tahun 2021.

Analisis Penyebab keberhasilan :

- BBSPJPI mempunyai SDM yang berkompeten dan memiliki pengalaman dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025.
- BBSPJPI sebagai salah satu lembaga sertifikasi Industri Hijau yang ditunjuk Kemenperin sesuai Permenperin 24 Tahun 2021.

- BBSPJPPI memiliki kompetensi dalam penyusunan Persetujuan Teknis dan penyusunan Dokumen Lingkungan rekomendasi DLHK Prov / Kabupaten di Jawa Tengah.

c. Kendala

Tidak ada kendala dalam pencapaian target

e. Tindak Lanjut

Realisasi Indikator ini, masih berfokus pada kegiatan konsultasi dan bimbingan penerapan standar mutu dan standar berkelanjutan. Kedepannya perlu turut dipublikasikan kompetensi BBSPJPPI dalam mendukung penerapan standardisasi industri di lingkup standar produk maupun standar proses khususnya untuk lingkup yang sesuai dengan kompetensi dan keunggulan BBSPJPPI.

Rencana di tahun 2024 adalah dengan meningkatkan promosi jasa layanan BBSPJPPI terkait fasilitasi standardisasi industri baik secara online maupun dengan melakukan koordinasi ke Dinas terkait.

IV. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Sasaran strategis ini mempunyai 4 indikator kinerja yaitu :

a) Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi.

Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi.

Dalam hal ini, perusahaan industri bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi diantaranya UPT di lingkungan BSKJI untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi

teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Kegiatan jasa konsultasi didalamnya termasuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi.

Outcome kerja sama jasa konsultasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.

a. Hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2023, sesuai Nota Dinas Kepala OPTIKJI BSKJI Nomor 35/BSKJI.4/IND/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 terkait Data Realokasi Anggaran DAPATI TA 2023 ke Satker Daerah , BBSPJPII mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan DAPATI yang akan didanai di tahun 2023.

Adapun capaian pelaksanaan kegiatan DAPATI ditinjau dari peningkatan produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi sebagai berikut:

Tabel 21. Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Teknologi Industri Melalui Jasa Konsultasi

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Performansi yang diukur	Anggaran (Rp.)		Performansi		Rata-Rata
				BSKJI	IKM	Sebelum	Sesudah	
1	UD. Cap Battery (Konsultasi Optimalisasi proses produksi garam konsumsi beryodium	IKM Garam	Peningkatan kualitas produk garam dengan meningkatnya derajat keputihan	92.043.000	56.500.000	45 ^o	55 ^o	22,2 %

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Performansi yang diukur	Anggaran (Rp.)		Performansi		Rata-Rata
				BSKJI	IKM	Sebelum	Sesudah	
	dan garam aneka industri)							
2	PT. Retota Sakti (Jasa Konsultansi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol)	Industri Tenun dengan serat alam	Peningkatkan performansi berupa penghematan biaya energi dan bahan bakar	100.470.000	33.500.000	Rp400.000 /hari	Rp80.000 /hari	80 %

b. Analisis hasil yang telah dicapai

Berdasarkan hasil pelaksanaan pendampingan terhadap IKM industri selama kegiatan DAPATI diperoleh capaian rata-rata produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi adalah sebesar 51,1 % lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 10%.

Tabel 22. Perbandingan Capaian Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Teknologi Industri Melalui Jasa Konsultansi dalam Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	NA	NA	10	18,38	10	51,1

Pada tahun 2023, realisasi Indikator Kinerja Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi tercapai sebesar 51,1 % dari target yang ditetapkan 10 % dengan capaian 511%.

Dibanding realisasi tahun 2022, realisasi capaian 2023 mengalami peningkatan. Namun demikian, hal ini tidak dapat dijadikan perbandingan mengingat kondisi tiap industri penerapan berbeda dan juga tingkat teknologi yang dipilih juga berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja.

Analisis penyebab keberhasilan :

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan DAPATI dalam memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan dalam penentuan tim dan anggota tim DAPATI telah mempertimbangkan kebutuhan dan kompetensi personil yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan DAPATI. Selain itu, dalam proses penyusunan proposal juga telah dilakukan identifikasi awal dan survey lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus solusi yang dibutuhkan oleh industri yang akan diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan DAPATI. Pada proses pelaksanaan, disamping adanya kooperatif dari pihak IKM penerima, Tim DAPATI juga secara rutin melakukan verifikasi dan supervisi ke lapangan secara berkala sehingga capaian progres output kegiatan dapat terpantau dan di akhir kegiatan target dapat tercapai sesuai yang ditetapkan.

c. Kendala

Dari perbandingan target dan realisasi diketahui bahwa target yang ditetapkan telah tercapai namun demikian masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yang mengakibatkan kegiatan DAPATI tidak optimal seperti :

1. Pada pelaksanaan konsultasi di PT. UD Cap Batery terdapat beberapa kendala seperti :
 - Kondisi operasional berdasarkan kebutuhan pasar, menyebabkan unit filter belum digunakan secara optimal.
 - Pengalihan ladang garam menjadi tambak ikan karena musim penghujan hampir tiba sehingga belum tercapai kondisi optimal.
2. Pada pelaksanaan konsultasi di PT. Retota Sakti
 - Adanya kenaikan order yang diterima pihak PT. Retota menyebabkan operasional pengeringan masih tetap dibantu dengan sistem pengeringan menggunakan bahan bakar solar.

d. Tindak Lanjut

Tetap perlu dilakukan monitoring terhadap kegiatan jasa konsultasi DAPATI yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya untuk memastikan bahwa proses produksi tetap berjalan sesuai hasil rekomendasi pendampingan sehingga tetap dapat berkontribusi terhadap peningkatan performansi perusahaan.

Sementara itu, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DAPATI Tahun 2024 perlu lebih ditekankan peranan dukungan manajemen dan komitmen perusahaan karena hal tersebut berpengaruh pada tahapan proses pelaksanaan kegiatan selanjutnya serta keberhasilan kegiatan secara keseluruhan.

b) Meningkatnya PNBP layanan jasa industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap

tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.

Disamping itu, untuk mendukung sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010, BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berkaitan dengan pengelolaan sebagai satker BLU, pencapaian kinerja dalam hal pemberian layanan jasa teknis ke pelanggan diharapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan/peningkatan baik dari sisi kualitas layanan maupun dari aspek kuantitas realisasi penerimaan PNBP.

a. Hasil yang telah dicapai

Target dari indikator kinerja meningkatnya PNBP layanan jasa industri adalah 3 Persen dengan realisasi 9,96 % dengan tingkat capaian sebesar 332 % . Perhitungan didapat dari:

Penerimaan TA 2023 - Penerimaan TA 2022

Penerimaan TA 2022

$(\text{Rp.16.283.712.001} - \text{Rp.14.809.403.248}) = 9,96 \%$

Rp. 14.809.403.248

**Tabel 23 .Perbandingan Indikator Kinerja Meningkatnya PNBP
 Layanan Jasa Industri dalam Renstra 2021 – 2024.**

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	2	26	2	41,37	3	9,96

Dari tabel 23, Realisasi dari indikator kinerja “Meningkatnya PNBP layanan jasa industri” adalah sebesar 9,96% dari target yang ditetapkan sebesar 3% atau dengan tingkat capaian sebesar 332%. Realisasi capaian 2023 dibandingkan capaian 2022 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan capaian 2022 dipengaruhi dengan kondisi tahun sebelumnya di tahun 2021 dimana operasional layanan baru kembali berjalan normal setelah masa pandemi covid sehingga tingkat kenaikan penerimaan PNBP dari jasa layanan di tahun 2022 terlihat sangat signifikan kenaikannya.

Sementara itu, capaian 2023 dipengaruhi oleh kondisi operasional layanan tahun 2022 yang sudah kembali berjalan normal seperti masa sebelum pandemi. Hal ini menyebabkan tingkat kenaikan realisasi penerimaan PNBP tahun 2023 kenaikannya tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya

b. Analisis hasil yang telah dicapai

Analisis penyebab keberhasilan :

Capaian realisasi penerimaan PNBP dari Layanan jasa di tahun 2023 yang dapat melebihi target diantaranya dipengaruhi dengan adanya upaya BBSPJPPI dalam melakukan pengembangan layanan baik untuk perluasan ruang lingkup layanan eksisting maupun upaya inovasi pengembangan layanan sebagaimana diamanatkan dalam Permenperin Nomor 1 Tahun 2022. Inovasi pengembangan layanan yang dilakukan/diinisiasi di tahun 2023 diantaranya layanan sertifikasi halal, penyelenggara uji profisiensi dan pelaksanaan audit/uji RATA.

Upaya komersialisasi produk inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI (AiMS) diantaranya dengan masuknya AiMS dalam sistem

e-Catalog juga berdampak terhadap penerimaan PNBP dari sisi layanan optimalisasi teknologi industri.

Selain itu, dibentuknya tim promosi BBSPJPI dan dijalinnya komunikasi serta koordinasi yang intensif dengan instansi teknis daerah (Dinas LHK Kota Semarang, Dinas LHK Kabupaten Semarang) sehingga BBSPJPI menjadi pusat rujukan dan rekomendasi dalam mengatasi permasalahan industri khususnya terkait pemenuhan kewajiban/regulasi di bidang lingkungan. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan layanan terkait Konsultasi/pendampingan dalam Penyusunan Dokumen Standar Teknis dan Sistem Manajemen Lingkungan.

Penambahan infrastruktur LPK diantaranya melalui penambahan 5 (lima) personil dengan kompetensi auditor ISO 9001 juga turut memperluas kemampuan jasa layanan sertifikasi.

Diluar aspek teknis di atas, upaya monitoring kelancaran pembayaran atas tagihan jasa layanan yang dilakukan tim keuangan BBSPJPI juga turut berdampak terhadap capaian realisasi serta peningkatan capaian penerimaan PNBP jasa layanan di tahun 2023.

c. Kendala

Perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja telah berhasil dicapai. Tetapi terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan penerimaan PNBP BBSPJPI masih dirasa belum optimal antara lain:

1. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan yang sejenis (adanya himbauan dari DLH kepada industri untuk mengujikan di fasilitas laboratorium yang dimiliki DLH).
2. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih murah.
3. Beberapa perusahaan beralih ke laboratorium lain. Hal ini sebagai dampak dimana pada periode pandemi Covid-19, BBSPJPI

sempat melakukan pembatasan penerimaan sampel pengujian.

4. Proses penagihan untuk kontrak Kerjasama pemantauan lingkungan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama.
5. Masyarakat belum familiar dan terinformasi terkait kompetensi dan lingkup jasa layanan BBSPJPPI dikarenakan masih kurangnya informasi tentang BBSPJPPI.

d. Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di Tahun Anggaran selanjutnya adalah

1. Meningkatkan promosi atas pengembangan jasa layanan yang telah berjalan (Layanan sertifikasi halal, verifikasi TKDN, uji RATA) dengan memanfaatkan media sosial balai maupun melalui partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pameran
2. Mendorong proses akreditasi untuk jasa layanan yang telah diinisiasi sebelumnya (uji profisiensi) serta mendorong peluang pengembangan jasa layanan baru yang memiliki prospek terhadap peningkatan penerimaan PNBP (sertifikasi profesi, Verifikasi dan validasi GRK).
3. Dilakukan koordinasi intensif berkala antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan untuk pekerjaan kontrak kerjasama pemantauan lingkungan.
4. Penetapan tarif layanan terbaru melalui Keputusan Pimpinan BLU setelah terbitnya PMK tarif BLU.
Berkenanan dengan pengenaan tarif baru perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelanggan.

c) Peningkatan jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri

Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi rencang bangun dan perekayasaan di bidang industri,

standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan –kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

a. Hasil yang telah dicapai

Target dari Indikator Kinerja peningkatan jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri adalah 2 Persen dengan realisasi 2,34 % dengan capaian 117% . Perhitungan didapat dari:

Jumlah Layanan Jasa 2023 - Jumlah Layanan Jasa 2022

Jumlah Layanan Jasa Industri 2022

$(7991 - 7808) = 2,34 \%$

7808

Tabel 24 Jumlah Layanan Jasa Yang Digunakan Oleh Industri

No	Jenis Layanan	Satuan	Realisasi Layanan	
			2022	2023
1	Pengujian	Contoh Uji	7.327	7.131
2	Kalibrasi	Artefak/Alat	118	359
3	Sertifikasi	Sertifikat	167	229
4	Bimbingan dan Pendampingan Teknis	Orang	193	223
5	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	Industri	3	5
6	Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	Industri	0	1
7	PUP			43
Total			7.808	7.991

b. Analisis hasil yang telah dicapai

Tabel 25. Perbandingan peningkatan jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri dalam Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R
Peningkatan jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	NA	NA	NA	NA	2	2.34

Peningkatan jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri merupakan Indikator Kinerja baru yang ditetapkan menyesuaikan dengan perubahan Renstra BSKJI.

Analisis penyebab keberhasilan :

Layanan jasa BBSPJJPI tahun 2023 dibanding Tahun 2022 mengalami penambahan ruang lingkup layanan seperti layanan sertifikasi halal , uji RATA dan uji profesiensi.

Selain itu, dibentuknya tim promosi BBSPJJPI dengan program “ Blusukan) ke industri-industri baik secara door to door maupun by phone terbukti meningkatkan pelanggan. Salah satu cara dengan menyebarkan flyer terkait jasa layanan BBSPJJPI ke pelanggan melalui pameran , stand, acara yang diselenggarakan KLHK maupun Kemenperin dan dalam bentuk broadcast email pelanggan yang terdaftar di SINDIi .

Bertambahnya ruang lingkup layanan kalibrasi di Tahun 2022 , membuat meningkatnya jumlah layanan yang bisa dilayani.

Dari semua hal diatas dipandang turut berdampak terhadap peningkatan jumlah layanan di tahun 2023.

c. Kendala

Adanya identifikasi penurunan permintaan layanan pengujian penanganan pencemaran dikarenakan beberapa pelanggan beralih ke laboratorium milik DLH maupun kompetitor.

Ruang lingkup layanan kalibrasi masih terbatas

d. Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di Tahun Anggaran selanjutnya adalah

1. Melakukan pendekatan kembali kepada eks pelanggan BBSPJPPI serta meningkatkan promosi dan peningkatan kapasitas layanan melalui pengembangan jasa layanan sertifikasi halal, uji profisiensi, verifikasi GRK dan komersialisasi produk inovasi teknologi.
2. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan).
3. Dilakukan kunjungan/supervisi pelaksanaan layanan ke industri sebagai ajang promosi layanan.

d) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari pemanfaatan anggaran belanja Kementrian/Lembaga. Dalam hal ini, perhitungan penggunaan produk dalam negeri didasarkan atas realisasi anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja Pemerintah. Pemakaian akun belanja yang disepakati bersama meliputi akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111,

521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dan /atau akun BLU 525121,525154,525153, 537112, dan 537113.

Perhitungan nilai realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri (RP3DN) didapat dari Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dibagi total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

a. Hasil yang telah dicapai

BBSPJPI sebagai satker di bawah Kementerian Perindustrian berupaya dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Berdasarkan perhitungan data pagu anggaran dan realisasi 2023 berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dengan mengacu pada data Monitoring Pagu dan Realisasi PDN menu e-Monitoring APBN pada sistem Intranew diperoleh data perhitungan % Realisasi PDN dan TKDN sebesar 94,49 Persen dengan rincian:

- Pagu anggaran terpilih : Rp. 1.118.865.000,-
- Realisasi PDN : Rp. 1.053.430.877,-
- Realisasi TKDN : Rp. 3.793.586,-
- Realisasi Impor : Rp. 57.345.190,-

**Tabel 26 : Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri
 Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Akun 521211 ; 521219; 521811;
 522192; 524114; 521111 ; 521131; 522141; 524119; 522131; 522191;
 521241; 521841; 532111; 533111.**

No	Akun	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN +TKDN
1	521211	557,029,000	522,705,228	-	33,394,591	93.84
2	521219	24,000,000	-	-	23,950,599	
3	521811	44,803,000	44,234,665	-	-	98.73
4	522192	-	-	-	-	
5	524114	-	-	-	-	
6	521111	154,374,000	154,350,400	-	-	99.98
7	521131	-	-	-	-	
8	522141	-	-	-	-	
9	524119	8,450,000	8,400,000	-	-	99.41
10	522131	156,550,000	156,317,600	-	-	99.85
11	522191	-	-	-	-	
12	521241	-	-	-	-	
13	521841	6,244,000	5,413,000	-	-	86.69
14	532111	167,415,000	162,009,984	3,793,586	-	99.04
15	533111	-	-	-	-	
Jumlah		1,118,865,000	1,053,430,877	3,793,586	57,345,190	94.49

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Dari indikator kinerja persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, hasil yang didapat lebih tinggi dimana dari target 62% dengan realisasi 94,49% dengan capaian 152,4%.

**Tabel 27. Target dan Capaian Indikator Persentase Nilai
 Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam
 Pengadaan Barang dan Jasa dalam Renstra 2021 -2024**

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa	55	58	58	88,11	62	94,49

Dari tabel 27 dapat dilihat bahwa dari Tahun 2021-2023 bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa selalu mencapai target. Untuk realisasi dari Tahun 2022 mengalami peningkatan di Tahun 2023.

Analisa penyebab keberhasilan :

Telah dilakukan identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA BBSPJPI tahun berjalan dimana turut diidentifikasi peluang substitusi pengadaan bahan kimia dan sarpras perkantoran yang semula berasal dari impor dengan produk yang telah diproduksi di dalam negeri ataupun yang telah memenuhi TKDN.

Hal ini sejalan dengan komitmen BBSPJPI yang memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

c. Kendala

Masih terdapat produk barang yang menunjang operasional layanan (bahan kimia, peralatan uji, sparepart) yang masih belum dapat diproduksi di dalam negeri.

d. Tindak Lanjut

Rencana di Tahun Anggaran selanjutnya adalah pada proses pengadaan barang/jasa serta belanja pemerintah agar tetap memprioritaskan barang dan jasa yang telah dapat diproduksi di dalam negeri.

Untuk barang maupun jasa yang masih belum dapat dipenuhi di dalam negeri (untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%) dalam proses impornya agar dapat melakukan pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk di awal Tahun Anggaran.

V. Sasaran Kinerja IV : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

a) Indikator Kinerja : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Pengawasan internal melalui pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal setiap tahun sebagai wujud kontrol dan pendampingan atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya hasil pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dimaksud.

a. Hasil yang telah dicapai

Pelaksanaan audit kinerja TA 2022 dalam rangka pengawasan internal pada unit kerja BBSPJPPI telah dilakukan oleh Tim Inspektorat III Kementerian Perindustrian pada 8 sd 11 Agustus 2023. Terdapat beberapa temuan hasil audit kinerja BBSPJPPI yang

tertuang dalam Daftar Temuan Hasil Audit BBSPJPI TA 2021 yang terdiri dari 7 (tujuh) point temuan terkait program/pelaksanaan kegiatan dan 4 (empat) point temuan terkait keuangan dan BMN. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kemenperin Nomor R/162/IJ-IND/PW/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 seluruh temuan atas hasil audit kinerja Itjen TA 2022 pada satker BBSPJPI seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Pada indikator rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker targetnya adalah 92,5 % dengan realisasi 100 % dengan capaian 108,1 %.

Tabel 28. Target dan Capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker Dalam Renstra 2021 -2024

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91.5	100	92	100	92.5	100

Dari Tabel 28, didapat bahwa realisasi Indikator Kinerja “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker ” dari Tahun 2021-2023 selalu mencapai target dan semua hasil audit terselesaikan dengan tuntas (100 %). Ini merupakan komitmen dari BBSPJPI setiap tahun untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil rekomendasi pengawasan internal dari Inspektorat Jenderal Kemenperin.

Analisis penyebab keberhasilan

Terkait hasil audit kinerja, menindaklanjuti atas rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal telah dilakukan penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan TA 2022 Pada Satker BBSPJPPI dimana didalamnya memuat penanggung jawab untuk masing-masing hasil temuan berikut timeline batas waktu penyampaian tindak lanjut atas hasil temuan. Dalam hal ini masing-masing penanggung jawab telah berkomitmen menyampaikan hasil temuan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Selain itu koordinasi intensif dengan bagian tindak lanjut pengawasan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenperin beserta Tim Auditor terkait penyampaian bukti tindak lanjut hasil pengawasan turut berperan dalam penyelesaian hasil temuan.

c. Kendala

Tidak ada kendala

d. Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di Tahun Anggaran selanjutnya adalah menyajikan data yang lengkap dalam pengawasan audit kinerja tahun anggaran 2023 sehingga meminimalisir hasil temuan dari Inspektorat Jenderal.

Disisi lain, rekomendasi atas pelaksanaan pengawasan internal di tahun 2023 dapat dijadikan dasar masukan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2024.

VI. Sasaran Kinerja V : Terselenggaranya urusan pemerintahan di Bidang perindustrian yang berkelanjutan

a) Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.

Tingkat kepuasan pelanggan yang dicapai oleh Satker diukur melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan cara menyebarkan kuesioner yang sudah diuji validitasnya. Target kinerja IKM minimal indeks 3,6 dengan skala indeks 1-4.

Pengolahan data kuesioner dilakukan dengan metode pengukuran skala yang digunakan untuk mengukur nilai harapan dan kinerja dengan skala likert 1 sampai 5. Nilai 1 (satu) " sangat tidak berharap " untuk kelompok harapan dan berarti " sangat buruk " untuk kelompok kinerja. Sedangkan nilai 5 (lima) yang berarti " sangat berharap " untuk kelompok harapan dan berarti " sangat puas " untuk kelompok kinerja. Kuesioner yang dikirim ke pelanggan sesuai dengan format Permen PAN&RB no 14 Tahun 2017.

a. Hasil yang telah dicapai

Telah dilaksanakan survey kepuasan masyarakat atas jasa layanan BBSPJPI dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan perhitungan indeks IKM

untuk kuesioner kepuasan pelanggan yang masuk sd Desember 2023 sejumlah 280 kuesioner diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 .Jumlah dan Penilaian Kuesioner

Indikator Kinerja	Responden dengan Indeks 1	Responden dengan Indeks 2	Responden dengan Indeks 3	Responden dengan Indeks 4	Total responden
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	0	0	79	201	280

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri targetnya adalah 3,63 (indeks) dengan realisasi 3,66 (indeks) atau dengan persen capaian 100,8 %.

**Tabel 30. Target dan Capaian Indikator Kinerja Indeks
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri
dalam Renstra 2021 -2024**

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	3,65	3,62	3,66	3,63	3,66

Dari tabel 30 , untuk realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri dari Tahun 2021-2023 selalu mencapai target.

Dibandingkan realisasi Tahun 2022 , realisasi capaian sama dengan Tahun 2023.

Analisis penyebab keberhasilan :

Keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang melebihi target dari Tahun 2021 - 2023 adalah adanya komitmen dari BBSPJPPI untuk selalu mengedepankan pelayanan prima kepada pelanggan. Disamping itu masukan ataupun umpan balik yang diperoleh dari pengisian kuesioner kepuasan pelanggan telah dimanfaatkan sebagai masukan/saran untuk perbaikan layanan BBSPJPPI kedepannya.

Peningkatan kualitas BBSPJPPI baik dari sisi sarana prasarana, pelayanan maupun layanan dari aspek administrasi yang lebih

memudahkan pelanggan.

c. Kendala

Dikarenakan realisasi melebihi target indikator kinerja maka tidak ada kendala. Namun demikian terdapat kendala non teknis yang apabila ditindaklanjuti dapat berpeluang untuk meningkatkan nilai IKM seperti : tingkat partisipasi /keterlibatan pelanggan dalam pengisian kuesioner IKM rendah, masih terdapat informasi terkait fasilitas/sarpras layanan dan upaya peningkatan layanan belum terinformasi ke pelanggan.

d. Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah melakukan edukasi dan komunikasi secara intens ke pelanggan untuk pengisian kuesioner dan mengirimkannya kembali secara online ke BBSPJPPI, edukasi kepada pelanggan terkait upaya peningkatan layanan BBSPJPPI untuk memaksimalkan penilaian IKM dan memperbaiki sistem SINDI sehingga pelanggan yang mengunduh LHU dapat langsung terkoneksi dengan kuesioner.

VII. Terwujudnya ASN BSKJI yang professional

a) Indikator Kinerja : Rata-rata indeks profesionalitas ASN

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesional ASN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

a. Hasil yang telah dicapai

Nilai Indeks Profesional ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi,

Kompetensi, Kinerja dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019.

Realisasi dari Indikator Kinerja " Rata-rata indeks profesionalitas ASN " adalah sebesar 81,7 dari target 78 dengan tingkat capaian 104,7 %. Perhitungan capaian dari data Tim Kepegawaian BBSPJPPI.

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Tabel 31. Target dan Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN dalam Renstra 2021 -2024

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R
Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN	74	66	76	77,07	78	81,7

Dari tabel 31 , realisasi target Tahun 2022 dan 2023 mencapai target. Dimana capaian untuk Tahun 2023 meningkat dibanding realisasi pada Tahun 2022.

Analisa penyebab keberhasilan

Pada Indeks Profesionalitas ASN sesuai target dikarenakan koordinasi yang baik bagian umum kepegawaian yang aktif memberikan info pelatihan/diklat teknis sesuai jabatan masing-masing (struktural dan fungsional). Selain itu sikap proaktif pegawai yang setelah melakukan Diklat/Bimtek/Seminar/Webinar mengumpulkan bukti ke Bagian Kepegawaian untuk direkap.

Tabel 32. Perbandingan Capaian Indeks IPASN BBSPJPPI dengan Satker Lain (sumber intranet per 30 Januari 2024)

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai IPASN
1	412528	BBSPJIKFK	80,08

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai IPASN
2	247136	BBSPJIA	78,19
3	247157	BBSPJI KMN	86,19
4	248042	BBSPJIT	83,04
5	247140	BBSPJIBBT	83,47
6	248056	BBSPJIS	81,16
7	248060	BBSPJILM	81,83
8	247199	BBSPJI KKP	83,16
9	247204	BBSPJI KB	88,93
10	247161	BBSPJPPI	82,00
11	247403	BBSPJI HPMM	82,21
12	248124	BSPJI BANDA ACEH	73,76
13	247225	BSPJI MEDAN	83,28
14	539053	BSPJI PADANG	82,62
15	248920	BSPJI PALEMBANG	87,87
16	539060	BSPJI LAMPUNG	77,21
17	247211	BSPJI SURABAYA	88,76
18	247232	BSPJI BANJARBARU	90,52
19	539074	BSPJI PONTIANAK	80,74
20	539081	BSPJI SAMARINDA	87,21

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai IPASN
21	247246	BSPJI MANADO	79,85
22	248145	BSPJI AMBON	81,59
23	015118	BSPJI JAKARTA	86,13
24	417912	BSPJI PEKANBARU	87,63

c. Kendala

Tidak ada kendala tetapi ada beberapa kendala yang jika diatasi bisa meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN seperti :

- Belum tersedianya jadwal pelaksanaan untuk beberapa diklat/pelatihan peningkatan kompetensi SDM (struktural, fungsional dan pelatihan teknis) yang sesuai dengan kebutuhan program pelatihan yang telah disusun.
- Untuk Workshop/ Seminar / Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlewat mendokumentasikan kelengkapan (Surat Tugas, Materi, Foto/Screenshot).
- Keterbatasan anggaran dan kuota pelaksanaan pelatihan kepemimpinan untuk pejabat struktural.
- Jadwal pelaksanaan diklat fungsional dan diklat struktural oleh Institusi Pembina masih terbatas

d. Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah menginstruksikan kepada masing-masing tim kerja untuk menyusun kebutuhan pelatihan anggota tim masing-masing

lengkap dengan jenis pelatihan, penyelenggara dan personil yang ditugaskan.

VIII. Penguatan layanan publik

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

a) Indikator Kinerja : Nilai Minimal Indeks Layanan Publik

a. Hasil yang telah dicapai

Realisasi dari Indikator Kinerja " Nilai Minimal Indeks Layanan Publik " adalah capaian indeks sebesar 4,84 dari target 4,35 dengan tingkat capaian 111,3 %.

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Tabel 33. Target dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Minimal Indeks Layanan Publik dengan Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R
Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	4,2	4,3	4,3	4,56	4,35	4,84

Dari Tabel 33, realisasi indikator kinerja Nilai Minimal Indeks Layanan Publik selalu melebihi target. Untuk realisasi selalu

mengalami peningkatan di setiap tahun.

Analisa penyebab keberhasilan :

Komitmen dari Kepala BBSPJPPI agar meningkatkan layanan yang berbasis online sehingga lebih memudahkan pelanggan untuk menggunakan jasa BBSPJPPI dan dapat menjangkau pangsa pasar yang luas.

Pengembangan layanan online melalui peningkatan platform SINDIi yang selalu diupgrade setiap tahun. Dimana pada Tahun 2023 ini, sudah dikembangkan Pengembangan Platform udaraku.kemenperin.go.id

c. Kendala

Tidak ada kendala tetapi ada beberapa hal yang jika diatasi bisa meningkatkan Nilai Minimal Indeks Layanan Publik seperti :

- Belum semua fitur pada sistem layanan mengakomodir kebutuhan pelanggan dan pegawai di balai.
- Sistem pendokumentasian/ pengarsipan yang masih belum terintegrasi
- Terbatasnya kompetensi SDM di bidang IT.
- Penyelesaian pengembangan platform sistem jasa layanan membutuhkan waktu cukup lama (Masih tergantung pada eksternal).

d. Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di tahun Anggaran selanjutnya adalah

- Pengembangan kapabilitas kompetensi SDM di bidang IT.
- Pengembangan sistem informasi yang *user friendly* bagi pelanggan dalam mengakses jasa layanan balai.

- Lebih proaktif berkomunikasi dengan pelanggan untuk penerima kritik dan saran secara langsung melalui supervisi lapangan.
- Update/pengembangan sistem informasi secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk upaya modernisasi BLU.
- Dilakukan update / input dokumen (jika ada dokumen baru).
- Review SOP secara berkala serta pada RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)
- Pengembangan website yang lebih informatif dan mudah diakses.
- Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pendukung IT.
- Perkuat Sistem layanan satu pintu.

IX. Penguatan Akuntabilitas Organisasi

a) Indikator Kinerja : Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Evaluasi dilakukan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian terhadap seluruh satker di lingkungan Kemenperin, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

Pada tahun 2022, pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan SAKIP 2021 dengan mengacu pada ketentuan PerMenPAN RB Nomor

88 Tahun 2021.

a. Hasil yang telah dicapai

Berdasarkan Evaluasi atas implementasi SAKIP 2022 pada satker BBSPJPI sesuai Laporan Hasil Evaluasi Tim Inspektorat Jenderal kementerian Perindustrian Nomor 23/IJ-IND.4/PW/V/2023 tanggal 14 April 2023 sebesar 77,10.

Realisasi dari Indikator Kinerja " Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja " adalah nilai capaian akuntabilitas kinerja sebesar 77,1 dari target 77 dengan tingkat capaian 100,1 %.

b. Analisa hasil yang telah dicapai.

Tabel 34. Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja	77	77,1	100,1

Analisa penyebab keberhasilan:

- 1) Dokumen rencana kinerja anggaran yang disusun lengkap serta selaras dengan Renstra satker dan Renstra Unit Eselon I.
- 2) Laporan akuntabilitas kinerja yang memuat evaluasi kinerja telah disusun secara akurat dan disampaikan secara tepat waktu.
- 3) Komitmen pimpinan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk mendukung peningkatan kinerja satker.

**Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja Nilai Minimal Akuntabilitas
 Kinerja dengan Renstra 2021-2024**

Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R
Nilai Minimal Akuntabilitas	80,5	82,44	81	81,65	77	77,1

Dari table 30. Capaian Nilai Akuntabilitas kinerja Tahun 2021-2023 selalu melebihi target. Untuk capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 menurun dibanding Tahun 2022.

Tabel 36 , Capaian Nilai SAKIP Satker BSKJI

No	Satker	Nilai SAKIP
1	BBSPJIKFK	81,60
2	BBSPJIT	76,05
3	BBSPJIBBT	79,95
4	BBSPJIS	79,05
5	BBSPJIA	78,45
6	BBSPJPPI	77,10
7	BBSPJIKKP	77,25
8	BBSPJIKB	79,65
9	BBSPJI HPMM	77,10
10	BBSPJIKMN	78,45
11	BBSPJILM	78,45
12	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	78,90
13	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	77,10

No	Satker	Nilai SAKIP
14	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	77,10
15	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	75,15
16	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	76,80
17	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	79,05
18	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Lampung	77,70
19	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	74,80
20	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	76,35
21	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Aceh	77,55
22	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	73,95
23	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	76,80
24	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	76,80

c. Kendala

Penilaian SAKIP tahun 2023 mengacu pada ketentuan terbaru yang diatur dalam PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021, dimana terdapat perubahan mekanisme penilaian SAKIP yang ditetapkan Tim Penilai SAKIP dari Inspektorat III.

Tidak ada kendala tetapi beberapa hal yang jika diatasi bisa meningkatkan “ Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja ” seperti :

- Pemahaman terkait perubahan mekanisme penilaian SAKIP yang ditetapkan Tim Penilai SAKIP dari Inspektorat III.
- Dokumen SOP perencanaan kinerja dan pengumpulan data kinerja yang belum terupdate.

d. Tindak Lanjut

Atas kendala yang dihadapi tersebut, rencana perbaikan adalah mempersiapkan data yang dapat digunakan untuk penilaian SAKIP tahun anggaran 2024 serta menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2023.

b) Indikator Kinerja : Nilai minimal laporan keuangan

Laporan Keuangan Kementerian perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metode penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat

unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.

a. Hasil yang telah dicapai

Berdasarkan surat dari Sekretariat jenderal Nomor B/1139/SJ-IND.3/KU/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Unit Eselon I Tahun 2022 , dimana nilai Laporan Keuangan BBSPJPI sebesar 98,00.

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Tabel 37. Nilai Minimal Laporan Keuangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Nilai Laporan Keuangan	92	98	106,5

Analisa penyebab keberhasilan

Keberhasilan nilai laporan keuangan ini dikarenakan laporan keuangan telah disusun sesuai ketentuan dengan memperhatikan rekomendasi perbaikan laporan keuangan yang disampaikan Itjen pada saat pelaksanaan review laporan keuangan.

Tabel 38. Capaian Indikator Kinerja Nilai Minimal Laporan Keuangan dengan Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		2023	
			T	R	T	R	T	R
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai Laporan Keuangan	Nilai	90	92,3	91	97	92	98

Dari Tabel 38. Capaian Nilai Keuangan setiap tahun selalu memenuhi target. Untuk capaian Nilai Laporan Keuangan Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.

**Tabel 39. Perbandingan capaian Nilai Laporan Keuangan TA
 2022 Antar Satker BSKJI**

No	Satuan Kerja	Nilai
1	BBSPJI Logam dan Mesin	99,40
2	BBSPJI Kerajinan dan Batik	98,90
3	BSPJI Surabaya	98,75
4	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	98,25
5	BSPJI Ambon	98
6	BSPJI Pontianak	98
7	BBSPJPPI	98
8	BSPJI Palembang	98
9	BSPJI Banjarbaru	97,25
10	BSPJI Manado	97
11	BBSPJI Kulit Karet dan Plastik	97
12	BBSPJI Keramik & Mineral Non logam	96
13	BBSPJI Agro	95
14	BSPJI Samarinda	95
15	BBSPJI Tekstil	94,5
16	BBSPJI Kimia, Farmasi dan Kemasan	94,50
17	BSPJI banda Aceh	94,75
18	BSPJI Jakarta	93,40

No	Satuan Kerja	Nilai
19	BBSPJI Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim	92
20	BSPJI Medan	91,50
21	BSPJI Pekanbaru	90,75
22	BBSPJI Selulosa	91
23	BSPJI Bandar Lampung	88
24	BSPJI Padang	88

c. Kendala

Tidak ada kendala

d. Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di Tahun selanjutnya adalah

- dalam penyajian laporan keuangan agar menyampaikan penjelasan atas isi laporan keuangan (LRA, Neraca, LO, LPE, Pengungkapan penting lainnya) secara memadai
- Segera dilakukan persiapan penunjukan dan pelaksanaan audit laporan keuangan BLU tahun 2023 oleh KAP .

3.1.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA BALAI TA 2021-2024

Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Strategis TA 2021-2024 yang dilaksanakan TA 2023. Capaian kinerja yang dapat terrealisasi dapat dilihat tabel 33 sebagai berikut :

Tabel 40. Capaian Kinerja Renstra Satker BBSPJPPI TA. 2021-2024

Tabel 40. Capaian Kinerja Renstra Satker BBSPJPPI TA. 2021-2024														
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021			2022			2023			2024	TOTAL 2021-2024			
	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi sd 2023	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas														
-	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	NA		NA			2	80	4000,00	3				
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0														
-	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	NA		NA			1	1	100,00	1	2	1	50,0	
-	2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi	3	7	233,3	4	5	125	5	6	120,00	5	17	105,9	
Meningkatnya Kemampuan Industri barang														
-	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang	NA		10	18,38	183,8	10	51,1	511,00	11				
-	2.Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	2	26	1300	2	41,37	2068,5	3	9,96	332,00	4			
-	3.Meningkatnya jumlah layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	NA		NA			2	2,34	117,00	3				
-	4.Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	55	58	105,5	58	88,10	151,90	62	94,49	152,40	65	240	240,59	100,2
Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien														
	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	100	109,3	92	100	108,70	92,5	100	108,11	93	369	300	81,3

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI



Terselenggaranya Urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan														
	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	3,65	101,4	3,62	3,66	101,10	3,63	3,66	100,83	3,65	14,5	10,97	75,7
Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional														
	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	74	66	89,19	76	77,07	101,41	78	81,7	104,74	80	308	224,77	73,0
Penguatan Layanan Publik														
	Nilai Minimal indeks layanan publik	4,20	4,30	102,4	4,30	4,56	106,05	4,35	4,84	111,26	4	17,25	13,7	79,4
Penguatan Akuntabilitas Organisasi														
	1.Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,50	82,44	102,4	81,00	81,65	100,80	77,00	77,10	100,13	80	318,5	241,19	75,7
	2.Nilai minimal laporan keuangan	90,00	92,30	102,6	91,00	97,00	106,59	92,00	98,00	106,52	93	366	287,3	78,5

1. Hasil yang telah dicapai

Pada umumnya realisasi tahun berjalan sesuai dengan target yang ada pada Renstra. Selama kurun waktu satu tahun ini bila dibandingkan dengan target jangka menengah, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target pada TA 2023 yaitu perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industry. Sedangkan indikator dengan satuan persen, indeks dan nilai tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah.

2. Analisis hasil yang telah dicapai

Pada umumnya semua realisasi Indikator Kinerja sudah mencapai target. Hal ini dikarenakan setiap tim kerja berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam menjalankan target yang sudah diberikan kepada masing-masing tim kerja. Koordinasi yang baik dari semua pegawai dalam mendukung dan menjalankan pekerjaannya dengan professional dan efektif.

Monitoring setiap 3 bulan dari pimpinan sebagai pemegang manajemen puncak menunjukkan dukungan dan perhatian terhadap capaian kinerja. Dalam hal ini dapat memberikan alternative solusi dan pemecahan masalah dalam pencapaian kinerja tersebut.

3. Kendala

Pada umumnya realisasi tahun berjalan sesuai dengan Target yang ada pada Renstra sehingga tidak ada kendala dalam pencapaiannya.

4. Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan realisasi target jangka menengah semua target diperkirakan dapat tercapai pada akhir periode Renstra TA 2024.

Dengan memperhatikan realisasi tersebut agar realisasi pada periode Renstra 2021-2024 dapat lebih baik. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar semua target dapat terrealisasi adalah

- Menjaga komitmen dan tanggungjawab BBSPJPI dengan pelanggan sesuai dengan SPK/Kontrak/Penawaran.

- Menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan dalam menangani keluhan dan pertanyaan dari pelanggan.
- Meningkatkan promosi dengan dinas terkait dan juga pelanggan dalam mempublikasikan informasi layanan BBSPJPI.
- Update informasi melalui platform media social.
- Meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang kemudahan informasi baik kepada pelanggan maupun secara internal.
- Mengupdate dan mengarsip data dari masing-masing tim kerja dengan baik dan terdokumentasi.

3.1.3 Capaian Program Prioritas Nasional TA 2023

BBSPJPI pada tahun 2023, mendapat prioritas nasional terkait DAPATI.

1. Hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2023, sesuai Nota Dinas Kepala OPTIKJI BSKJI Nomor 35/BSKJI.4/IND/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 terkait Data Realokasi Anggaran DAPATI TA 2023 ke Satker Daerah, BBSPJPI mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan DAPATI yang akan didanai di tahun 2023.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pendampingan terhadap IKM industri selama kegiatan DAPATI diperoleh capaian rata-rata produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi adalah sebesar 51,1 % lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 10%.

2. Analisis hasil yang telah dicapai

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan DAPATI dalam memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan dalam penentuan tim dan anggota tim DAPATI telah mempertimbangkan kebutuhan dan kompetensi personil yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan DAPATI. Selain itu, dalam proses

penyusunan proposal juga telah dilakukan identifikasi awal dan survey lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus solusi yang dibutuhkan oleh industri yang akan diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan DAPATI. Pada proses pelaksanaan, disamping adanya kooperatif dari pihak IKM penerima, Tim DAPATI juga secara rutin melakukan verifikasi dan supervisi ke lapangan secara berkala sehingga capaian progres output kegiatan dapat terpantau dan di akhir kegiatan target dapat tercapai sesuai yang ditetapkan.

3. Kendala

Dari perbandingan target dan realisasi diketahui bahwa target yang ditetapkan telah tercapai namun demikian masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yang mengakibatkan kegiatan DAPATI tidak optimal seperti :

- a. Pada pelaksanaan konsultasi di PT. UD Cap Batery terdapat beberapa kendala seperti :
 - Kondisi operasional berdasarkan kebutuhan pasar, menyebabkan unit filter belum digunakan secara optimal.
 - Pengalihan ladang garam menjadi tambak ikan karena musim penghujan hampir tiba sehingga belum tercapai kondisi optimal.
- b. Pada pelaksanaan konsultasi di PT. Retota Sakti
 - Adanya Peak order dari PT. Retota menyebabkan operasional pengeringan masih dibantu dengan pengeringan solar.

4. Tindak Lanjut

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DAPATI Tahun 2024 perlu dukungan manajemen dan komitmen perusahaan karena hal tersebut berpengaruh pada tahapan proses pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2.1 Realisasi Anggaran Keuangan (RM)

1. Hasil yang telah dicapai

Realisasi anggaran berdasarkan Renstra Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sebagai berikut:

Tabel 41. Realisasi Keuangan Berdasarkan Renstra Satker BBSPJPI TA. 2021-2024

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021				2022				2023				2024	TOTAL 2021-2024			
	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)	Target Renstra (RP)	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas																	
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	80.000.000	210.910.000	185.821.503	88,10	100.000.000	219.870.000	215.140.806	97,85					100,000.000	380,000.000	531.250.000	501.322.651	94,37
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil									100,000.000	100,470.000	100,360.342	99,89					

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI



	kegiatan kolaborasi																	
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0																	
	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	430.570.000	448.585.000	96.977.840	21,62	433.820.000	192.530.000	189.124.866	98,23	433,820,000				433,820,000	1,732,030,000	1.158.495.000	766.930.926	66,20
	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0									388100000	371194686	95,64						
	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi									129.280.000	109.633.534	84,80						
3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri																	

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**



Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi										92.043.000	90.265.812	98,07			92.043.000	90.265.812	98,07
Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2.074.855.000	6.786.123.000	5.881.933.918	86,68	1.619.635.000	4.714.538.000	4.701.468.023	99,72	6.339,370,000	405.070.000	395.168.159	97,56	6.320,900,000	16,354,760,000	11.905.731.000	10.978.570.100	92,21
Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	7,561,688,000	661.970.000	416.995.490	62,99	5,468,938,000	1.825.820.000	1.801.848.841	98,69	7,672,450,000	7.196.257.000	7.085.539.679	98,46	10,775,000,000	31,478,076,000	9.684.047.000	9.304.384.010	96,08
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam	592,030,000	2.728.723.000	1.730.972.794	63,44	2,786,240,000	3.966.530.000	3.808.556.930	96,02	915,610,000	2.635.838.000	2.511.168.250	95,27	841,240,000	5,135,120,000	9.331.091.000	8.050.697.974	86,28

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI



	pengadaan barang dan jasa																	
4	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien																	
	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	24,060,000	63920000	28879176	45,18	48440000	28540000	27952303	97,94	61,680,000	26.545.000	26.253.282	98,90	61,680,000	195,860,000	119,005.000	83.084.761	69,82
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan																	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	5,604,757,000	555.515.000	254.183.493	45,76	5.981.765.000	300.660.000	293.610.624	97,66	5,932,050,000	5.870.500.000	5.617.760.657	95,69	6,451,487,000	23,970,059,000	6.726.675.000	6.165.554.774	91,66

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**



6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional Rata-rata indeks profesionalitas ASN	132,293,000	132293000	85932356	64,96	422770000	336530000	325886893	96,84	425,420,000	14.953.012.000	14.733.759.736	98,53	425,420,000	1,405,903,000	15.421.835.000	15.145.578.985	98,21
	Nilai disiplin pegawai	12,311,585,000	12035262000	11821877700	98,23	14132264000	14147380000	14102415082	99,68	17,043,450,000								
7	Penguatan Layanan Publik Nilai minimal indeks layanan publik	686,135,000	5966917000	5341411145	89,52	516680000	5610920000	5324912000	94,9	751,340,000	464.710.000	405.574.538	87,27	716,680,000	2,670,835,000	12.042.547.000	11.071.897.683	91,94
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi Nilai minimal akuntabilitas kinerja Nilai minimal laporan keuangan	81,430,000	41570000	7031000	16,91	68.690.000	33.900.000	33.775.481	99,63	72,545,000	46.000.000	42.925.284	93,32	72,545,000	295,210,000	121.470.000	83.731.765	68,93
		107,385,000	55.000.000	55.000.000	100	114,780,000	114.780.000	114.701.918	99,93	114,780,000	103.800.000	103.773.908	99,97	114,780,000	451,725,000	273.580.000	273.475.826	99,96

Sedangkan realisasi keuangan berdasarkan indikator Perjanjian Kinerja TA. 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Realisasi Keuangan Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	Produktivitas /efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2%	80%	1.Jasa Konsultansi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol	100.470.000	100.360.342	99,89
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1.Layanan Konsultansi Dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	388.100.000	371.194.686	95,64
		2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi	5 Perusahaan	6 Perusahaan	1.Jasa Pelayanan Bimbingan Dan Pendampingan Teknis Industri	129.280.000	109.633.534	84,80
3	Meningkatnya Kemampuan Industri barang	1. Produktivitas /efisiensi perusahaan industri yang	10%	51,10%	1.Konsultansi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium Dan Garam Aneka Industri	92.043.000	90.265.812	98,07
		2.Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	3%	9,96%	1.Pemasaran, Promosi, Publikasi Dan Pembinaan Hubungan Pelanggan Layanan Teknis	405.070.000	395.168.159	97,56

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI**

		3.Meningkatnya jumlah layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	2%	2,34%	1.Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian 2.Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran 3.Layanan Pengujian Aneka Komoditi 4.Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi 5.Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Lembaga Sertifikasi 6.Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 7.Layanan Sertifikasi Produk 8.Layanan Sertifikasi Industri Hijau 9.Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan 10.Layanan Sertifikasi Halal 11.Layanan Audit Energi/audit Air/audit Lingkungan	719.625 7.000	7.085.53 9.679	98, 46
		4.Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62%	94,49 %	1.Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/work shop/layanan 2.Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga 3.Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 4.Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran	2.635.83 8.000	2.511.16 8.250	95, 27

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI**

					5.Peningkatan Kapasitas Bangunan Gedung Bbspjppi			
4	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,50 %	100%	1.Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	26.545.000	26.253.282	98,90
5	Terselenggaranya Urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,63	3,66	1.Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 2.Langganan Daya Dan Jasa 3.Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor 4.Pemeliharaan Kendaraan Operasional 5.Pemeliharaan Alat Laboratorium 6.Pemeliharaan Sarana Kantor 7.Pengadaan Bahan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 8.Penyelenggaraan Poliklinik	5.870.500.000	5.617.760.657	95,69
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	81,7	1.Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pppk 3.Pengelolaan/manajemen Sdm 4.Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional 5.Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	14.953.012.000	14.733.759.736	98,53

7	Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal indeks layanan publik	4,35	4,84	1.Pengelolaan Data Dan Informasi 2.Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah/ Buku 3.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/spip	464.710.000	405.574.538	87,27
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77,1	77	1.Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	46.000.000	42.925.284	93,32
	2.Nilai minimal laporan keuangan	92	98	1.Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan	103.800.000	103.773.908	99,97

Realisasi keuangan dari tiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja adalah sebagai capaian penggunaan anggaran dalam masing masing kegiatan.

Realisasi anggaran belanja/ penggunaan anggaran DIPA BBSPJPPI TA 2023 per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 31.593.377.867,- atau sebesar 97,48 % dari pagu DIPA 2023 sebesar Rp. . 32.411.625.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- Rupiah Murni (RM) : realisasi anggaran mencapai Rp. 17.444.857.552,- (99,62) dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.511.625.000,-.
- PNBPN : realisasi anggaran mencapai Rp. 14.148.520.315,- (94,96%) dari target rencana penggunaan anggaran PNBPN sebesar Rp. 14.900.000.000,-.

Pada awal TA. 2023 telah disusun rencana realisasi anggaran untuk Realisasi Anggaran kegiatan BBSPJPPI Per Triwulan, adapun realisasi capaian per Triwulan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 43. Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2023

Kegiatan/Komponen / Subkomponen		Anggaran (Rp)(00 0)	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)		% Realisa si Opuput
			Keuangan		Keuangan		Keuangan		Keuangan		
			T	R	T	R	T	R	T	R	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri		9.770.12 5									
1	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	405.070	0.45	0.45	7.48	4.54	4.51	14.7 3	82.6 5	84.7 2	150% dari 100 Orang
2	BAD Pelayanan publik kepada industri	7.713.63 7	25.4 2	23.8 2	22.1 2	28.7 2	26.6 4	41.5 6	25.0 7	25.9 7	119,5% dari 794 industri
3	CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagang an	1.458.90 5	-	-	-	-	-	1.56	100	93.5 7	125 % dari 4 industri
4	QDI Fasilitasi dan Pembinaa n Industri	192.513	-	-	22.0 3	8.51	38.2 2	48.7 9	42.7 2	41.7 4	100% 2 industri
Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Keseekretarian Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri		22.641.5 00									
1	EBA Layanan Dukungan Manajeme n Internal	20.235.4 32	19.1 3	16.5 4	30.5 9	29.5 2	22.2 6	26.9 6	28.2 9	29.3 4	100% 3 layanan
2	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.111.77 3	-	-	41.2 3	-	63.7 6	91.7 7	85.9 5	83.7 3	100% 115 Unit

3	EBC Layanan Manajeme n SDM Internal	1.083.51 0	11.0 7	6.44	43.5 3	24.1 6	19.8 7	29.3 6	70.6 3	55.1 2	112,6 % dari 190 Orang
4	EBD Layanan Manajeme n Kinerja Internal Industri	210.785	20.9 5	19.9 4	41.1 9	29.3 9	20.4 5	16.9 3	34.0 1	30.8 7	100 % 8 dokum en

Tabel 44. Realisasi Anggaran Kegiatan TA. 2023

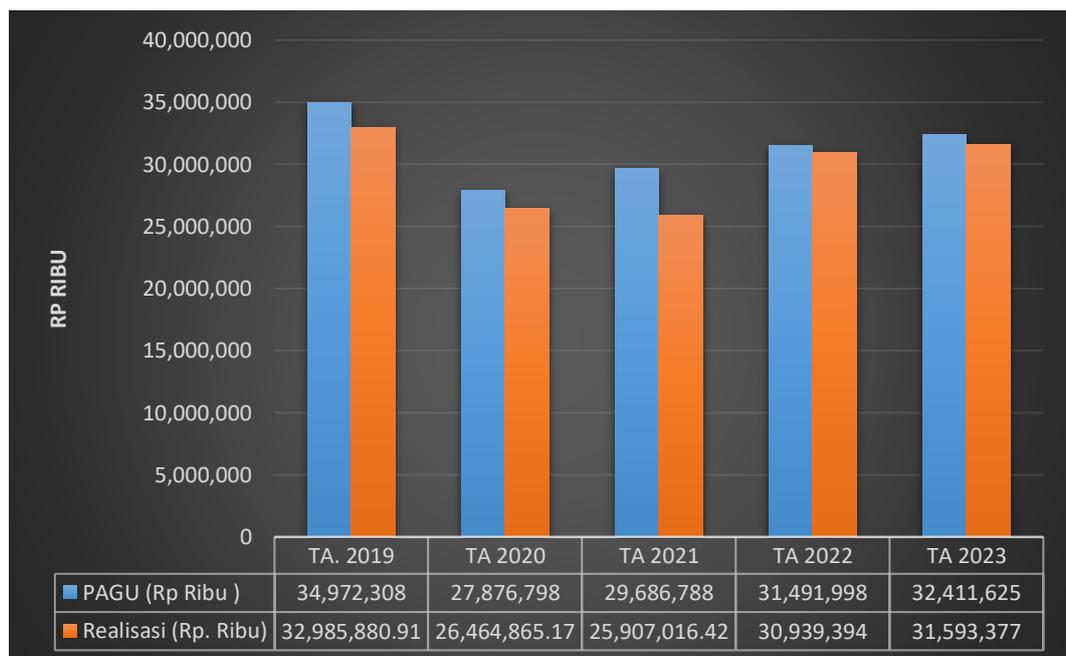
Komponen/ Subkomponen/		Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1		2	3	4
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	405.070.000	395.168.000	97,56
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	7.713.637.000	7.552.499.000	97,91
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1.458.905.000	1.401.552.000	96,07
6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	192.513.000	190.626.000	99,02
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.235.432.000	19.847.066.000	98,08
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	1.111.773.000	1.087.049.000	97,78
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.083.510.000	915.569.000	84,50
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	210.785.000	203.845.000	96,71
Total		32.411.625.000	31.593.374.000	95,95

2. Analisis hasil yang telah dicapai

Realisasi anggaran Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) tahun 2023 sebesar Rp. 31.593.377.867,- atau 97,48% dari total anggaran Rp. 32.411.625.000,-. Capaian realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan target realisasi keuangan yang ditetapkan BSKJI, dimana BSKJI menetapkan target realisasi keuangan satker di lingkungan BSKJI untuk tahun 2023 sebesar 98,04 %.

Tabel 45. Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2019-2023

	TA. 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
PAGU (Rp. Ribu)	34.972.308	27.876.798	29.686.788	31.491.998	32.411.625
Realisasi (Rp. Ribu)	32.985.880, 906	26.464.865, 165	25.907.016, 415	30.939.394	31.593.377
Realisasi(%)	94,32	94,94	87,27	98,25	97,48



Gambar 7. Perkembangan Realisasi dan Pagu Anggaran TA. 2019 – 2023

3. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi dalam realisasi keuangan TA 2023 adalah

- Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan promosi dan publikasi layanan Anggaran kegiatan pameran yang diikuti BBSPJPPI tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan tema dari pelaksanaan pameran yang tersedia kurang sesuai dengan tema target promosi layanan BBSPJPPI.
- Berkaitan dengan pelayanan publik kepada industri.

Terdapat anggaran operasional layanan di beberapa kegiatan layanan jasa teknis yang tidak terealisasi diantaranya pembelian sparepart peralatan uji yang tidak terealisasi dikarenakan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi dikarenakan proses pengadaan harus melalui inden (pelaksanaan berpotensi melewati tahun anggaran), sisa anggaran perjalanan kegiatan layanan sertifikasi, layanan optimalisasi teknologi industri dan perjalanan instruktur pendampingan teknis dikarenakan sudah tidak adanya permintaan layanan hingga akhir tahun

- Berkaitan dengan pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan.

Waktu pelaksanaan untuk pengadaan beberapa unit peralatan uji terbatas mengingat pelaksanaan pengadaan menunggu ketersediaan alokasi anggaran yang berasal dari pengalihan anggaran pembelian GCMS (pelaksanaannya menunggu ditandatanganinya kesepakatan kerjasama pengelolaan aset BLU dengan BBSPJIBBT. Kerjasama dengan BBSPJIBBT baru ditandatangani pada 27 September 2023)

Disamping itu, juga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi yang berasal dari selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran pada pengadaan peralatan uji laboratorium dan pengadaan fasilitas sarana pelayanan.

- Berkaitan dengan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan
Waktu pelaksanaan untuk proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan peningkatan kapasitas bangunan gedung BBSPJPPI yang terbatas mengingat pelaksanaan pengadaan menunggu ketersediaan alokasi anggaran yang berasal dari pengalihan anggaran pembelian GCMS. Disamping itu untuk persetujuan anggaran juga memerlukan clearance/persetujuan rekomendasi biaya dari Dinas PU Propinsi Jateng.
- Berkaitan dengan anggaran pelaksanaan pelatihan jabatan fungsional dan pelatihan teknis SDM, terdapat rencana pelatihan teknis peningkatan

kompetensi SDM internal yang tidak terlaksana dikarenakan ketidaktersediaan jadwal dan lingkup pelatihan yang dibutuhkan.

4. Tindak Lanjut

Perbaiki kinerja keuangan secara strategis untuk TA 2024 di periode akhir tahun anggaran perlu dilakukan identifikasi potensi sisa anggaran yang tidak terealisasi pada setiap kegiatan dan untuk selanjutnya dapat dilakukan realokasi anggaran dalam rangka mendukung optimasi kinerja penyerapan anggaran.

3.2.2 Realisasi Penerimaan PNBPNBP

1) Hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2023, realisasi penerimaan PNBPNBP periode 31 Desember 2023 memperoleh realisasi penerimaan sebesar Rp. 16.283.712.000,- atau 109,29% dari target penerimaan PNBPNBP yang sebesar Rp. 14.900.000.000,-. Komposisi penerimaan PNBPNBP pada satker BBSPJPPI masih belum proporsional untuk semua jenis layanan. Komposisi penerimaan jasa layanan utamanya masih ditopang dari jasa layanan pengujian (penanganan pencemaran, pengujian bahan dan barang, standarisasi pengujian mutu produk) dan layanan sertifikasi. Sementara realisasi terendah diperoleh dari pemberian jasa layanan kalibrasi. Sementara ditinjau dari realisasi penggunaan, belanja yang bersumber dari sumber anggaran PNBPNBP tercatat sebesar Rp. 14.148.520.315,- atau 94,96% dari pagu anggaran PNBPNBP tahun berjalan. Realisasi belanja PNBPNBP dipengaruhi oleh tingkat realisasi penerimaan PNBPNBP yang berasal dari realisasi pemberian jasa layanan pada tahun berjalan.

Tabel 46. Pagu dan Realisasi PNBPNBP Tahun 2023

Pagu	2023
Target Penerimaan (Rp)	14.900.000.000
Realisasi Penerimaan (Rp)	16.283.712.000
Realisasi Penerimaan (%)	109,29

Pagu	2023
Pagu Penggunaan (Rp)	14.900.000.000
Realisasi Penggunaan (Rp)	14.148.520.315
Realisasi Penggunaan (%)	94,96

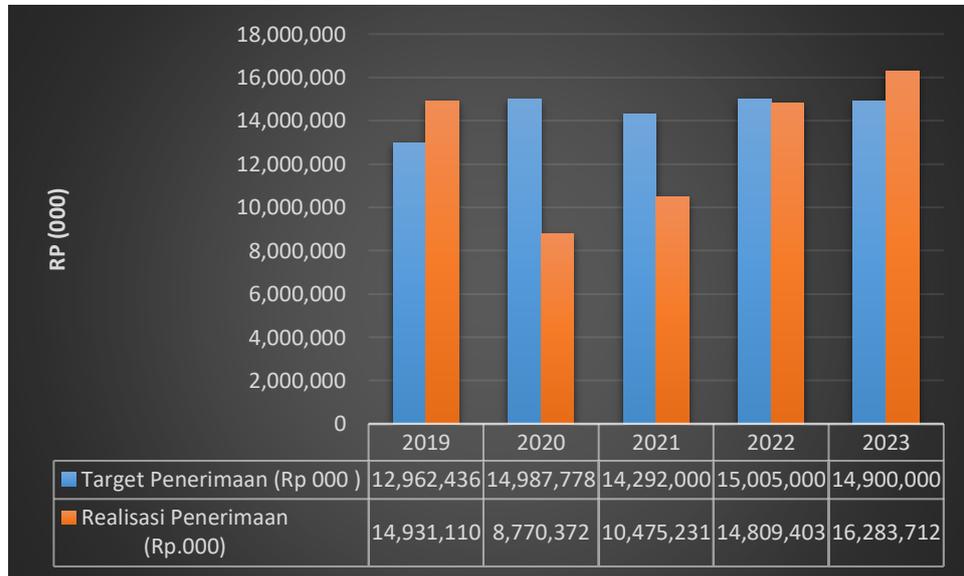
Berdasarkan data realisasi penerimaan jasa layanan tahun 2023, kontribusi atas capaian realisasi penerimaan tertinggi untuk lingkup Jasa Pelayanan Teknis Pengujian. Sedangkan kontribusi penerimaan layanan terendah yaitu Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi.

2) Analisis hasil yang telah dicapai

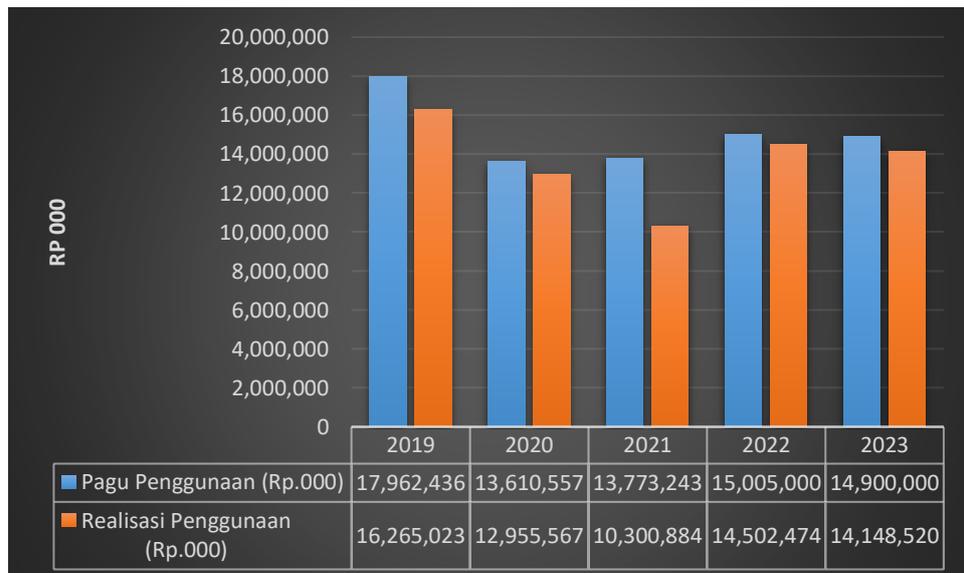
Tabel 47. Realisasi PNBP 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Target Penerimaan (Rp.000)	12.962.436	14.987.778	14.292.000	15.005.000	14.900.000
Realisasi Penerimaan (Rp.000)	14.931.110	8.770.372	10.475.231	14.809.403	16.283.712
Realisasi Penerimaan (%)	115,19	58,51	73,29	98,69	109,29
Pagu Penggunaan (Rp.000)	17.962.436	13.610.557	13.773.243	15.005.000	14.900.000
Realisasi Penggunaan (Rp.000)	16.265.023	12.955.567	10.300.884	14.502.474	14.148.520

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi Penggunaan (%)	108,93	147,71	98,33	97,92	94,96



Gambar 9. Target dan Penerimaan PNBP 2019 - 2023



Gambar 10. Pagu dan Penggunaan PNBP 2019-2023

Tabel 48. Perbandingan Penerimaan PNBP Tahun 2023 Satker BLU di lingkungan BSKJI

No	Satker BLU	Realisasi PNBP (Rp)
1	BBSPJPPI	16.283.712.001
2	BBSPJB4T	69.674.443.858
3	BBSPJIA	
4	BSPJI Lampung	5.165.883.349
5	BBSPJI Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	16.564.346.687
6	BSPJI Samarinda	6.178.518.153
7	BSPJI Jakarta	17.080.219.999
8	BSPJI Surabaya	22.018.049.507
9	BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan	10.165.305.680

Tabel 49. Penerimaan PNBP Sesuai Jasa Pelayanan Teknis TA 2019-2023

No	Uraian	Penerimaan PNBP (Rp. 000)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Optimalisasi Pemanfaatan teknologi	1.295.660	1.746.345	2.007.916	2.840.699	453.849.898
2	Pelatihan Teknik Operasional	69.350	54.997	103.552	211.470	315.230.000
3	Pengujian Bahan & Barang	1.056.047	1.669.102	1.672.654	1.213.742	1.079.956.
4	Konsultasi Keteknikan	6.000	92.685	-	87.930	366.627

No	Uraian	Penerimaan PNBP (Rp. 000)				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Standardisasi Penguji Mutu Produk	677.721	571.941	958.704	1.182.843	1.375.699
6	Kalibrasi	77.515	34.402	19.113	64.420	107.234
7	Sertifikasi Sistim Mutu	1.657.297	1.167.612	1.728.717	1.829.718	2.164.998
8	Rancang Bangun & Perekayasaan	359.086	268.142	250.305	180.060	87.222
9	Penanganan Pencemaran	9.313.835	2.963.028	3.672.745	7.114.214	10.478.498
10	Jasa Kegiatan Lainnya	198.754	15.824	45.666	12.294	114.081
	Jasa Giro BLU	218.082	186.291	15.857	72.009	69.117
	JUMLAH	14.929.346	8.770.372	10.475.231	14.809.403	16.283.712

Berdasarkan data histori penerimaan selama periode 2019-2023, penerimaan layanan tertinggi dicapai di tahun 2023 sementara capaian terendah pada tahun 2020 dimana pada saat tersebut merupakan masa awal pandemi Covid-19.

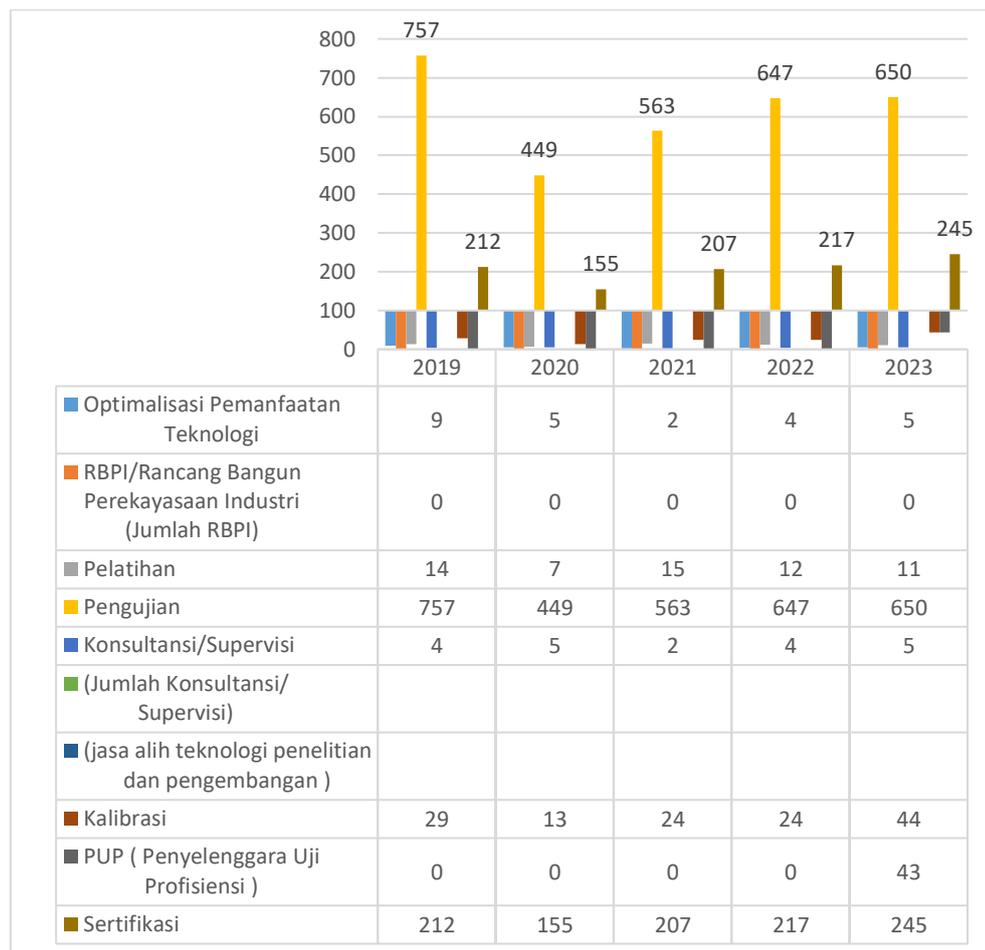
Realisasi penerimaan PNBP satker BBSPJPI selama 5 (lima) tahun terakhir masih utamanya ditopang dari layanan jasa teknis pengujian (penanganan pencemaran, pengujian bahan dan barang, standarisasi pengujian mutu produk)

Tabel 50 .Jumlah Pelanggan 2019-2023

No	Jenis JPT	Jumlah Pelanggan									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri
1	Optimalisasi Pemanfaatan teknologi	9	-	5	-	2	-	-	-	5	-
2	RBPI/Rancang Bangun Perekayaan Industri (Jumlah RBPI)	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Pelatihan	3	11	5	2	7	8	4	8	4	7
4	Pengujian	757		357	92	440	123	475	172	481	169
6	Konsultasi/Supervisi (Jumlah Konsultasi/Supervisi) jasa alih teknologi penelitian dan pengembangan	4		5	-	2	-	3	1	5	-
7	Kalibrasi (Sertifikat /Alat)	29		12	1	23	1	21	3	37	7
8	Sertifikasi	212	-	155	-	207	-	217	-	245	
9	Audit Energi									1	-
10	PUP (Penyelenggara Uji Profisiensi)	-	-	-	-	-	-	-	-	14	29

**Tabel 51. Jumlah Sampel/Alat/Sertifikat/Pelatihan/Riset/Konsultasi
 Tahun 2019-2023**

No	Jenis JPT	Jumlah Sampel/Alat/Sertifikat/Pelatihan/Riset /Konsultasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	9	5	2	4	5
2	RBPI/Rancang Bangun Perencanaan Industri (Jumlah RBPI)	-	-	-	-	-
3	Pelatihan					
	a. Jumlah pelatihan	14	7	15	12	11
	b. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	167	105	152	193	223
4	Pengujian					
	a. Jumlah Pelanggan	757	449	563	647	650
	b. Jumlah sampel uji	10829	4036	6986	7323	7131
5	Konsultasi/Supervisi (Jumlah Konsultasi/ Supervisi) (jasa alih teknologi penelitian dan pengembangan)	4	5	2	4	5
6	Kalibrasi (Sertifikat/Alat)					
	a. Jumlah pelanggan	29	13	24	24	44
	b. Jumlah alat	123	87	134	147	359
7	PUP (Penyelenggara Uji Profisiensi)	-	-	-	-	43
8	Sertifikasi					
	a. Jumlah pelanggan	212	155	207	217	245
	b. Jumlah sertifikat	174	91	167	167	229



Gambar 11. Jumlah Pelanggan per Jenis Layanan Teknis 2019-2023

Dari grafik diatas, jumlah pelanggan jasa layanan teknis BBSPJPPI yang tertinggi berasal dari layanan jasa Pengujian dan yang kedua pada jasa layanan sertifikasi.

3) Kendala

- Seiring dengan adanya pembatasan penerimaan sampel selama periode masa pandemi menyebabkan sebagian pelanggan layanan pengujian beralih ke laboraorium pengujian competitor.
- Adanya kompetensi dari kompetitor layanan yang sejenis (adanya himbauan dari DLH kepada industri untuk mengujikan di fasilitas laboratorium yang dimiliki DLH).
- Adanya kompetensi dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih murah.

- Masih terdapat piutang yang belum tertagih di tahun 2023 dikarenakan belum selesainya administrasi untuk proses penagihan pada pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di akhir tahun khususnya untuk kontrak kerjasama pemantauan lingkungan yang pelaksanaan pekerjaan baru diselesaikan pada akhir 2023 sehingga pembayaran oleh pelanggan diperkirakan baru dapat dilakukan pada awal 2024.

4) Tindak Lanjut

Rencana perbaikan pada tahun selanjutnya dalam mendorong peningkatan realisasi penerimaan PNBPN sebagai berikut:

- Melakukan monitoring piutang dan penyelesaian tagihan pembayaran piutang atas jasa layanan untuk memperlancar cash flow dan memberi kelonggaran operasional kegiatan yang bersumber dari sumber anggaran PNBPN. Kedepannya perlu dilakukan koordinasi intensif antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan ke pelanggan
- Meningkatkan promosi dan peningkatan kapasitas layanan melalui pengembangan jasa layanan sertifikasi halal, uji profesiensi, verifikasi GRK,TKDN dan komersialisasi produk inovasi teknologi.
- Promosi potensi pemberian jasa layanan baru kepada pelanggan.
- Koordinasi dengan BSKJI terkait mekanisme pemberian layanan verifikasi industri (penyusunan Peraturan Kepala Badan terkait tata cara pelaksanaan layanan verifikasi TKDN pada unit kerja di lingkungan BSKJI).
- Dilakukan koordinasi intensif berkala antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan untuk pekerjaan kontrak kerjasama pemantauan lingkungan.
- Penetapan tarif layanan terbaru melalui Keputusan Pimpinan BLU setelah terbitnya PMK tarif BLU.

3.3. Analisis Efisiensi

a. Analisis Efisiensi Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja

Berdasarkan target dan capaian Klasifikasi Rincian Output serta pagu dan realisasi anggaran TA 2023, maka dapat dihitung efisiensi sebagai berikut :

Tabel 52. Efektivitas dan Efisiensi Kinerja dan Anggaran TA.2023

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Kinerja				Efektivitas	Anggaran				Efisiensi	Indeks Biaya Target (IBT)	Indeks Biaya Realisasi (IBR)	Efisiensi Perjanjian/Renstra	Efisiensi IKU
	Target	Realisasi	%	%Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	%	Efisiensi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
BBSPJPPI														
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI												30,00 %	47,99 %	
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas														
1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (Persen)	2	80	4000 %	4000,00%	Efektif	100.470.000	100.360.342	99,89%	Efisien	50.235.000	1.254.504	97,50 %	97,50 %	
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0														
1 Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (Perusahaan)	1	1	100%	110,00%	Efektif	388.100.000	371.194.686	95,64%	Efisien	388.100.000	371.194.686	4,36%	4,36 %	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI



2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri(Perusahaan)	5	6	120%			129280000	109633534	84,80%		25.856.000	18.272.256	29,33%	29,33%
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri														
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi (Persen)	10	51,1	511,0%	278,10%	Efektif	92.043.000	90.265.812	98,07%	Efisien	9.204.300	1.766.454	80,81%	80,81%
2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri (Persen)	3	9,96	332%			405.070.000	395.168.159	97,56%		135.023.333	39.675.518	70,62%	70,62%
3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan(Persen)	2	2,34	117%			7.196.257.000	7.085.539.679	98,46%		3.598.128.500	3.028.008.410	15,84%	15,84%
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan	62	94,49	152,40%			2.635.838.000	2.511.168.250	95,27%		42.513.516	26.576.021	37,49%	37,49%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI



	barang dan jasa(Persen)													
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien														
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (Persen)	92,5	100	108,1 1%	108,1 1%	Efektif	26.545.000	26.253.282	98,9 0%	Efisien	286.973	262.533	8,52%	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan														
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (Indeks)	3,63	3,66	100,8 3%	100,8 3%	Efektif	5.870.500.00	5.617.760.657	95,6 9%	Efisien	1.617.21 7.631	1.534.90 7.283	5,09%	
Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional														
1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78	81,70	104,7 4%	104,7 4%	Efektif	14.953.012.00	14.733.759.736	98,5 3%	Efisien	191.705. 282	180.339. 776	5,93%	
Penguatan Layanan Publik														
1	Nilai minimal indeks layanan publik (Indeks)	4,35	4,84	111,2 6%	111,2 6%	Efektif	464.710.000	405.574.538	87,2 7%	Efisien	106.829. 885	83.796.3 92	21,56 %	
Penguatan Akuntabilitas Organisasi														

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 TAHUN ANGGARAN 2023
 BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI



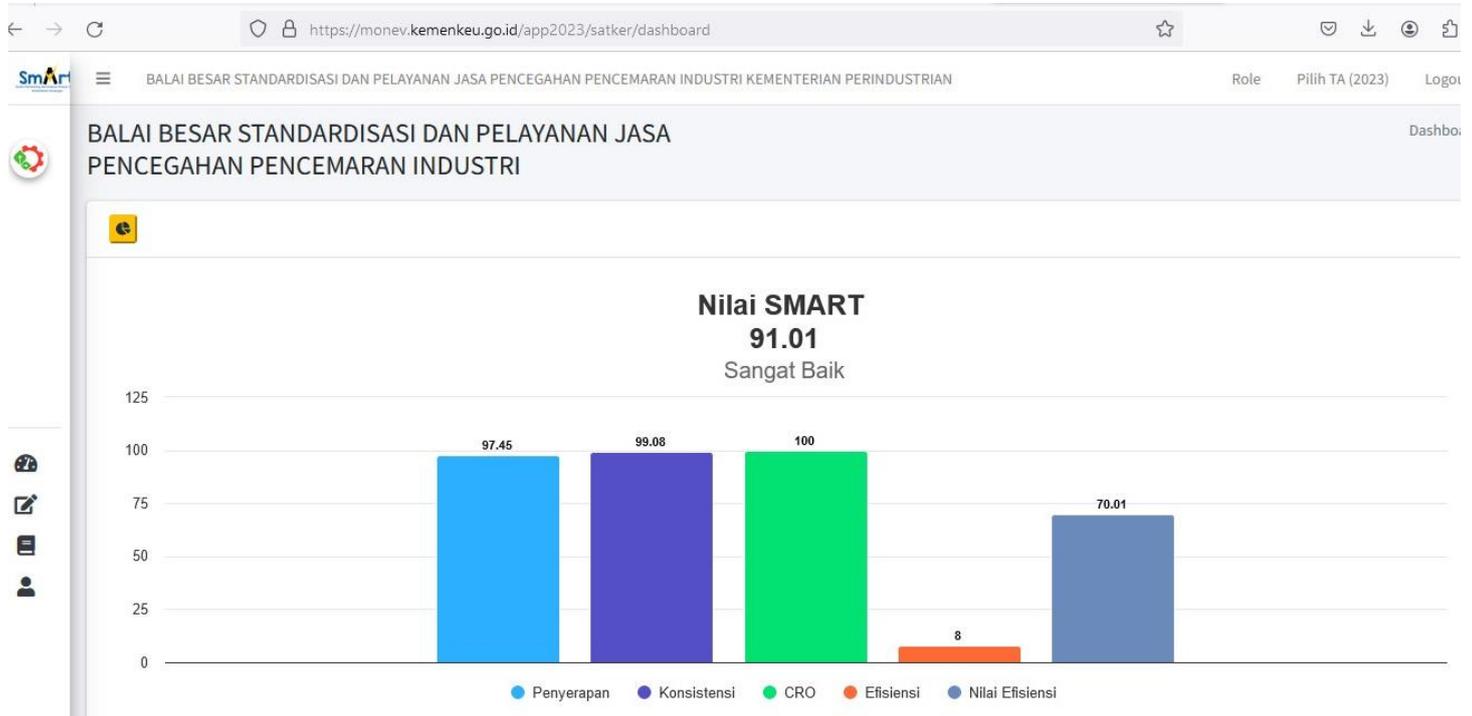
1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja (Nilai)	77,0	77,1	100,1 3%	103,3 3%	Efektif	46.000.000	42.925.284	93,3 2%	Efisien	597.403	556.748	6,81%	
2	Nilai minimal laporan keuangan (Nilai)	92	98	106,5 2%			103.800.000	103.773.908	99,9 7%		1.128.261	1.058.917	6,15%	
		%Rata-rata Capaian Kinerja		458,77%		Efektif	32.411.625.000	31.593.377.867	97,48%	Efisien				

Keterangan :

- Persentase Capaian Kinerja/Output < 100% : Tidak Efektif
- Persentase Capaian Kinerja/Output > 100% : Efektif
- Persentase Capaian Kinerja Output < Persentase Realisasi Anggaran: Tidak Efisien
- Persentase Capaian Kinerja Output > Persentase Realisasi Anggaran: Efisien

Kesimpulan dari perhitungan diatas , BBSPJPI capaian kinerjanya efektif dan efisien.

b. Efisiensi Anggaran Berdasarkan Aplikasi SMART



Gambar 12 Capaian Aplikasi SMART

Berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan, pada tahun 2023 nilai kinerja Satker BBSPJPI adalah sebesar 91,01 (sangat Baik). Realisasi CRO 100 % berarti mencapai target kinerja. Untuk penyerapan anggaran sebesar 97,45 %.

3.4. Penghargaan dari Luar instansi

a) Penghargaan Internal

1. BBSPJPI pengawas kearsipan internal kategori unit pengolah arsip peringkat I



2. Pegawai BBSPJPI sebagai arsiparis teladan kategori keterampilan peringkat 2



3. BBSPJPPI sebagai penyedia jasa konsultasi teknologi terbaik



b) Penghargaan Eksternal

1. LSPRO BBSPJPPI mendapat penilaian sangat baik dari Kementerian Perdagangan.

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

PENILAIAN KINERJA
LSPRO BBSPJPPI
SKOR 98
Sangat Baik

Terima kasih atas kerja smart dan kerja hebat tim. Semoga mendorong kinerja semakin lebih baik lagi.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: 1. KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU TERANGSI, PEMILAH INDUSTRI LEMBAGA PENILAIAN KEBERHASILAN DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU TAHUN 2024.
KESATU: 1. Berdasarkan hasil penilaian monitoring kinerja Lembaga Penilaian Kesuksesan terhadap tahun 2023, bahwa Lembaga Tersebut Produktif LSPRO Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang (BBSPJPPI Semarang) mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat "SANGAT BAIK" (skor 98).
KEDUA: 1. Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2024
DIREKTUR
STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU,

MATERAI HONORARIO PENERIMA

Berdasarkan Keputusan Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan Nomor 75 Tahun 2024

@BBSPJPPI_RI | BBSPJPPI Kemenperin | @bbspjppi_kemenperin | 082134525006

BAB. IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) pada tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan pengembangan dan penyelenggaraan jasa industri dan kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan Rencana Kinerja yang disusun.

Pada tahun 2023, dalam rangka perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja BBSPJPI telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) BBSPJPI TA 2023. Seluruh target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat tercapai.

Sementara itu dari sisi pelaksanaan anggaran, pada tahun 2023 telah dilakukan revisi anggaran pada DIPA BBSPJPI 2023 sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah pagu pada DIPA sesuai hasil revisi terakhir sebesar Rp. 32.411.625.000 yang terdiri dari pagu anggaran sumber Rupiah Murni sebesar Rp. 17.511.625.000,- dan sumber anggaran PNBPN tahun berjalan sebesar Rp. 14.900.000.000,-. Dari sisi kinerja layanan jasa teknis, realisasi penerimaan PNBPN tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 16.283.712.001,- atau tercapai 109,28% melebihi target penerimaan PNBPN tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp. 14.900.000.000,-. Penerimaan tertinggi di Jasa Pengujian sedangkan terendah pada jasa kalibrasi. Komposisi penerimaan PNBPN utamanya masih ditopang dari layanan jasa pengujian yang berkontribusi sebesar 79,43% dan layanan sertifikasi 13,30% dari total penerimaan di tahun 2023.

Adapun kinerja penyerapan anggaran, pada tahun 2023 realisasi anggaran BBSPJPI tercapai sebesar Rp. 31.593.377.867 atau sebesar 97,48% dari total pagu anggaran DIPA revisi terakhir dengan komposisi penyerapan sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 17.444.857.552,- (99,62%) dan sumber

anggaran PNBK tahun berjalan sebesar Rp. 14.148.520.315,- (94,96%). Capaian realisasi anggaran sebesar 97,48% tersebut di bawah target yang ditetapkan BSKJI yang sebesar 98,04%. Meskipun demikian, secara umum capaian fisik kegiatan tahun 2023 telah tercapai 100% yang ditandai dengan tercapainya seluruh target Rincian Output yang ditetapkan dalam DIPA BBSPJPI TA 2023.

4.2. Permasalahan dan Kendala

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja diantaranya pada pelaksanaan kegiatan kolaborasi dalam rangka mendukung upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri dan pencapaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri. Pada pelaksanaan kegiatan kolaborasi, terdapat kendala kesulitan pencarian Stakeholder/ dua pihak lain dengan kompetensi/keahlian sesuai yang dapat diajak bekerjasama untuk melakukan kegiatan kolaborasi. Sementara dari aspek pencapaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri, tingkat partisipasi pelanggan dalam pengisian dan pengembalian kuesioner kepuasan pelanggan yang rendah juga sempat berdampak pada pemenuhan ketentuan penilaian indeks kepuasan masyarakat.

Dari sisi aspek kinerja anggaran, tidak tercapainya target penyerapan anggaran terkendala dengan tidak teridentifikasinya sumber anggaran yang berpotensi tidak terserap hingga pada akhir periode anggaran pada beberapa pos kegiatan. Hal ini menyebabkan hingga akhir tahun anggaran tersebut tidak terserap dan berdampak pada kinerja anggaran secara keseluruhan. Disisi lain, dari pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa juga terdapat sisa pagu anggaran yang cukup signifikan pada beberapa pengadaan peralatan. Hal ini dikarenakan kekurangcermatan dalam penentuan HPS dalam pengadaan barang dan jasa sehingga terdapat selisih antara nilai kontrak dengan pagu anggaran yang tersedia. Pada kegiatan pengadaan barang jasa utamanya

pengadaan peralatan uji yang mayoritas pemenuhannya melalui mekanisme impor, juga terkendala pelaksanaan yang mendekati akhir tahun anggaran yang disebabkan ijin impor untuk penggunaan produk impor atau produk dengan nilai TKDN di bawah 25% pada pengadaan Barang dan Bahan/Produk/Peralatan di lingkungan BSKJI baru diperoleh pada 27 Juli 2023. Penyerapan anggaran yang kurang optimal juga terdapat pada kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM dimana beberapa rencana pelatihan teknis peningkatan kompetensi SDM internal yang tidak terlaksana.

4.3. Saran dan Rekomendasi

Mendukung pelaksanaan kolaborasi dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri, diperlukan peningkatan jejaring (networking) dengan lembaga/institusi lain sehingga dapat turut mendorong proses transfer informasi dan pengetahuan di bidang pengendalian dan penanganan pencemaran lingkungan. Dengan adanya jejaring juga akan membuka peluang terjadinya kolaborasi/sinergi kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi serumpun maupun dalam rangka saling melengkapi kompetensi masing-masing sehingga akan mendukung pencapaian kinerja kedua belah pihak serta kendala keterbatasan (dana, peralatan, kompetensi SDM) dapat teratasi.

Terkait pencapaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri, perlu dilakukan edukasi kepada pelanggan terkait upaya peningkatan dan perbaikan kualitas layanan diantaranya dengan memanfaatkan masukan perbaikan yang disampaikan pelanggan diantaranya melalui kuesioner kepuasan pelanggan. Disamping itu, upaya peningkatan partisipasi pelanggan dalam pengisian dan pengembalian kuesioner kepuasan pelanggan dapat diupayakan dengan memanfaatkan sistem informasi diantaranya melalui pengembangan sistem SINDIi sehingga kedepannya pelanggan yang

mengunduh LHU dapat langsung terkoneksi dengan pengisian kuesioner kepuasan pelanggan.

Untuk mendukung optimalisasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, masing-masing koordinator kegiatan agar lebih cermat dalam menyusun rencana kinerja berikut rencana penyerapan anggaran serta melakukan identifikasi atas potensi anggaran yang tidak terserap. Untuk selanjutnya, di periode akhir tahun anggaran tim pengelola keuangan BBSPJPI dapat melakukan identifikasi atas potensi sisa anggaran yang tidak terealisasi pada setiap kegiatan dan untuk berikutnya dapat dilakukan realokasi anggaran dalam rangka mendukung optimasi kinerja penyerapan anggaran.

Untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, mengantisipasi pengadaan barang yang pemenuhannya melalui mekanisme impor, kedepannya proses pengajuan ijin impor dapat dilakukan segera setelah terbitnya DIPA Petikan anggaran tahun berkenaan sehingga akan memberikan peluang waktu pelaksanaan untuk proses pengadaan yang lebih awal. Dari sisi pelaksanaan pengadaan, pejabat pengadaan dapat berkoordinasi dengan tim teknis dan melakukan survey harga pasar sehingga dalam proses penyusunan HPS dapat diperoleh harga pengadaan yang wajar.

Sementara untuk mengantisipasi tidak terlaksananya pelatihan teknis peningkatan kompetensi SDM internal maka kedepannya perlu dilakukan perencanaan program pengembangan kompetensi SDM internal dengan memperhatikan ketersediaan dan jadwal pelaksanaan pelatihan teknis oleh pihak/instansi Penyelenggara. Masing-masing bidang bertanggung jawab untuk mengusulkan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM atas personil di bidangnya kepada Tim Kelompok Kerja Kepegawaian.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sidik Herman

**Jabatan : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan
Pencemaran Industri**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Doddy Rahadi

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2023

**Kepala Badan Standardisasi dan
Kebijakan Jasa Industri**



Doddy Rahadi

**Kepala Balai Besar
Standardisasi dan Pelayanan Jasa
Pencegahan Pencemaran Industri**



Sidik Herman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2	Persen
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	5	Perusahaan
3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	10	Persen
		2. Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	3	Persen
		3. Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	1.940	SPK/Order
		4. Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	3	Ruang Lingkup
		5. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62	Persen
4.	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5	Persen
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,65	Indeks
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	Indeks
7.	Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal indeks layanan publik	4,51	Indeks
8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81,6	Nilai
		2. Nilai minimal laporan keuangan	95	Nilai

Total Anggaran Tahun 2023 : Rp. 32.370.086.000,-
(Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Jakarta, April 2023

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri



Doddy Rahadi

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri



Sidik Herman

MATRIKS KETERKAITAN IKU KEMENPERIN SAMPAI DENGAN UNIT KERJA BSKJI

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
SS1.	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SP1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
SS2.1	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) >3.0	SP2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Persentase jumlah perusahaan yang Produktivitas/efisiensinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0
								Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0
								Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri
								Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri
SS3.1	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri	Jumlah SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	SP3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
					Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi			Meningkatnya PNPB layanan jasa industri
		Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi			Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi			Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker
		<u>NON IKU</u>			<u>NON IKU</u>			<u>NON IKU</u>
SS7	Tersedianya regulasi pembangunan Industri yang efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	SP4.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektifitas regulasi standardisasi industri			
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SP5.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri			
SS9	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SP6.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
		Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian			Indeks Penerapan Manajemen Risiko BSKJI			
SS10	Terwujudnya ASN yang Profesional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	SP7.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI BESAR		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	SP8.	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang terpadu dan terintegrasi Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B Indeks manfaat kerja sama	SK7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai laporan keuangan BSKJI	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal laporan keuangan
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Capaian Perjanjian Kinerja Per Triwulan TA. 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						% Fisik		% Fisik		% Fisik		% Fisik	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2%	80%	4000%	20	15	40	20	70	70	100.00%	100.00%
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan	1 Perusahaan	100%	25	25	50	50	75	75	100.00%	100.00%
		2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi	5 Perusahaan	6 Perusahaan	120%	25	25	50	50	75	75	100.00%	100.00%
3	Meningkatnya Kemampuan Industri barang	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang	10%	51.10%	511%	25	25	50	50	75	75	100.00%	100.00%
		2. Meningkatkan PNBPN layanan jasa industri	3%	9.96%	332%	25	25	50	50	75	75	100.00%	100.00%
		3. Meningkatkan jumlah layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	2%	2.34%	117%	25	25	50	50	75	75	100.00%	100.00%
		4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62%	94.49%	152.40%	30	30	50	50	75	75	100.00%	100.00%
4	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92.50%	100%	108.10%	15	15	40	40	85	80	100.00%	100.00%
5	Terselenggaranya Urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.63	3.66	100.80%	25	25	50	50	75	75	100.00%	100.00%
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	81.7	104.70%	25	25	50	50	75	75	100.00%	100.00%
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal indeks layanan publik	4.35	4.84	111.30%	25	25	50	50	75	75	100.00%	100.00%
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77.1	77	100.10%	30	25	60	55	80	80	100.00%	100.00%
		2. Nilai minimal laporan keuangan	92	98	106.50%	35	35	60	60	80	80	100.00%	100.00%

Capaian Kinerja Renstra Satker BBSPJPPI TA. 2021-2024													
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021			2022			2023			2024	TOTAL 2021-2024		
	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi sd 2023	%
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non													
- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	NA			NA			2	80	4000.00	3			
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0													
- 1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	NA			NA			1	1	100.00	1	2	1	50.0
- 2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi	3	7	233.3	4	5	125	5	6	120.00	5	17	18	105.9
Meningkatnya Kemampuan Industri barang													
- 1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang	NA			10	18.38	183.8	10	51.1	511.00	11			
- 2. Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	2	26	1300	2	41.37	2068.5	3	9.96	332.00	4			
- 3. Meningkatnya jumlah layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	NA			NA			2	2.34	117.00	3			
- 4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	55	58	105.5	58	88.10	151.90	62	94.49	152.40	65	240	240.59	100.2
Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan													
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91.5	100	109.3	92	100	108.70	92.5	100	108.11	93	369	300	81.3
Terselenggaranya Urusan pemerintahan di Bidang													
Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.6	3.65	101.4	3.62	3.66	101.10	3.63	3.66	100.83	3.65	14.5	10.97	75.7
Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional													
Rata-rata indeks profesionalitas ASN	74	66	89.19	76	77.07	101.41	78	81.7	104.74	80	308	224.77	73.0
Penguatan Layanan Publik													
Nilai Minimal indeks layanan publik	4.20	4.30	102.4	4.30	4.56	106.05	4.35	4.84	111.26	4	17.25	13.7	79.4
Penguatan Akuntabilitas Organisasi													
1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80.50	82.44	102.4	81.00	81.65	100.80	77.00	77.10	100.13	80	318.5	241.19	75.7
2. Nilai minimal laporan keuangan	90.00	92.30	102.6	91.00	97.00	106.59	92.00	98.00	106.52	93	366	287.3	78.5

Keterangan :

Kolom 1 : Diisi oleh Sasaran Kegiatan(output)/ indikator pada Renstra Satker

Kolom 2,5,8,11 : Diisi oleh Target yang ada Pada Renstra

Kolom 3,6,9 : Diisi oleh Realisasi

Kolom 4,7,10 : Diisi % capaian(Realisasi :Target x 100%)

Kolom 12 : Total Target Renstra 2021-2024

Kolom13: Realisasi Renstra 2021-2023

Kolom 14: Diisi % capaian (realisasi sd 2023 dibagi jumlah target 2021-2024)(Realisasi :Target x 100%)

**CAPAIAN KEGIATAN PRIORITAS SATKER BSKJI
TA 2023**

Unit	KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)	DIPA			Output			
			PAGU	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
BBSJPPI	6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri							
	6077.QD1	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	192,513,000	190,626,000	99.02	10	51,1	Persen	511
	002	Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultasi							
	053	Jasa Konsultasi Program DAPATI							
	A	Jasa Konsultasi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol	100,470,000	100,360,342	99.89				
	B	Konsultasi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium dan Garam Aneka Industri	92,043,000	90,265,812	98.07				

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021				2022				2023				2024				TOTAL 2021-2024			
	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas																				
Peningkatan kapasitas hasil kelaborasi dalam rangka pengembangan industri	80,000,000	210,910,600	185,821,503	88,10	100,000,000	219,870,000	215,140,806	97,85					100,000,000	100,470,000	100,360,342	99,89				
Produktivitas efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kelaborasi																				
2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0																				
Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	430,570,000	448,585,000	96,977,840	21,62	433,820,000	192,530,000	189,124,866	98,23	433,820,000				433,820,000	1,732,030,000			1,158,495,000		766,930,926	66,20
Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0																				
Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi																				
3 Meningkatkan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri																				
Produktivitas efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi																				
Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2,074,855,000	6,786,123,000	5,881,933,918	86,68	1,619,635,000	4,714,538,000	4,701,468,023	99,72	6,339,370,000	405,070,000	395,168,159	97,56	6,320,900,000	16,354,760,000	11,905,731,000	10,978,570,100				92,21
Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	7,561,688,000	661,976,000	416,995,490	62,59	5,468,938,000	1,825,820,000	1,801,848,841	98,69	7,672,459,000	7,196,297,000	7,085,539,679	98,46	10,775,000,000	31,478,076,000	9,684,047,000	9,304,384,010				96,08
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	592,030,000	2,728,723,000	1,730,972,794	63,44	2,786,240,000	3,966,530,000	3,808,556,930	96,02	915,610,000	2,635,838,000	2,511,168,250	95,27	841,240,000	5,135,120,000	9,331,091,000	8,050,697,974				86,28
4 Terecapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien																				
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh sarikat	24,060,000	63,920,000	28,879,176	45,18	48,440,000	28,540,000	27,952,303	97,94	61,680,000	26,545,000	26,253,282	98,30	61,680,000	195,860,000	119,005,000	83,084,761				69,82
5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan																				
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	5,604,757,000	555,515,000	254,183,493	45,76	5,981,765,000	300,660,000	293,610,624	97,66	5,932,050,000	5,870,500,000	5,617,760,657	95,69	6,451,487,000	23,970,059,000	6,726,675,000	6,165,554,774				91,66
6 Tervujudnya ASN BSKJI yang Profesional																				
Rata-rata indeks profesionalitas ASN	132,293,000	132,293,000	85,932,356	64,96	422,770,000	336,530,000	325,886,893	96,84	425,420,000	14,953,012,000	14,733,759,736	98,53	425,420,000	1,405,903,000	15,421,535,000	15,145,578,985				98,21
Nilai disiplin pegawai	12,311,585,000	12035262000	11,821,877,700	98,23	14,132,264,000	14,147,380,000	14,102,415,082	99,68	17,043,450,000											
7 Penguatan Layanan Publik																				
Nilai minimal indeks layanan publik	686,135,000	5,966,917,000	5,341,411,145	89,52	516,680,000	5,610,920,000	5,324,912,000	94,9	751,340,000	464,710,000	405,374,538	87,27	716,680,000	2,670,835,000	12,042,547,000	11,071,807,683				91,94
8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi																				
Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81,430,000	41,570,000	7,031,000	16,91	68,690,000	33,900,000	33,775,481	99,63	72,545,000	46,000,000	42,925,284	93,32	72,545,000	295,210,000	121,470,000	83,731,765				68,93
Nilai minimal laporan keuangan	107,385,000	55,000,000	55,000,000	100	114,780,000	114,780,000	114,701,918	99,93	114,780,000	103,800,000	103,773,008	99,97	114,780,000	451,725,000	273,580,000	273,475,826				99,96

Realisasi Keuangan Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
						Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2%	80%	1.Jasa Konsultansi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol	100,470,000	100,360,342	99.89
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1.Layanan Konsultansi Dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	388,100,000	371,194,686	95.64
		2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi	5 Perusahaan	6 Perusahaan	1.Jasa Pelayanan Bimbingan Dan Pendampingan Teknis Industri	129,280,000	109,633,534	84.80
3	Meningkatnya Kemampuan Industri barang	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang	10%	51.10%	1.Konsultansi Optimalisasi Proses Produksi Garam	92,043,000	90,265,812	98.07
		2.Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	3%	9.96%	1.Pemasaran, Promosi, Publikasi Dan Pembinaan Hubungan Pelanggan Layanan Teknis	405,070,000	395,168,159	97.56
		3.Meningkatnya jumlah layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	2%	2.34%	1.Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian 2.Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran 3.Layanan Pengujian Aneka Komoditi 4.Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi 5.Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Lembaga Sertifikasi 6.Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 7.Layanan Sertifikasi Produk 8.Layanan Sertifikasi Industri Hijau 9.Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan 10.Layanan Sertifikasi Halal	7,196,257,000	7,085,539,679	98.46
		4.Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62%	94.49%	1.Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan 2.Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga 3.Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 4.Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran 5.Peningkatan Kapasitas	2,635,838,000	2,511,168,250	95.27

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
						Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92.50%	100%	1.Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	26,545,000	26,253,282	98.90
5	Terselenggaranya Urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.63	3.66	1.Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 2.Langganan Daya Dan Jasa 3.Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor 4.Pemeliharaan Kendaraan Operasional 5.Pemeliharaan Alat Laboratorium 6.Pemeliharaan Sarana Kantor 7.Pengadaan Bahan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 8.Pemeliharaan Poliklinik	5,870,500,000	5,617,760,657	95.69
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	81.7	1.Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pppk 3.Pengelolaan/manajemen Sdm 4.Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional 5.Pelatihan Dan Pendidikan	14,953,012,000	14,733,759,736	98.53
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal indeks layanan publik	4.35	4.84	1.Pengelolaan Data Dan Informasi 2.Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah/ Buku 3.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona	464,710,000	405,574,538	87.27
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77.1	77	1.Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	46,000,000	42,925,284	93.32
	2.Nilai minimal laporan keuangan	92	98	1.Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan	103,800,000	103,773,908	99.97

- Indikator tujuan tidak perlu dihitung realisasi keuangannya
-Realsasi keuangan per indikator

Keterangan :

Kolom 2 : Diisi oleh Sasaran Kegiatan

Kolom 3: Indikator Kinerja

Kolom 4 : Target

Kolom 5 : Realisasi

**Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan
Tahun 2023**

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen	Anggaran (Rp)(000)	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)		% Realisasi Ouput
		Keuangan		Keuangan		Keuangan		Keuangan		
		T	R	T	R	T	R	T	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	9,770,125									
1 AEF Sosialisasi dan Diseminasi	405,070	0.45	0.45	7.48	4.54	4.51	14.73	82.65	84.72	150% dari 100 Orang
2 BAD Pelayanan publik kepada industri	7,713,637	25.42	23.82	22.12	28.72	26.64	41.56	25.07	25.97	119,5% dari 794 industri
3 CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1,458,905	-	-	-	-	-	1.56	100	93.57	125 % dari 4 industri
4 QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	192,513	-	-	22.03	8.51	38.22	48.79	42.72	41.74	100% 2 industri
Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	22,641,500									
1 EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	20,235,432	19.13	16.54	30.59	29.52	22.26	26.96	28.29	29.34	100% 3 layanan
2 EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,111,773	-	-	41.23	-	63.76	91.77	85.95	83.73	100% 115 Unit
3 EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1,083,510	11.07	6.44	43.53	24.16	19.87	29.36	70.63	55.12	112,6 % dari 190 Orang
4 EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Industri	210,785	20.95	19.94	41.19	29.39	20.45	16.93	34.01	30.87	100 % 8 dokumen

Realisasi Anggaran Kegiatan TA. 2023

Komponen/ Subkomponen/		Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1		2	3	4
A.				
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	405,070,000	395,168,000	97.56
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	7,713,637,000	7,552,499,000	97.91
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1,458,905,000	1,401,552,000	96.07
6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	192,513,000	190,626,000	99.02
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20,235,432,000	19,847,066,000	98.08
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	1,111,773,000	1,087,049,000	97.78
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1,083,510,000	915,569,000	84.50
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	210,785,000	203,845,000	96.71
	Total	32,411,625,000	31,593,374,000	95.95

Efektivitas dan Efisiensi Kinerja dan Anggaran TA.2023

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Kinerja				Efektivitas	Anggaran			Efisiensi	Indeks Biaya Target (IBT)	Indeks Biaya Realisasi (IBR)	Efisiensi Perjakin/ Renstra	Efisiensi IKU
	Target	Realisasi	%	%Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Balai.....												30.00%	47.99%
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING													
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan													
1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (Persen)	2	80	4000%	4000.00%	Efektif	100470000	100360342	99.89%	Efisien	50,235,000	1,254,504	97.50%	97.50%
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0													
1 Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (Perusahaan)	1	1	100%	110.00%	Efektif	388100000	371194686	95.64%	Efisien	388,100,000	371,194,686	4.36%	4.36%
2 Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri(Perusahaan)	5	6	120%			129280000	109633534	84.80%		25,856,000	18,272,256	29.33%	29.33%
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi (Persen)	10	51.1	511.0%	278.10%	Efektif	92043000	90265812	98.07%	Efisien	9,204,300	1,766,454	80.81%	80.81%
2 Meningkatnya PNPB layanan jasa industri (Persen)	3	9.96	332%			405070000	395168159	97.56%		135,023,333	39,675,518	70.62%	70.62%
3 Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan(Persen)	2	2.34	117%			7196257000	7085539679	98.46%		3,598,128,500	3,028,008,410	15.84%	15.84%
4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa(Persen)	62	94.49	152.40%			2635836000	2511168250	95.27%		42,513,516	26,576,021	37.49%	37.49%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN													
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (Persen)	92.5	100	108.11%	108.11%	Efektif	26545000	26253282	98.90%	Efisien	286,973	262,533	8.52%	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang													
1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (Indeks)	3.63	3.66	100.83%	100.83%	Efektif	5870500000	5617760657	95.69%	Efisien	1,617,217,631	1,534,907,283	5.09%	
Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional													
1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78	81.70	104.74%	104.74%	Efektif	14953012000	14733759736	98.53%	Efisien	191,705,282	180,339,776	5.93%	
Penguatan Layanan Publik													
1 Nilai minimal indeks layanan publik (Indeks)	4.35	4.84	111.26%	111.26%	Efektif	464710000	405574538	87.27%	Efisien	106,829,885	83,796,392	21.56%	
Penguatan Akuntabilitas Organisasi													
1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja (Nilai)	77.0	77.1	100.13%	103.33%	Efektif	46000000	42925284	93.32%	Efisien	597,403	556,748	5.81%	
2 Nilai minimal laporan keuangan (Nilai)	92	98	106.52%			103800000	103773908	99.97%		1,128,261	1,058,917	5.15%	
			%Rata-rata Capaian Kinerja	458.77%	Efektif	32,411,625,000	31,593,377,867	97.48%	Efisien				

Keterangan :

Persentase Capaian Kinerja/Output < 100% : Tidak Efektif

Persentase Capaian Kinerja/Output > 100% : Efektif

Persentase Capaian Kinerja Output < Persentase Realisasi Anggaran: Tidak Efisien

Persentase Capaian Kinerja Output > Persentase Realisasi Anggaran: Efisien



REKAPITULASI BERITA 2023

DETIK FINANCE

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6893600/kemenperin-pakai-teknologi-digital-buat-pantau-polusi-udara-jakarta>

detikfinance Home Ekonomi Bisnis Finansial Infrastruktur Energi Industri Fintech Infogral

Kemenperin Pakai Teknologi Digital buat Pantau Polusi Udara Jakarta

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance

Kamis, 24 Agu 2023 11:50 WIB



Ilustrasi polusi. (Foto: Getty Images/Stockphoto/CreativImages)

Jakarta - Kementerian Perindustrian memanfaatkan teknologi khusus

ANTARA NEWS

<https://m.antaranews.com/berita/3693795/kemenperin-terapkan-teknologi-pemantauan-kualitas-udara-aims>

English Terkini Terpopuler Top News Pilihan Editor otomotif.antaranews.com antarafoto.com



HOME POLITIK HUKUM EKONOMI - METRO - SEPAKBK

ANTARA > Ekonomi > Bisnis > Kemenperin terapkan teknologi pemantauan kualitas udara AiMS

Kemenperin terapkan teknologi pemantauan kualitas udara AiMS

Rabu, 23 Agustus 2023 19:37 WIB



Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita sedang meluncurkan AiMS pada Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023. (ANTARA/HO Kementerian Perindustrian)

“ AiMS merupakan produk buatan dalam negeri sebagai sistem mitigasi pencemaran lingkungan.... ”

BERITAAJA.COM

Kemenperin terapkan teknologi pemantauan kualitas udara AiMS - Beritaja

4 bulan yang lalu

Beranda > Ekonomi > Kemenperin terapkan teknologi pemantauan kualitas udara AiMS - Beritaja



beritaja.com

AiMS merupakan produk buatan dalam negeri sebagai sistem mitigasi pencemaran lingkungan....

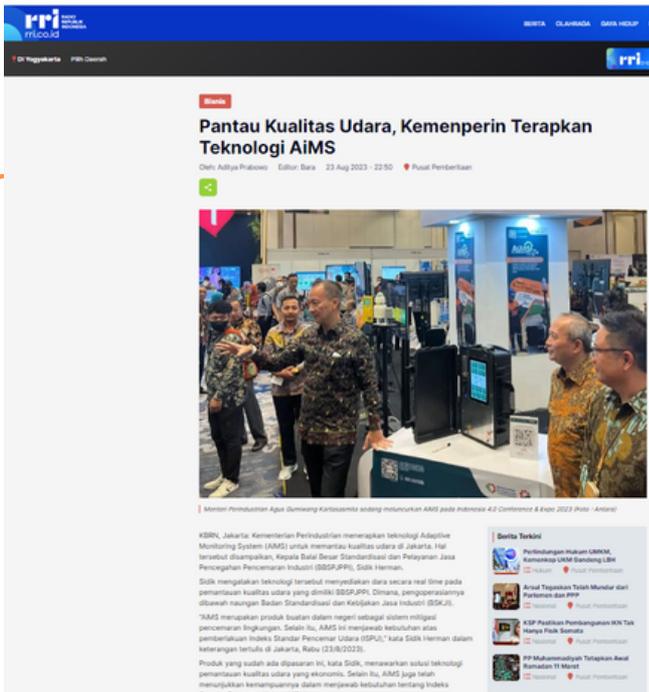
Jakarta (BERITAJA.COM) -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) menerapkan teknologi pemantauan kualitas udara berjudukan *Adaptive Monitoring System (AiMS)*.

Produk inovatif berbasis *IoT (Internet of Things)* itu menyediakan info *real time* pada pemantauan kualitas udara dimiliki oleh unit satuan kerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) Semarang, nang beraksi di bawah naungan BSKJI.

https://www.beritaja.com/kemenperin-terapkan-teknologi-pemantauan-kualitas-udara-aims-beritaja-71891.html#google_vignette

RRI.GO.ID



<https://www.rri.go.id/di-yogyakarta/bisnis/332214/pantau-kualitas-udara-kemenperin-terapkan-teknologi-aims>

ELSHINTA.COM

Dalam Negeri Luar Negeri Peristiwa Sepakbola Olahraga Hiburan Gaya Hidup IPTEK Perempuan Multimedia Pemilu Nusantara Ekspor



Search for
 1. TOP 10 STOCKS TO BUY > 3. FINANCIAL HARDHIP LOANS >
 2. APPLY FOR EMERGENCY LOAN > 4. TOP FUNDS TO INVEST IN >
 LifeStyle Insights

Kemenperin terapkan teknologi pemantauan kualitas udara AIMS

IPTEK | Sign Kusumas | 23 Agustus 2023 - 22:12 WIB

Elshinta.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) menerapkan teknologi pemantauan kualitas udara

Trending



Rekor dunia minum es teh terbanyak pecah di Semarang
 13 Januari 2024 9:36



Hasto klaim kepala daerah yang tak berpikuk ke Prabowo-Gibran dicopot

REALITARAKYAT.COM

<https://realitarakyat.com/2023/08/atasi-polusi-di-dki-kemenperin-terapkan-teknologi-pemantauan-kualitas-udara-aims/>

RR.COM

HOME NASIONAL DAERAH EKONOMI POLITIK HUKUM BAGAM OLARAHAGA LUAR NEGERI

Beranda > Lingkungan >

Atasi Polusi di DKI, Kemenperin Terapkan Teknologi Pemantauan Kualitas Udara AIMS

Sugandi - Lingkungan, Metropolitan
 24 Agustus 2023

Komentar

BAGIKAN f t w



uttrai polusi udara. iher

BERITA POPULER

- #1 Komisi II DPD Ingatkan ASN Soal Netralitas di Pemilu 2024
18 Januari 2024
- #2 Mengkaji: UMKK Jadi Elemen Kunci Pengembangan Potensi Desa
11 Januari 2024
- #3 Rumah di Sebelah RS Syuhada Gaza Dibom Israel, 40 Orang Dilaporkan Tewas
11 Januari 2024
- #4 PILPRES 2024 — Soal Pemimpin harus Sabar, Ganjar Sepakat dengan 3K
11 Januari 2024
- #5 FORMULA 1 — Aston Martin Pastikan Kembali Lebih Kuat di Musim 2024
11 Januari 2024

LIFESTYLE

- Saran Psikolog dalam Membuat Resolusi Tahun Baru, Begini Katanya!
1 Januari 2024
- Dalam Memisahkan

Search...

BERANDA PROFIL REGULASI UNIT KERJA KEGIATAN INFORMASI PUBLIK PUBLIKASI HUBUNGI KAMI LINKS PETA SITUS

SIARAN PERS

Lewat Kolaborasi, Kemenperin Wujudkan Komunitas Industri Hijau

Jumat, 1 Desember 2023



Sektor industri di Indonesia berperan vital sebagai penopang utama dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang diorientasikan untuk mendukung peningkatan kinerja dan daya saing, sehingga menjaga kelangsungan dan keberlanjutan sektor industri.

"Kebijakan pengembangan industri saat ini sudah berada pada jalur yang benar atau on the right track. Hal ini ditunjukkan pada sejumlah capaian positif dari kinerja industri manufaktur nasional," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (1/12).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 5,20 persen (y-on-y) pada triwulan III tahun 2023, yang melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen pada periode yang sama. Artinya, sektor manufaktur di tanah air masih bergelut di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.

Kemenperin menegaskan, guna lebih memacu performa industri manufaktur nasional, salah satu hal yang perlu

Twitter

Tweets from @Kemenperin_RI

Kemenperin @Kemenperin... - Jul 9, 2019
 Selamat sore. Sob! siapa nih yg dari kema cemas dgn regulasi kontrol #IMEI?

Tak usah panik atau khawatir ya sob, krn kebijakan ini akan diberlakukan scr bertahap & pastinya bertujuan utk melindungi konsumen & industri

Cek infografis di bawah utk mengetahuinya

#Infoperin



691 669

KEMENPERIN.GO.ID

<https://kemenperin.go.id/artikel/24453/Lewat-Kolaborasi,-Kemenperin-Wujudkan-Komunitas-Industri-Hijau>

GATRA.com



GATRA.COM

https://www.gatra.com/news-586812-ekonomi-lewat-kolaborasi-kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau.html#google_vignette



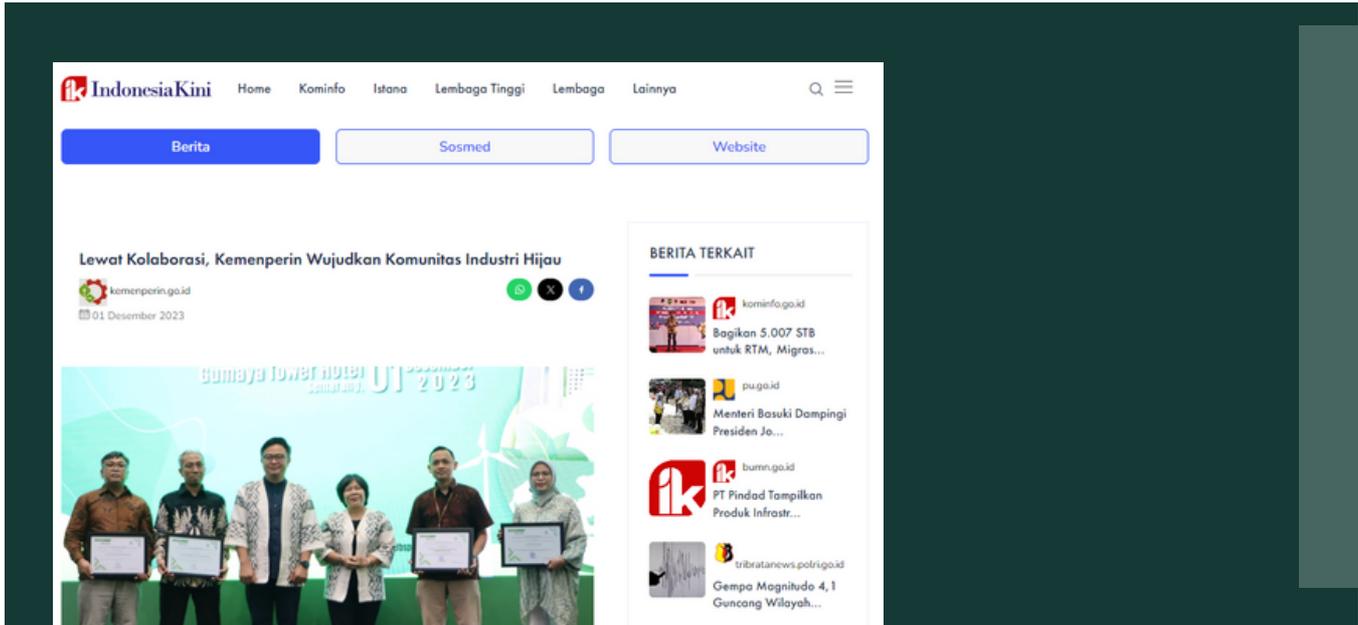
KOMPAS.COM

<https://money.kompas.com/read/2023/12/02/162904826/lewat-kolaborasi-kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau>



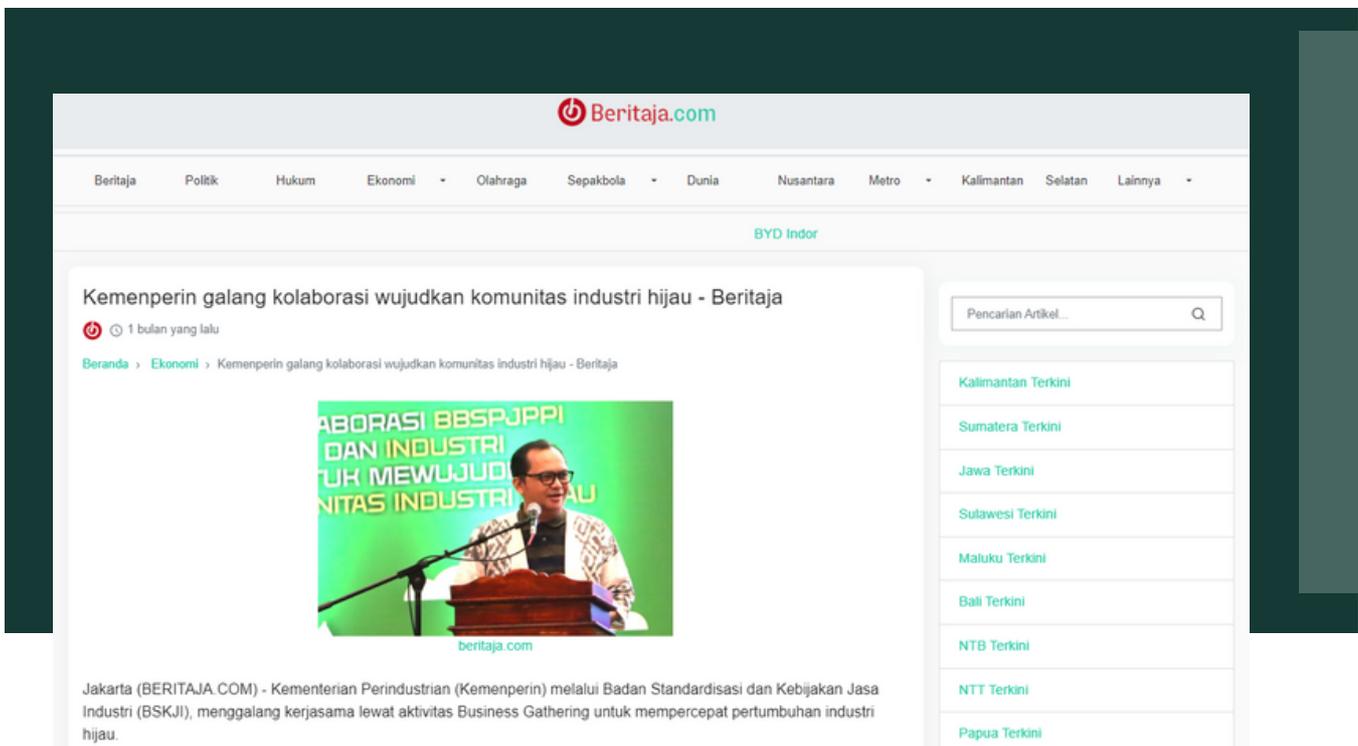
ANTARA.COM

<https://money.kompas.com/read/2023/12/02/162904826/lewat-kolaborasi-kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau>



INDONESIAKINI.GO.ID

<https://indonesiakini.go.id/berita/9500574/lewat-kolaborasi-kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau>



BERITAAJA.COM

<https://www.beritaja.com/kemenperin-galang-kolaborasi-wujudkan-komunitas-industri-hijau-beritaja-110359.html>

TRIBUNNEWS.COM

<https://m.tribunnews.com/bisnis/2023/12/01/ciptakan-komunitas-industri-hijau-bskji-kemenperin-dorong-unit-kerja-tingkatkan-layanan>

Tribunbisnis

Home > Bisnis > Industri

Ciptakan Komunitas Industri Hijau, BSKJI Kemenperin Dorong Unit Kerja Tingkatkan Layanan

Jumat, 1 Desember 2023 16:35 WIB [Baca di App](#)

Editor: **Sanusi**

[f](#) [X](#) [WhatsApp](#) [Telegram](#) [in](#)

HO

JAWAPOS.COM

<https://www.jawapos.com/ekonomi/013350447/pacu-daya-saing-kemenperin-dorong-konsep-industri-hijau>

Ekonomi

Pacu Daya Saing, Kemenperin Dorong Konsep Industri Hijau

Agfi Sagittian - Jumat, 1 Desember 2023 | 17:30 WIB

[f](#) [X](#) [WhatsApp](#)

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mencoba fasilitas Virtual Reality (VR) pada pameran teknologi 4.0 dalam rangkaian Indonesia 4.0 Conference and Expo 2023. (ANTARA/HO Kementerian Perindustrian)



KONTAN.CO.ID

<https://pressrelease.kontan.co.id/news/lewat-kolaborasi-kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau>



MEDIAINONESIA.COM

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/634262/lewat-kolaborasi-kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau>



INTERNATINALMEDIA.CO.ID

<https://internationalmedia.co.id/kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau/>

VALIDNEWS.ID

<https://validnews.id/ekonomi/wujudkan-komunitas-industri-hijau-kemenperin-galang-kolaborasi>

Selamat Pagi
VALIDNEWS^{id} Jumat, 19 Januari 2024

Beranda > Ekonomi > Berita
EKONOMI
01 Desember 2023 | 19:50 WIB

Wujudkan Komunitas Industri Hijau, Kemenperin Galang Kolaborasi

Prinsip industri hijau fokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat
Editor: Faisal Rachman

KOLABORASI BBSPJPP DAN INDUSTRI UNTUK MEWUJUDKAN KOMUNITAS INDUSTRI HIJAU

Dipala Photo: Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (SKJJI) Andi Rizaldi dalam acara Business Gathering di Semarang, Jumat (1/12/2023) oleh: Kemenperin

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), menggalang kolaborasi lewat kegiatan *Business Gathering* untuk mempercepat pertumbuhan

Ekstensi Bonsai Tak Pernah Mati

TERPOPULER

- Gempa Tojo One-una Akibat Sesar Aktif Lokal
- MAMI Optimisita Perekonomian RI Akan Tumbuh Stabul Pada 2024
- Gemera Biss Alami Gangguan Pendengaran Permanen
- APFBI Ragu Target Okupansi 90% pada 2024 Tak Tercapai
- Kajagung Tetapkan Budi Seld Tersangka Korupsi Emas Antam
- Kajagung Tetapkan Budi Seld Tersangka Korupsi Emas Antam
- Horor "Pemandi Jenazah" Tayang Bioskop 22 Februari
- Analisa: Investor Miliki Peran Penting Dalam Perubahan Iklim

MERDEKANNEWS.CO

<https://m.merdekanews.co/read/25337/Kemenperin-Wujudkan-Komunitas-Industri-Hijau-Lewat-Kolaborasi>

MERDEKANNEWS.CO

Home Terpopuler Indeks Cari Berita

Empul Berita Network MERDEKA NEWS.CO iKN.id offshore Rakyat

Kemenperin Wujudkan Komunitas Industri Hijau Lewat Kolaborasi

Jumat, 01 Desember 2023 - 17:05 WIB

KOLABORASI BBSPJPP DAN INDUSTRI UNTUK MEWUJUDKAN KOMUNITAS INDUSTRI HIJAU

Wujudkan Komunitas Industri Hijau
Gala Pembukaan
01 Desember 2023

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi memukul gong tanda pembukaan acara *Business Gathering* dengan tema "Kolaborasi BBSPJPP dan Industri untuk Mewujudkan Komunitas Industri Hijau" dengan disaksikan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, M. Rum (kiri) dan Kepala BBSPJPP Semarang, Sidik Herman (kanan) di Semarang, Jumat (1/12).



PelakuBisnis
Info Bisnis Tersaji Tuntas .COM

Gunakan Terus!!
Kartu Anggota Alfamidi

Daftar member Alfamidi dari Aplikasi Midi Kring yak perlu kartu bisa scan dari aplikasi.

DOWNLOAD SEKARANG

LAPORAN UTAMA EKIBIS ENERGI DAERAH LIFESTYLE UKM UPDATE OPINI VIDEO

PelakuBisnis
Info Bisnis Tersaji Tuntas .COM
300X250
ADVERTISE HERE

Lain-lain
Kerajaan Aspal - Jasa Pengaspalan
Kerajaan Gitar - Toko Gitar

LATEST ARTICLES

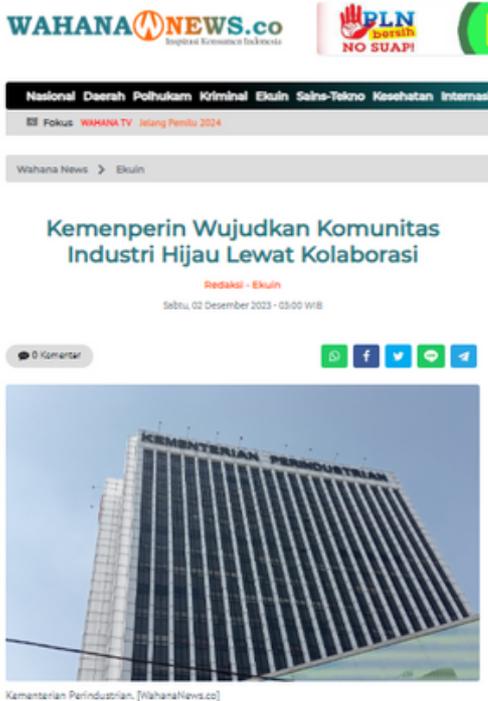
Update
Kemenperin Wujudkan Komunitas Industri Hijau
December, 2023 | adminina | Industri Hijau, Industri manufaktur, komunitas industri hijau, pertumbuhan industri hijau

Kawasan Industri Terpadu Batang Segera Beroperasi Tahun Ini Daerah

PIS Luncurkan 2 Tanker Gas

PELAKUBISNIS.COM

<https://pelakubisnis.com/2023/12/kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau/>



WAHANANEWS.co
Berita Ekonomi Indonesia

PLN
BERSIH
NO SUAPI

Nasional Daerah Polhukam Kriminal Ekuin Sains-Tekno Kesehatan Internasi

Fokus WAHANA TV Jelang Pemilu 2024

Wahana News > Ekuin

Kemenperin Wujudkan Komunitas Industri Hijau Lewat Kolaborasi
Redaksi - Ekuin
Sabtu, 02 Desember 2023 - 03:00 WIB

0 Komentar



Kementerian Perindustrian. [WahanaNews.co]

WAHANANEWS.CO

https://wahananews.co/ekuin/kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau-lewat-kolaborasi-0gijpZJb9D#google_vignette

RM.ID

<https://rm.id/baca-berita/government-action/199712/lewat-kolaborasi-kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau>#google_vignette

RM.id | PARLEMEN | PEMILU | GOVERNMENT ACTION | PARPOL | EKONOMI BISNIS | NASIONAL | INTERNASIONAL

BREAKINGNEWS | Angit, Timnas Garuda Wajib Menang | Jadwal Dan Zona Kampanye

Lewat Kolaborasi, Kemenperin Wujudkan Komunitas Industri Hijau

Reporter & Editor : ADITYA NUGROHO | **Government Action**

Jumat, 1 Desember 2023 15:49 WIB

Kepala BSKJI Kemenperin, Andi Rizaldi. (Foto: Ist)

KORAN-JAKARTA.COM

<https://koran-jakarta.com/penerapan-industri-hijau-pacu-daya-saing?page=all>

KORAN-JAKARTA
Keberanian Itu Tidak Pernah Memihak!

KAWAL PEMILU | NASIONAL | MONDIAL | **EKONOMI** | MEGAPOLITAN | OLAHRAHA | RONA | THE ALUN-ALUN | KUPAS | SPLASH | WISATA | PERSPEKTIF | WAWANCARA | FOTO | VIDEO | INFOGRAFIK

CITIZEN JOURNALISM
Jumlahnya warga bahwa...
AYO MENJADI BAGIAN DARI KORAN JAKARTA
CARANYA MUDAH BANGET

Sektor Manufaktur Penerapan Industri Hijau Pacu Daya Saing

© Sabtu, 02 Des 2023 08:31 WIB | Waktu Baca 2 menit

Foto: ISTIMEWA

POPULER DI EKONOMI



Lewat Kolaborasi Unit Kerja Ini, Kemenperin Ingin Wujudkan Komunitas Industri Hijau



Manufaktur (foto: dok. Antara)

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya agar industri manufaktur nasional tetap berpegang pada prinsip industri hijau. Prinsip industri hijau yang dimaksud berfokus pada efisiensi serta efektivitas sumber daya dan fungsi lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat.

TAG TERPOPULER

#ganjar pranowo
#pasta hawanda

VOI.ID

<https://voi.id/ekonomi/335305/lewat-kolaborasi-unit-kerja-ini-kemenperin-ingin-wujudkan-komunitas-industri-hijau>

EKONOMI

BREAKING NEWS Dekan Pertanian UB Beberkan Sederet Kesalahpahaman soal Food Estate Survei Bloomberg: Ekonom Pilih Anies untuk Gantikan Jokowi seba

Jaga Pertumbuhan, Kemenperin Wujudkan Komunitas Industri Hijau

Sektor industri dituntut untuk mengadopsi berbagai standarisasi serta teknologi industri hijau.

Kahfi - Bisnis.com Sabtu, 2 Desember 2023 11:05



Industri hijau/Ilustrasi



Nyaman tanpa iklan, Langganan BisnisPro

TERPOPULER

- 1 Survei Bloomberg: Ekonom Pilih Anies untuk Gantikan Jokowi sebagai Presiden RI
- 2 Menhub Ungkap Temuan Awal Penyebab Kecelakaan Kereta di Cicalengka & Tanggulangin
- 3 Virali Menteri Basuki Dibujuk Mundur Kabinet Jokowi, PUPR Buka Suara
- 4 Duh! Media Asing Sebut Dinasti Politik Jokowi Bakal Rugikan Ekonomi RI

EKONOMI.BISNIS.COM

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20231202/257/1720289/jaga-pertumbuhan-kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau>

Mewujudkan Komunitas Industri Hijau Lewat Kolaborasi

By Redaksi
DES 1, 2023 Agus Gumilang Kartasasmita, #Andi Rizaldi, #Badan Pusat Statistik (BPS), #Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), #Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSP/JPP) Semarang, #Industri Hijau, #M Rum, #Sidiq Herman



EKONOMI.BISNIS.COM

[ekonomi.bisnis.com
https://ekonomi.bisnis.com/read/20231202/257/1720289/jaga-pertumbuhan-kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau](https://ekonomi.bisnis.com/read/20231202/257/1720289/jaga-pertumbuhan-kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau)

AGROFARM.CO.ID

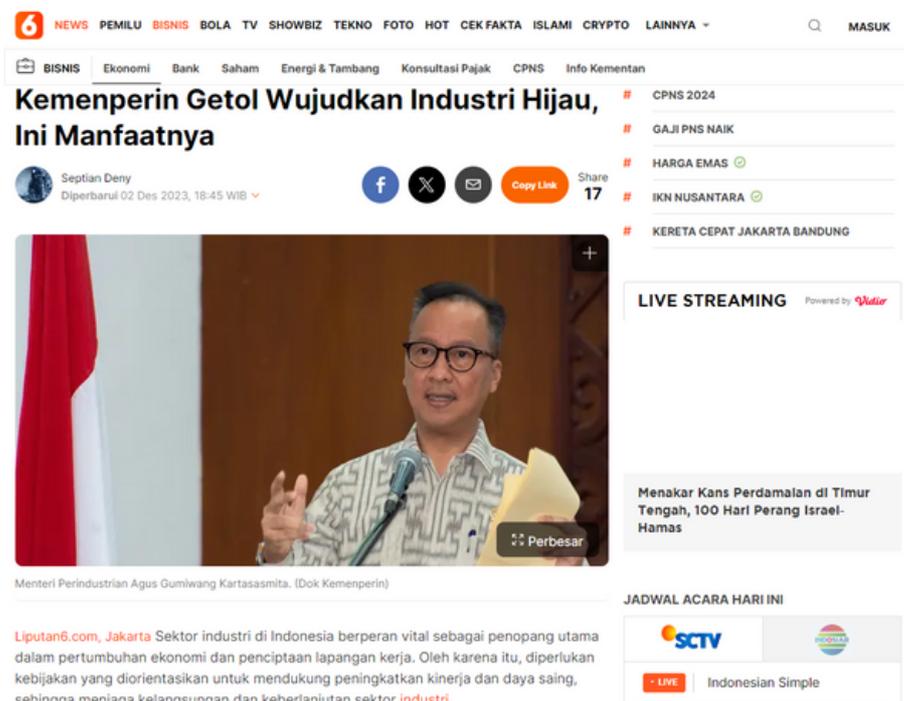
<https://www.agrofarm.co.id/2023/12/lewat-kolaborasi-kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau/>



The screenshot shows the Agrofarm website interface. At the top, there is a search bar and the date 'Jumat, 19 Januari 2024'. Below the navigation menu, the article title is 'Lewat Kolaborasi, Kemenperin Wujudkan Komunitas Industri Hijau' dated '1 Desember, 2023'. The main image shows a man in a patterned batik jacket speaking at a podium. The background of the image has text: 'KOLABORASI BBSPJPP DAN INDUSTRI TUH MEWUJUDKAN KOMUNITAS INDUSTRI HIJAU'.

LIPUTAN6.COM

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5470707/kemenperin-getol-wujudkan-industri-hijau-ini-manfaatnya>



The screenshot shows the Liputan6.com website. The article title is 'Kemenperin Getol Wujudkan Industri Hijau, Ini Manfaatnya' by Septian Deny, updated on '02 Des 2023, 18:45 WIB'. The main image shows the same man from the Agrofarm article speaking at a podium. The website header includes navigation links like 'NEWS', 'PEMILU', 'BISNIS', etc. On the right, there is a 'LIVE STREAMING' section with a 'MASUK' button and a 'JADWAL ACARA HARI INI' section featuring 'SCTV' and 'Indonesia Simple'.



INDONESIAUPDATE.CO.ID

<https://www.indonesiaupdate.id/2023/12/02/kemenperin-wujudkan-komunitas-industri-hijau/>



INDUSTRY.CO.ID

<https://www.industry.co.id/read/128353/hebat-kinerja-manufaktur-ciamik-menperin-agus-efek-kebijakan-industri-yang-on-the-right-track>



BBSPJPI dalam MEDIA 2023

BBSPJPI Kementerian Perindustrian RI
602134525006
bbspjpi.kemperin@gmail.com
kemperin.go.id
6 Semarang



JANUARI 2023



5 JANUARI 2023

SERAH TERIMA DOKUMEN
PERSETUJUAN TEKNIS
DENGAN RS KEN SARAS



13 JANUARI 2023

PENJAJAKAN KERJA SAMA
DAN STUDI TIRU
LABORATORIUM
LINGKUNGAN DENGAN BP
BATAM

FEBRUARI 2023



2 FEBRUARI 2023

Kunjungan dan Knowledge Sharing dari AKAFARMA 17 Agustus 1975 Semarang

9 FEBRUARI 2023

Studi tiru dari BBSPJPIHPMM diskusi mengenai pelaksanaan penerapan BLU di BBSJPP.



Badan Layanan Umum



10 FEBRUARI 2023

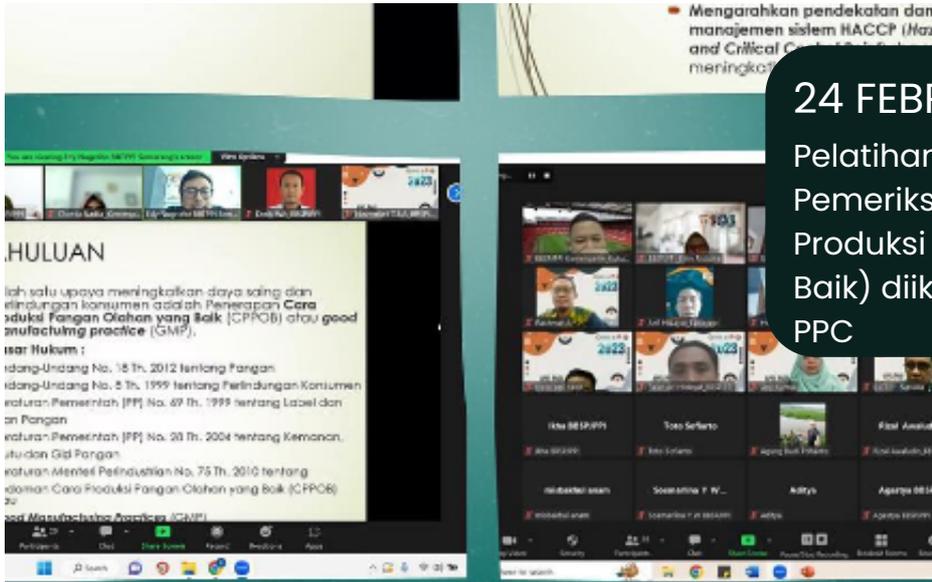
Pengarahan dari Ka BSKJI dan perpisahan untuk Ibu Emmy Suryandari

15 - 17 FEBRUARI 2023

Asesmen dokumen Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BBSPJPPi review simulasi SIHALAL oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)



FEBRUARI 2023



24 FEBRUARI 2023

Pelatihan teknis mengenai Pemeriksaan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) diikuti oleh para auditor dan PPC

27 FEBRUARI 2023

Rapat Tinjauan Manajemen Lembaga Pemeriksa Halal BBSPJPI.



15 - 17 FEBRUARI 2023

Rapat Komite Pengamanan Ketidakberpihakan dan Monev Standar Pelayanan Publik BBSPJPI

MARET 2023



6 MARET 2023

Kunjungan kerja koordinasi dari Dinperinaker Kab. Brebes kerjasama dan knowledge sharing kegiatan terkait tata cara penerapan teknologi Pencegahan dan dampak Pencemaran Industri



14 MARET 2023

Dalam rangka membangun Zona Integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), Balai Sains dan Bangunan PUPR melakukan studi tiru melalui Knowledge Sharing dengan BBSPJPI



15 - 17 MARET 2023

Biro Humas Kemenperin telah menyelenggarakan sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Sarana Prasarana Kelompok Rentan yang diselenggarakan di kantor BBSPJPI



14-17 MARET 2023

BBSPJPI bekerjasama dengan PT Telkomsel dalam acara Grand Launching PIDI 4.0 oleh Kementerian Perindustrian

APRIL 2023

3 APRIL 2023

Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) dan disaksikan secara hybrid (offline dan online) para pejabat di lingkungan BSKJI



ONTOH

Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BESAR STANDARDISA
N PELAYANAN JASA
AN PENCEGHAHAN



10 APRIL 2023

Pelatihan Teknis Petugas Pengambil Contoh Air Limbah bersama dengan PT. Perkebunan Nusantara IX.

11 APRIL 2023

Dharma Wanita Persatuan (DWP) BBSPJPI kembali melakukan santunan melalui kegiatan Tali Kasih yang serentak dilaksanakan oleh satker balai di lingkungan BSKJI



MEI 2023



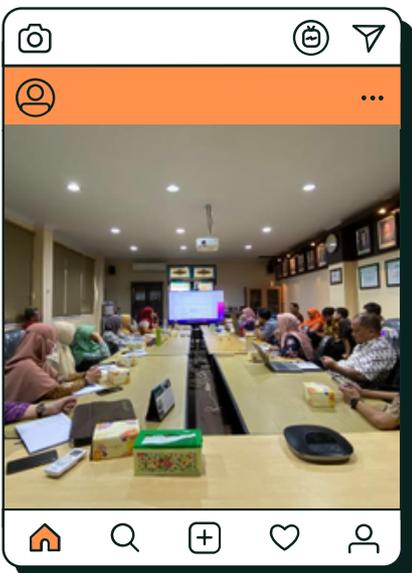
2 Mei 2023

➤ Kunjungan Kerja dan Halal Bihalal Kepala BSKJI beserta Ketua DWP BSKJI dan jajarannya



7 Mei 2023

➤ Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BBSPJPI telah sah mendapatkan status akreditasi dengan diteruskannya sertifikat akreditasi kepada LPH BBSPJPI



10 - 11 Mei 2023

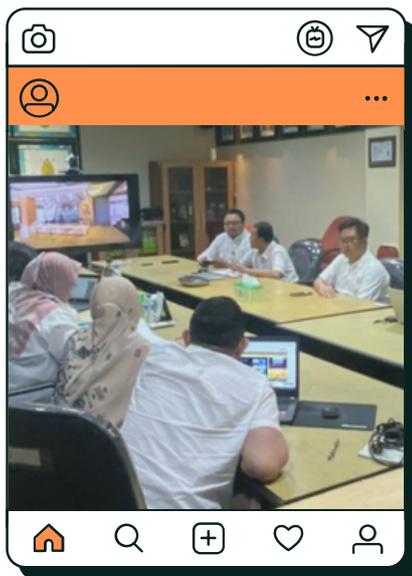
➤ Pelatihan ISO 17043 (Persiapan Penyelenggara Uji Profisiensi). Pelatihan ini diikuti oleh pegawai BBSPJPI

MEI 2023



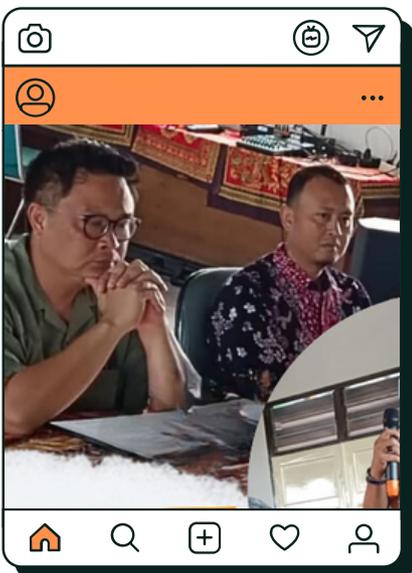
9-12 Mei 2023

Pameran Produk Industri Halal yang berlokasi di Plaza Pameran Industri Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan



30 Mei 2023

Studi lapangan untuk pengembangan model Data Analitik BLU Rumpun Penyedia Barang/Jasa Lainnya oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) Kementerian Keuangan



31 Mei 2023

Sosialisasi Penerapan Penegakkan Disiplin Pada Masa Transisi Endemi Covid-19 di Lingkungan Kemenperin

JUNI 2023



14 JUNI 2023

Kunjungan dan diskusi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait audit teknologi dengan BBSPJPI



14 JUNI 2023

kunjungan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh. Tujuan dari kunjungan ini adalah konsultasi dan sharing knowlegde dalam rangka pengembangan Laboratorium Kesehatan Lingkungan



13 - 14 JUNI 2023

In house training; Pelatihan Metode Pengecekan Antara, Evaluasi Hasil Kalibrasi, dan Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran dengan PT. Mitratekindo

JUNI 2023



21 JUNI 2023

Kunjungan dan studi banding dari Politeknik ATK Yogyakarta



26-27 JUNI 2023

Peningkatan kompetensi SDM melalui Pelatihan Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017



23 JUNI 2023

Kunjungan Industri Dharmawanita Persatuan BSKJI - Semarang

JULI 2023

6 JULI 2023
Kunjungan delegasi Colombo Plan 2023 dalam penyelenggaraan program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan Triangular berupa kegiatan Knowledge Sharing Program on Enhancing the Development of Small and Medium Industry 2023



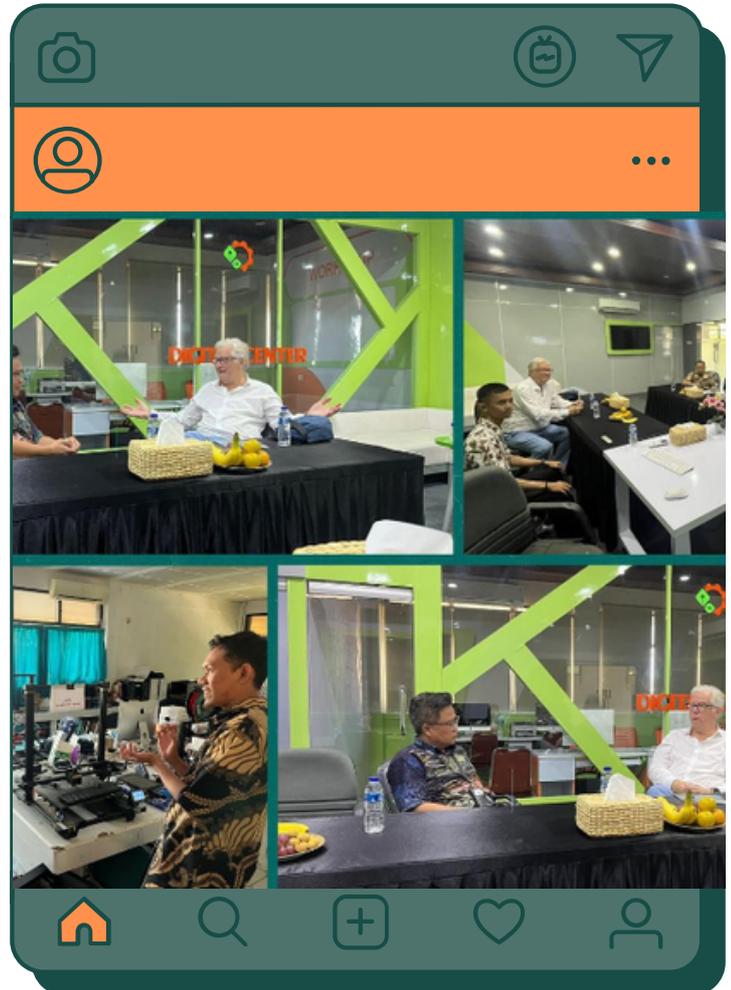
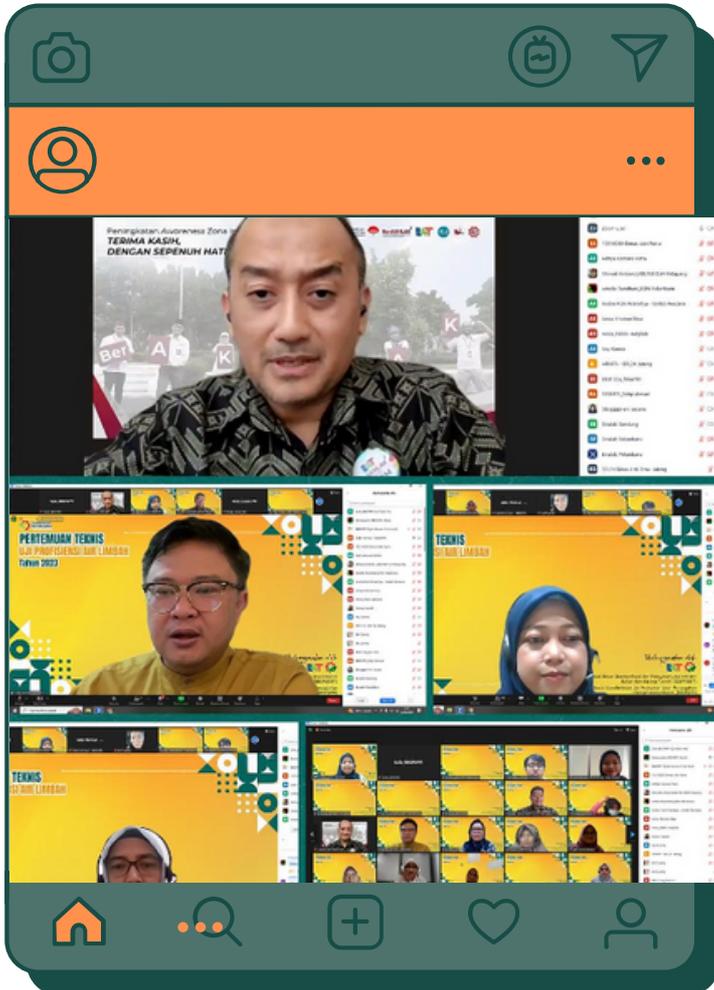
17-18 JULI 2023
Inhouse Training Petugas Pengambil Contoh Air dan Air Limbah



31 JULI 2023
Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi "Usaha Bersama" BBSPJPI



AGUSTUS 2023



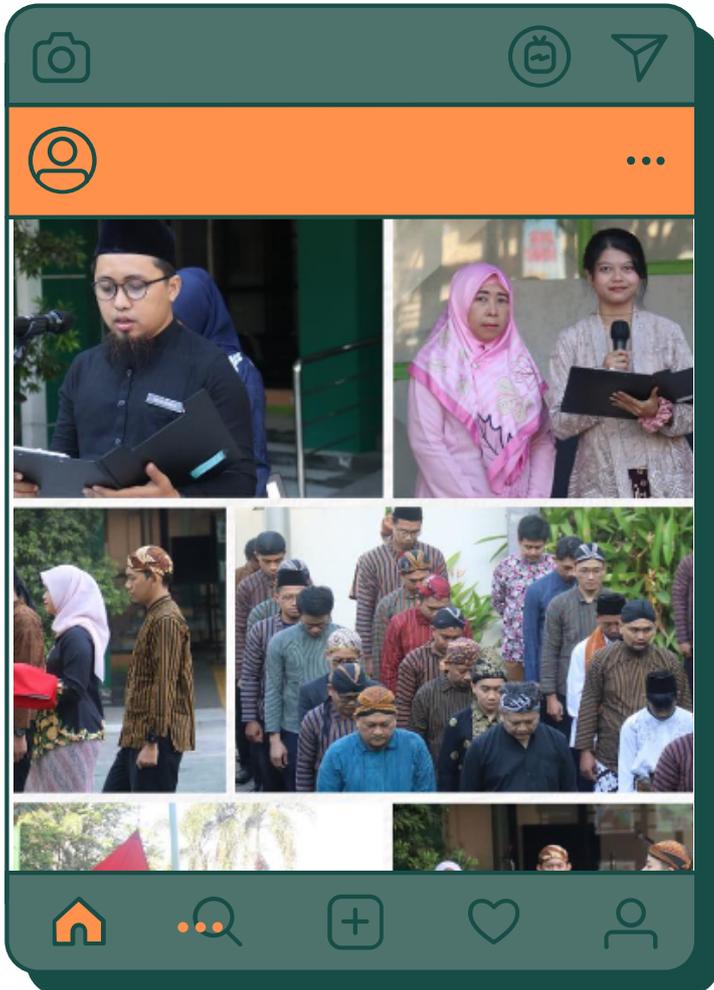
2 AGUSTUS 2023

PERTEMUAN TEKNIS UJI PROFISIENSI AIR LIMBAH TAHUN 2023. PROGRAM INI TERSELENGGARA SEBAGAI KOLABORASI B4T DAN BBSPJPI

9 AGUSTUS 2023

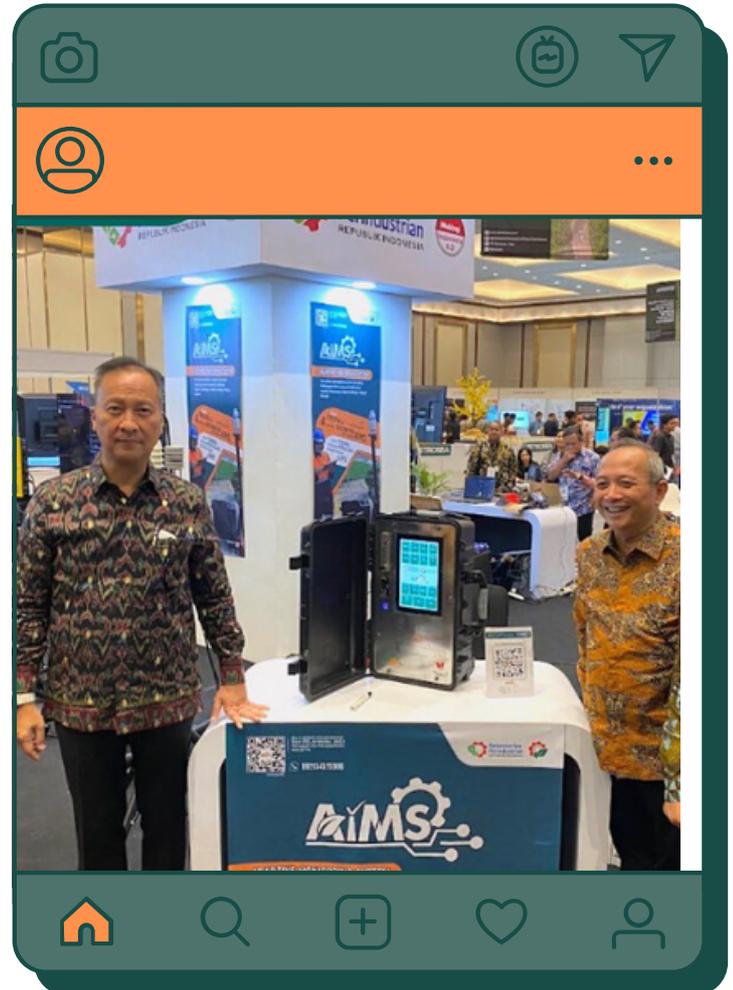
PENJAJAKAN KERJASAMA ANTARA BBSPJPI DAN BIA (BENELUX INDONESIA ASSOCIATION)

AGUSTUS 2023



17 AGUSTUS 2023

UPACARA PERINGATAN
HARI KEMERDEKAAN
INDONESIA



23-24 AGUSTUS 2023

BBSPJPI SEMARANG TURUT
BERPARTISIPASI DALAM
PAMERAN INDONESIA 4.0
CONFERENCE & EXPO 2023
YANG DISELENGGARAKAN DI
GRAND BALLROOM,
JAKARTA INTERNATIONAL
EXPO (JIEXPO)

SEPTEMBER 2023



7 SEPTEMBER 2023

Kunjungan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

8 SEPTEMBER 2023

BBSPJPI bersama dengan ASOKAS (Asosiasi Kafe Semarang) berdiskusi memberikan awareness terkait IPAL dan pengolahan limbah yang dibutuhkan oleh ASOKAS



14 SEPTEMBER 2023

Rapat koordinasi mengenai penguatan materi serta persiapan pelatihan dan pembahasan dokumen mutu ISO/IEC 17025:2017 bersama BP Batam



18-19 SEPTEMBER 2023

In house training mengenai ISO SNI/IEC 17025:2017 di Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia



SEPTEMBER 2023



20 SEPTEMBER 2023

Audit surveilen ISO 9001 oleh LS B4T-SC

21 SEPTEMBER 2023

Kepala BSKJI meninjau dan meresmikan laboratorium air dan air limbah yang telah direnovasi



26 DAN 27 SEPTEMBER 2023

Surveilen oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

27 SEPTEMBER 2023

Kegiatan Tepang Taun, Temu Pelanggan tahun 2023 bersama BBSPJIBBT, BBLM, dan BBSPJPP



OKTOBER 2023



02 S.D 06 OKTOBER 2023

In house training; Pelatihan ISO 17025:2017 & Audit Internal dengan Laboratorium Uji BP Batam.



13 OKTOBER 2023

Pelatihan Simulasi Kebakaran dalam rangka Mitigasi bencana oleh internal BBSPJPI



16 OKTOBER 2023

Kunjungan dari Sekretaris Jenderal DPR RI dalam rangka Benchmarking Pembangunan Zona Integritas



18 OKTOBER 2023

Sosialisasi pelaporan dan inspeksi di Kawasan Industri Lippo Cikarang

OKTOBER 2023



19 OKTOBER 2023

Evaluasi kertas kerja emisi dan dokumen lingkungan di PT. Tirta Intimizu Nusantara



16 – 19 OKTOBER 2023

In house training; Pelatihan Pengujian Parameter Air Seri 1 : BOD, COD, TSS, Amoniak dengan Laboratorium Uji BP Batam



16-20 OKTOBER 2023

Uji Relative Accuracy Test Audit (RATA) pada Continuous Emission Monitoring System (CEMS) di area PT Kilang Pertamina Internasional RU IV.



24 – 26 OKTOBER 2023

In house training; Pelatihan Pengujian Parameter Air Seri 2 : Logam dengan AAS, Nitrat, Nitrit, Minyak dan Lemak, MBAS dengan Laboratorium Uji BP Batam

NOVEMBER 2023

6 NOVEMBER 2023

Knowledge sharing WBBM kepada BBSPJILM



7 NOVEMBER 2023

Persiapan audit kearsipan internal Tahun 2024 serta terkait rencana Pembuatan Ruang Arsip Terpadu di BBSPJPI Semarang, pegawai BBSPJPI melaksanakan Pembinaan Kearsipan

6-9 NOVEMBER 2023

In house training Validasi/Verifikasi Metode Uji dan Jaminan Mutu Pengujian dengan Laboratorium Uji BP Batam



NOVEMBER 2023

17 NOVEMBER 2023

Sehubungan dengan proses akreditasi laboratorium lingkungan, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon melaksanakan studi tiru kepada laboratorium lingkungan



29 NOVEMBER 2023

Upacara bendera dalam rangka HUT KORPRI yang Ke-52

28 – 29 NOVEMBER 2023

Bimbingan Teknis Pengambilan Contoh Air Limbah dan Air Sumur dengan Laboratorium Pengujian Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.



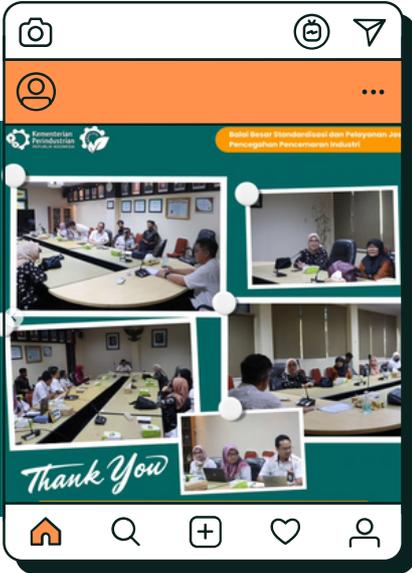
NOVEMBER 2023

1 NOVEMBER 2023

Program Studi Teknologi
Pengolahan Karet dan Plastik
(TPKP) Politeknik ATK
Yogyakarta melakukan studi
banding laboratorium di
BBSPJPI Semarang dalam
akreditasi ISO/IEC 17025:2017
Laboratorium Pengujian Fisis.



DESEMBER 2023



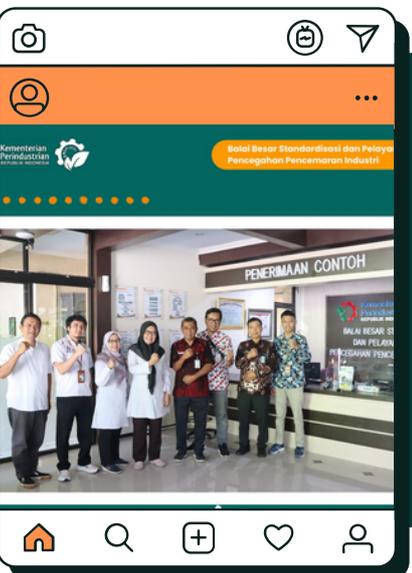
28 Desember 2023

Kunjungan Politeknik ATI Padang dalam rangka Benchmarking Pengelolaan Limbah



29 Desember 2023

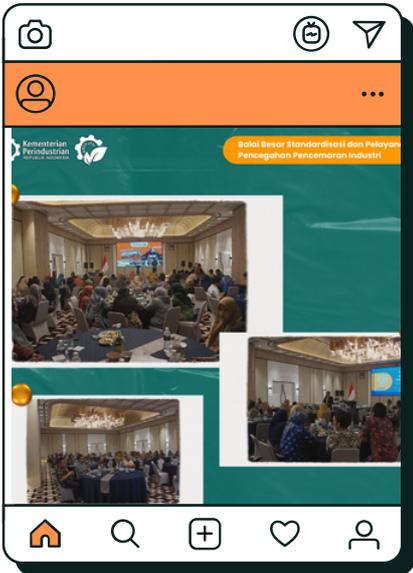
Knowledge sharing kepada BBSPJIKB perihal Jasa Layanan Sertifikasi



22 Desember 2023

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam Konsultasi dan diskusi terkait Teknologi Pengolahan Air Limbah BBSPJPI

DESEMBER 2023



Desember 2023

Diklat motivasi kinerja dan sosialisasi pegawai BBSPJPI di Batu Malang



19 Desember 2023

Peningkatan kompetensi SDM BBSPJPI melalui Bimbingan Teknis Penilaian PIPK.



29 Desember 2023

Kunjungan dan studi banding dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam

DESEMBER 2023



19 Desember 2023

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak melaksanakan studi tiru mengenai laboratorium di BBSPJPI.



19 Desember 2023

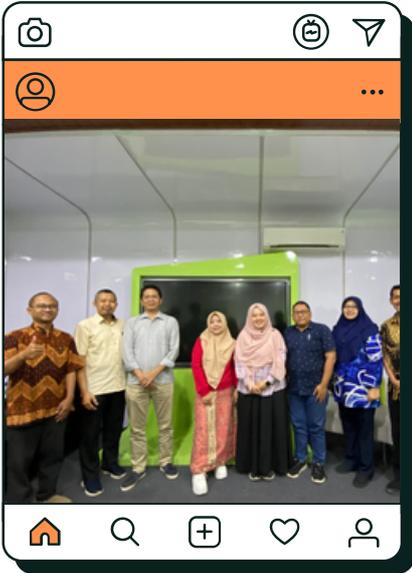
Benchmarking Unit Pelayanan Publik BBSPJPI bersama Politeknik ATK Yogyakarta



15 Desember 2023

Kunjungan dan studi banding dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa

DESEMBER 2023



4 - 6 Desember 2023

Bimbingan Teknis Verifikasi Metode Uji dan Perhitungan Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.



11 - 12 Desember 2023

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon melaksanakan studi tiru mengenai laboratorium kalibrasi yang kompeten di BBSPJPI

**TERIMA
KASIH.**

KONTAK



+62 821-3452-5006



bbspjppi.kemenperin@gmail.com



www.bbspjppi.kemenperin.go.id